

Rencana Kerja dan
Anggaran Perusahaan
Tahun 2024
Perum LKBN ANTARA

Penguatan dan Pengembangan Kapabilitas Korporat



**PERSETUJUAN DEWAN PENGAWAS
ATAS PENYAJIAN
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN
PERUM LKBN ANTARA 2024**

Dewan Pengawas Perum LKBN ANTARA memberikan persetujuan atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perum LKBN ANTARA tahun 2024 yang disajikan Direksi dan disusun berdasarkan hasil keputusan rapat Direksi dengan Dewan Pengawas pada 30 Oktober 2023 sesuai dengan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.KEP-101/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 dan PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN.

Jakarta, 30 Oktober 2023

Dewan Pengawas

Ketua


Kemal Gani

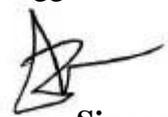
Anggota


Widiarsi Agustina

Anggota


Mayong Suryo Laksono

Anggota


Monang Sinaga

**PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN
PERUM LKBN ANTARA TAHUN 2024**

Direksi Perum LKBN ANTARA:

1. Menyatakan bertanggung jawab atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perum LKBN ANTARA tahun 2024.
2. Pada prinsipnya Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perum LKBN ANTARA tahun 2024 telah diupayakan untuk disusun dan disajikan sesuai Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP-101/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 dan PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN.
3. Bertanggung jawab atas system pengendalian intern dalam perusahaan.

Jakarta, 30 Oktober 2023
Direktur Utama



Akhmad Munir

Direktur Pemberitaan



Irfan Junaidi

Direktur Komersil,
Pengembangan Bisnis dan TI



Jaka Sugiyanta

Direktur Keuangan
dan Manajemen Risiko



Nina Kurnia Dewi

Nomor : S-42/DEWAS/11/2023

24 November 2023

Lampiran : -

Perihal : Tanggapan Dewan Pengawas atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perum LKBN Antara Tahun 2024

Kepada Yth.
Menteri Badan Usaha Milik Negara
Selaku Pemilik Modal Perum LKBN Antara
di-
Jakarta

Sehubungan dengan penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perum LKBN Antara Tahun 2024, dan memperhatikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Nasional Antara, serta Peraturan Menteri Negara BUMN NOMOR PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara tanggal 03 Maret 2023, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. RKAP Perum LKBN Antara Tahun 2024 telah dibahas bersama oleh Direksi dengan Dewan Pengawas, dan disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudent*) dengan memperhatikan prognosa hingga akhir tahun 2023, faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan pada tahun 2024 baik yang bersifat internal maupun eksternal, serta *Shareholder Aspiration* sebagaimana termuat dalam Surat Menteri BUMN Nomor: S-491/MBU/09/2023 tanggal 29 September 2023.
2. RKAP Perum LKBN Antara Tahun 2024 dipandang sudah cukup realistis dan wajar dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang akan mempengaruhi kegiatan perusahaan tahun 2024 dan telah mencerminkan adanya peningkatan dibandingkan dengan prognosa tahun 2023.
3. Target-target RKAP Perum LKBN Antara Tahun 2024 secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut :
 - 1) Pendapatan Usaha tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp 481,32 miliar atau naik 7% dari prognosa tahun 2023 sebesar Rp 448,93 miliar.
 - 2) Beban Pokok Usaha pada tahun 2024 diperkirakan naik 6% dari prognosa tahun 2023 sebesar Rp 312,59 miliar.
 - 3) Beban Administrasi dan Umum pada tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp 131,58 miliar atau mengalami kenaikan 24% dari prognosa tahun 2023 sebesar 106.43 miliar.
 - 4) Beban Pajak Penghasilan tahun 2024 diperkirakan sebesar Rp 3.42 miliar atau mengalami penurunan 42% dari prognosa 2023 sebesar Rp 5,93 miliar.
 - 5) Kas dan Setara Kas pada tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp 95,54 miliar atau mengalami penurunan 16% dari prognosa tahun 2023, yaitu sebesar 113,73 miliar.
 - 6) Nilai aset pada tahun 2024 diperkirakan sebesar Rp 485,35 miliar atau mengalami kenaikan 9% dari prognosa 2023 sebesar Rp 447,18 miliar.

Kantor Pusat

Jalan Antara Kav.53-61
Pasar Baru, Jakarta Pusat 10710
Tel: +62 21 3842591 (*Hunting*)

Kantor Operasional

Wisma Antara®
Jalan Cikini IV No. 11
Cikini, Jakarta Pusat 10350
Tel: +62 21 22395579 (*Hunting*)

Email: corsec@antara.id, sekper@antara.id
Website: antaranews.com, korporat.antaranews.com

-2-

4. Dewan Pengawas bersama dengan Direksi berusaha konsisten menjalankan program strategis perusahaan yang telah disusun melalui program kebijakan strategis perusahaan tahun 2024, antara lain:
 - 1) Membangun literasi politik untuk meningkatkan kesadaran politik masa pemilu
 - 2) Efisiensi perusahaan di segala lini
 - 3) Ekspansi teknologi dan aset penunjang kinerja
 - 4) Pelaksanaan monetasi aset atas aksi korporasi tahun 2023
 - 5) Peningkatan kepatuhan atas tata kelola untuk perbaikan sistem perusahaan
 - 6) Membentuk talenta digital dan inklusif untuk menciptakan ekosistem kerja yang dinamis dan agile

5. Untuk Kebijakan Pengawasan Manajemen Risiko, Dewan Pengawas memperhatikan selera Risiko sebagai berikut:
 - 1) **BISNIS DAN STRATEGI.** Manajemen menyadari bahwa tahun 2024 merupakan fondasi yang penting untuk mencapai target jangka panjang perusahaan, dan dengan demikian akan melakukan tindakan strategis berisiko signifikan dengan melakukan investasi di bidang teknologi yang menunjang kinerja jangka panjang.
 - 2) **PEMBERITAAN.** Tahun 2024 yang bertepatan dengan tahun pemilihan umum presiden dan legislatif merupakan peluang bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerja pemberitaan (dengan indikator tingkat keterbacaan) dan siap mengambil tindakan berisiko tinggi untuk kategori ini.
 - 3) **KEUANGAN.** Perusahaan mentoleransi eksposur risiko keuangan sampai level moderat – karena perusahaan akan melakukan investasi yang cukup besar di bidang teknologi di tengah ketidakpastian ekonomi akibat retraksi pasca pandemi dan pemilihan umum.
 - 4) **KESELAMATAN KERJA.** Untuk mendapatkan berita-berita eksklusif yang hanya bisa didapatkan dari Kantor Berita Antara dan meningkatkan reputasi perusahaan di bidang pers, perusahaan akan mengirim wartawan untuk melakukan peliputan ke daerah konflik, daerah rawan bencana, dan liputan berbahaya lainnya. Perusahaan siap menerima risiko dengan batas tinggi yang ditimbulkan dari sikap ini dan akan melakukan upaya-upaya mitigasi secara maksimal.
 - 5) **HUKUM DAN KEPATUHAN.** Perusahaan akan selalu patuh terhadap semua regulasi yang berlaku, baik untuk induk maupun untuk anak perusahaan, dan tidak akan mentoleransi pelanggaran-pelanggaran hukum yang berdampak besar pada keuangan maupun reputasi perusahaan.
 - 6) **REPUTASI.** Perusahaan akan melakukan sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan reputasi perusahaan sebagai kantor berita pada tahun pemilihan umum dan menerima risiko dalam batas moderat.

-3-

6. Untuk mewujudkan target RKAP Tahun 2024, Dewan Pengawas menyampaikan saran dan pendapat kepada Direksi sebagai berikut :
 - 1) Atas RKAP tahun 2024 sebagaimana uraian di atas, Dewan Pengawas berpendapat bahwa target dan anggaran yang disampaikan oleh Direksi sudah disusun secara cukup wajar dan realistis untuk dijalankan.
 - 2) Agar diupayakan perolehan kontrak kerja yang lebih jelas, baik dalam penugasan PSO maupun pekerjaan komersil untuk menjamin perolehan pendapatan perusahaan pada tahun 2024.
 - 3) Dalam melaksanakan program kerja tahun 2024, manajemen diminta konsisten dalam upaya merealisasikan rencana pendapatan komersil yang lebih tinggi daripada pendapatan PSO.
 - 4) Untuk mendukung pencapaian target laba tahun 2024, agar diupayakan pendapatan dengan margin yang relatif tinggi, didukung dengan ketersediaan modal kerja yang cukup dan pengendalian biaya (*cost control*) dalam upaya efisiensi.
 - 5) Penagihan piutang dilakukan secara lebih intensif, guna mendukung kegiatan usaha untuk meningkatkan dan mempertahankan ketersediaan Saldo Kas dan Setara Kas.
 - 6) Kontrak kerja yang telah diperoleh, agar segera dilaksanakan sesuai kualitas yang diperjanjikan, tingkat biaya yang terkendali dan penyelesaian yang tepat waktu.
 - 7) Pelaksanaan program kerja, agar menggambarkan besaran capaian berdasarkan kualitas (kompetensi) dan kuantitas SDM yang dimiliki.
 - 8) Penerapan Manajemen Risiko, agar dilaksanakan di setiap kebijakan dan keputusan, baik yang tercatat di RKAP 2024 (terencana) maupun yang bersifat insidental dalam proses pengelolaan perusahaan.
 - 9) Meningkatkan peran Satuan Pengawasan Internal sesuai dengan Kebijakan Tata Kelola yang Baik (GCG) dalam setiap aksi korporasi.
7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mengusulkan kepada Pemilik Modal berkenaan untuk dapat menyetujui dan mengesahkan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Persetujuan dan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024
 - 2) Pengesahan RKA Program TJSL tahun 2024
 - 3) Penetapan *Key Performance Indicators* (KPI) yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2024 antara Direksi dan Dewan Pengawas dengan Pemilik Modal.
 - 4) Penetapan *Key Performance Indicators* (KPI) Dewan Pengawas Tahun 2024

-4-

Demikianlah tanggapan, saran dan usulan Dewan Pengawas atas RKAP Perum LKBN Antara Tahun 2024.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Dewan Pengawas
Perum LKBN Antara



Kemal Gani
Ketua



Widiarsi Agustina
Anggota



Mayong Suryo Laksono
Anggota



Monang Sinaga
Anggota

Tembusan Yth.

1. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara ;
2. Asisten Deputi Bidang Jasa Telekomunikasi dan Media;
3. Direksi Perum LKBN Antara.

Kantor Pusat

Jalan Antara Kav.53-61
Pasar Baru, Jakarta Pusat 10710
Tel: +62 21 3842591 (*Hunting*)

Kantor Operasional

Wisma Antara®
Jalan Cikini IV No. 11

Cikini, Jakarta Pusat 10350
Tel: +62 21 22395579 (*Hunting*)

Email: corsec@antara.id, sekper@antara.id
Website: antaranews.com, korporat.antaranews.com

DAFTAR ISI

BAB I	5
PENDAHULUAN.....	5
1. Gambaran Umum Perusahaan.....	5
2. Visi, Misi, dan Nilai Perusahaan	6
3. Maksud dan Tujuan Perusahaan.....	7
4. Struktur Organisasi Perusahaan.....	7
5. Susunan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan.....	9
6. Profil Sumber Daya Manusia	9
7. Struktur Kepemilikan Grup Perusahaan dan Anak Perusahaan	10
BAB II.....	11
KINERJA DAN PROGNOZA RKAP 2023.....	11
1. Situasi Sosial-Ekonomi dan Pengaruhnya pada Kinerja Perusahaan.....	11
2. Perbandingan RKAP dan Pencapaian Kinerja Perusahaan.....	11
Kinerja Pendapatan Dibandingkan dengan RKAP.....	12
Kinerja Pengembangan Sumber Daya Manusia dibanding RKAP.....	13
Kinerja Pemenuhan Berita Penugasan Negara (PSO).....	13
BAB III	15
RENCANA KERJA PERUSAHAAN TAHUN 2024	15
1. Kondisi Perekonomian yang Mempengaruhi Pencapaian RKAP	15
2. Asumsi Penyusunan RKAP	15
3. Kebijakan, Sasaran Usaha, dan Strategi Perusahaan.....	16
Kebijakan.....	16
Sasaran Usaha	16
Strategi Perusahaan.....	17
3.1.1. Membangun Literasi Politik Untuk Menyukkseskan Pemilu.....	18
3.1.2. Efisiensi Perusahaan di Segala Lini.....	18
3.1.3. Pemantapan Usaha Eksisting	23
3.1.4. Ekspansi Teknologi dan Aset Tetap Penunjang Kinerja.....	24
3.1.5. Pengembangan talenta inklusif dan perbaikan tata kelola.....	25
Program Kerja	26
4. Penugasan Pemerintah bidang Pers.....	27
Sasaran	27
Ruang Lingkup Pemberitaan PSO	28

Produk dan Saluran Distribusi Berita PSO	29
Hak dan Kewajiban	29
Nilai Perjanjian.....	29
Rencana Pemenuhan Produksi PSO 2024	31
Jangka Waktu.....	32
Anggaran, Pendapatan, dan Biaya.....	32
Gambaran PSO 2023.....	33
Gambaran PSO 2024.....	35
1.1 Evaluasi Mandiri atas Tata Kelola Penugasan Kewajiban PSO.....	35
BAB IV.....	40
ANGGARAN PERUSAHAAN.....	40
1. Gambaran Umum Laba/Rugi Usaha.....	40
2. Anggaran Pendapatan Usaha	40
3. Anggaran Biaya Usaha	42
4. Anggaran Pendapatan dan Biaya Lainnya	44
5. Anggaran Investasi dan Pengembangan	44
6. Anggaran Sumber Daya Manusia.....	45
7. Anggaran Teknologi Informasi.....	46
8. Anggaran Penelitian dan Pengembangan	46
9. Rencana Pemenuhan TKDN.....	46
BAB V.....	49
PROYEKSI KEUANGAN PERUSAHAAN	49
1. Proyeksi Keuangan Pokok Perusahaan.....	49
1.1. Proyeksi Neraca	49
1.2. Proyeksi Laba/Rugi.....	50
1.3. Arus Kas.....	52
1.4. Proyeksi Sumber dan Penggunaan Dana.....	53
2. Proyeksi Pokok Keuangan Anak Perusahaan (AETP).....	55
2.1. Proyeksi Neraca	55
2.2. Proyeksi Laba/Rugi.....	56
2.3. Proyeksi Arus Kas	56
BAB VI.....	58
PROFIL MANAJEMEN RISIKO	58
1. Gambaran Umum	58
1.1 Klasifikasi Intensitas Risiko	58
1.2 Konteks Risiko yang akan Dihadapi pada 2024.....	58

2.	Program Kerja Manajemen Risiko 2024.....	61
3.	Kapasitas Risiko.....	61
4.	Matriks Strategi Risiko.....	62
4.1.	Selera Risiko	62
4.2.	Parameter dan Limit Risiko	62
5.	Gambaran Risiko Utama dalam Taksonomi Risiko K-BUMN.....	63
6.	Ringkasan Risiko Utama.....	63
7.	Heatmap.....	68
8.	Kriteria Risiko.....	68
BAB VII.....		73
ASPIRASI PEMEGANG SAHAM		73
1.	Aspirasi Pemegang Saham Dalam Fungsi Keuangan, Manajemen Risiko, SDM, Teknologi Informasi, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Hukum dan Peraturan Perundang-undangan.....	73
1.1	Fungsi Keuangan	73
1.2	Fungsi Manajemen Risiko	74
1.3	Fungsi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).....	77
1.4	Fungsi Sumber Daya Manusia	78
1.5	Fungsi TI.....	80
1.6	Fungsi Hukum dan Peraturan Perundang-undangan	80
1.7	Pengelolaan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)	81
1.8	Arahan Penggunaan Produk Dalam Negeri	81
2.	Key Performance Indicators (Indikator Kinerja Utama)	81
3.	Target Rasio-Rasio Perusahaan	95
4.	Matrix Kesesuaian RKAP dengan APS	95
BAB VIII		117
RENCANA KERJA DEWAN PENGAWAS		117
1.	Pendahuluan	117
	Latar Belakang	117
	Dasar Hukum	117
	Maksud dan Tujuan.....	118
	Susunan Dewan Pengawas dan Komite-Komite	118
	Pembagian Tugas Dewan Pengawas.....	118
2.	Tanggung Jawab, Tugas, Kewajiban, dan Wewenang Dewan Pengawas	119
1.1	Tanggung Jawab Dewan Pengawas.....	119
1.2	Tugas dan Kewajiban Dewan Pengawas.....	119
1.3	Wewenang Dewan Pengawas.....	121

3.	Rencana Kerja Dewan Pengawas.....	121
1.1	Aspek Pengawasan dan Pengarahan.....	121
1.2	Aspek Pelaporan.....	122
1.3	Aspek Dinamis.....	122
1.4	Jadwal Kegiatan Dewan Pengawas.....	123
4.	<i>Key Performance Indicator</i> (KPI) Dewan Pengawas.....	124
5.	Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Pengawas.....	125
BAB IX.....		127
PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN.....		127
BAB X.....		142
LAIN-LAIN.....		143
1.	Kesimpulan.....	143
2.	Hal-hal yang memerlukan persetujuan:.....	143
LAMPIRAN.....		144

BAB I PENDAHULUAN

1. Gambaran Umum Perusahaan

Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara adalah Kantor Berita Negara yang bergerak di bidang media, memproduksi dan mendistribusikan berita multimedia.

Kantor Berita Antara didirikan oleh Adam Malik, Soemanang, A.M. Sipahoetar dan Pandoe Kartawigoena pada 13 Desember 1937. Seiring dengan perkembangan organisasi, LKBN Antara resmi menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Kementerian BUMN dengan status badan hukum perusahaan umum (Perum) melalui Peraturan Pemerintah Nomor: 40 Tahun 2007. Nama LKBN Antara kemudian menjadi Perusahaan Umum Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA (Perum LKBN ANTARA) sejak 18 Juli 2007 dan mulai merambah berbagai lini bisnis berbasis konten, komunikasi, pengelolaan data dan pendidikan.

Pada Tahun 2023 Perum LKBN Antara melakukan aksi korporasi dengan tindaklanjut perpindahan Kantor Pusat LKBN Antara yang sebelumnya berada di Wisma Antara, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 17 Jakarta pusat menjadi Jalan Antara Kav. 53-61, Pasar Baru, Jakarta Pusat 10710 dan Kantor Operasional di Wisma ANTARA® Jalan. Cikini IV No.11, Cikini, Jakarta Pusat 10350. Perusahaan memiliki 32 kantor biro perwakilan di dalam negeri dan beberapa di luar negeri.

Sementara itu, lini usaha Kantor Berita Antara dapat diringkas sebagai berikut:

Lini Usaha	Uraian
Pemberitaan	Berita teks, foto, video, infografis, dan podcast merupakan produk utama perusahaan yang tersebar ke pelanggan (surat kabar maupun media online) di seluruh daerah Indonesia dan puluhan negara sahabat.
Layanan Data Finansial	Kantor Berita Antara – bekerja sama dengan Bloomber dan Reuters – merupakan salah satu pemain utama dalam penyediaan layanan data finansial dengan pelanggan meliputi lembaga-lembaga negara (Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan) serta lembaga finansial lainnya seperti bank.
Layanan Komunikasi Strategis	Layanan komunikasi terpadu merupakan salah satu produk unggulan Antara yang menyediakan kebutuhan komunikasi mulai dari <i>PR consulting</i> , pendidikan kehumasan, MICE, distribusi berita, dll.
Penugasan Pemerintah	Setelah menjadi Perum pada 2007, pada 2008 mendapat penugasan dalam bidang pers oleh pemerintah dengan sasaran penyebaran berita-berita yang transformatif ke seluruh pelosok Indonesia.
Electronic Trading Platform	Bisnis utama yang dijalankan anak usaha AETP sebagai penyedia Electronic Trading Platform dan resmi mendapatkan ijin usaha sejak 2022 dengan menjalin hubungan dengan Lembaga-lembaga strategis yaitu Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan, KPEI.

Tabel 1. 1 Lini Usaha Kantor Berita Antara

2. Visi, Misi, dan Nilai Perusahaan

Visi Perum LKBN Antara adalah:

Menjadi kantor berita yang berkelas dunia melalui penyediaan jasa berbagai produk multimedia.

Sementara itu misi perusahaan adalah:

- Memperkuat marwah LKBN Antara sebagai sebuah kantor berita serta perusahaan multimedia yang modern.
- Mengembangkan jurnalisme Indonesia yang mendidik, mencerahkan, dan memberdayakan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Menyediakan produk serta jasa informasi dan komunikasi yang akurat, terpercaya serta menguntungkan di bidang multimedia.
- Mengembangkan perusahaan yang modern dan berkesinambungan sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada para *stakeholders*-nya.

Adapun nilai-nilai yang dikembangkan dalam perusahaan saat ini adalah AKHLAK yang bisa dijelaskan dalam tabel berikut:

Nilai	Definisi	Panduan perilaku
<i>Amanah</i>	Memegang teguh kepercayaan yang diberikan	<ul style="list-style-type: none"> • Memenuhi janji dan komitmen. • Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan. • Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.
<i>Kompeten</i>	Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. • Membantu orang lain belajar. • Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.
<i>Harmonis</i>	Saling peduli dan menghargai perbedaan	<ul style="list-style-type: none"> • Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. • Suka menolong orang lain. • Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
<i>Loyal</i>	Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan Negara. • Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar. • Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.
<i>Adaptif</i>	Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan	<ul style="list-style-type: none"> • Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik. • Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi. • Bertindak proaktif.
<i>Kolaboratif</i>	Membangun kerja sama yang sinergis	<ul style="list-style-type: none"> • Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. • Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.

Nilai	Definisi	Panduan perilaku
		<ul style="list-style-type: none"> Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

Tabel 1. 2 Nilai dan Budaya Perusahaan LKBN Antara

3. Maksud dan Tujuan Perusahaan

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan yang tersebut dalam Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2007 khususnya pasal 6, maksud dan tujuan Perum LKBN Antara adalah sebagai berikut;

Layanan: menyelenggarakan usaha pemberitaan independen guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;

Komersial: menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang/jasa yang berkualitas, berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.

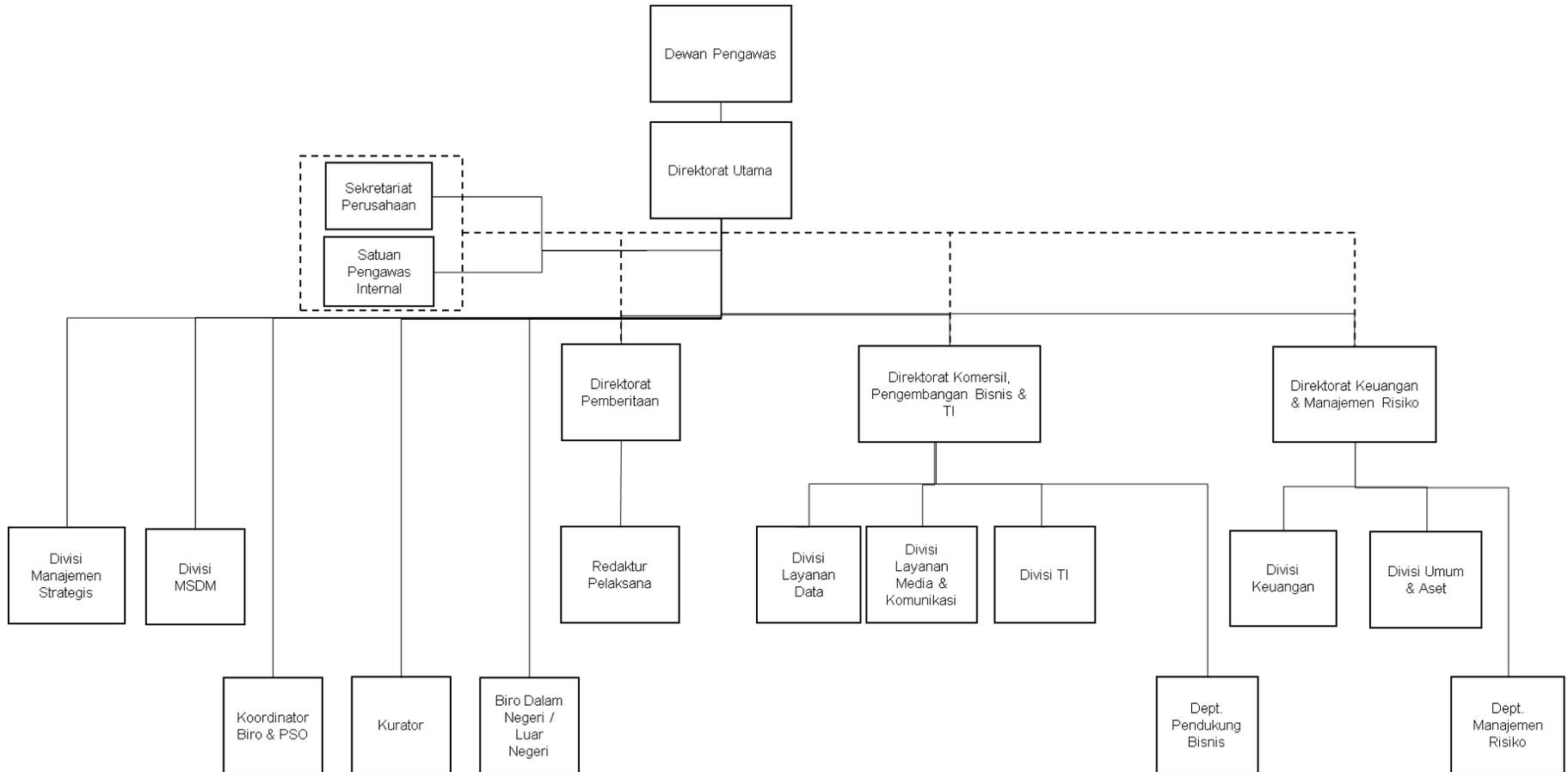
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, maka perusahaan dapat menyelenggarakan kegiatan sebagaimana sebagai berikut:

- Peliputan dan/atau penyebarluasan informasi kegiatan kenegaraan dan kemasyarakatan baik di tingkat nasional, daerah, maupun internasional,
- Penyediaan jasa berita, foto jurnalistik, grafik, data seketika, audio visual, teknologi informasi, dan multimedia lainnya yang berkaitan dengan kegiatan kenegaraan dan kemasyarakatan,
- Penyediaan jasa apresiasi dan pendidikan jurnalistik, serta pendidikan multimedia,
- Penyelenggaraan media elektronik, dan percetakan, dan
- Kegiatan usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan.

4. Struktur Organisasi Perusahaan

Perum LKBN Antara saat ini sesuai dengan ketetapan Direksi Nomor: PER- 011/DIR01.ANT/X/2023, Struktur Organisasi yang dipimpin oleh satu orang direktur utama dengan membawahi empat direktorat. Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Struktur induk Perum LKBN Antara



Gambar 1 Struktur Induk Kantor Berita Antara per Oktober 2023

5. Susunan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan

Susunan Dewan Pengawas Perum LKBN Antara adalah sebagai berikut;

Jabatan	Nama
Ketua Dewan Pengawas	Kemal Effendi Gani
Anggota Dewan Pengawas	Widiarsi Agustina
Anggota Dewan Pengawas	Mayong Suryo Laksono
Anggota Dewan Pengawas	Monang Sinaga

Tabel 1. 3 Susunan Dewan Pengawas LKBN Antara

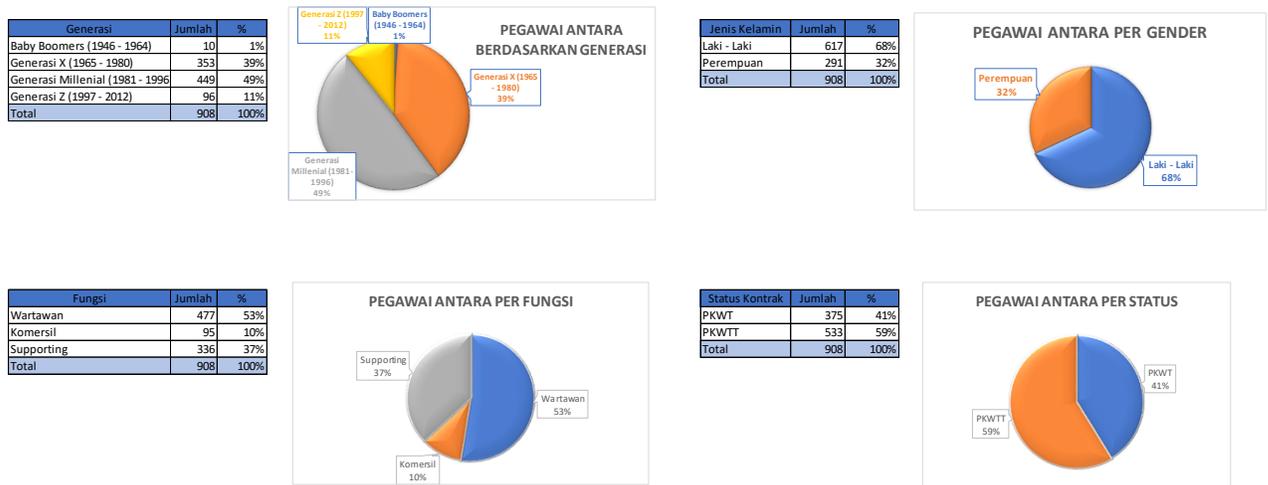
Sementara itu susunan direksi perusahaan adalah sebagai berikut;

Jabatan	Nama
Direktur Utama	Akhmad Munir
Direktur Pemberitaan	Irfan Junaidi
Direktur Komersil, Pengembangan Bisnis dan Teknologi Informasi	Jaka Sugianta
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	Nina Kurnia Dewi

Tabel 1. 4 Susunan Dewan Direksi Kantor Berita Antara

6. Profil Sumber Daya Manusia

Komposisi SDM Perum LKBN Antara pada bulan Oktober 2023 berjumlah 908 karyawan. Dimana dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut:



7. Struktur Kepemilikan Grup Perusahaan dan Anak Perusahaan

Perum LKBN Antara adalah badan usaha milik negara yang kepemilikannya sepenuhnya berada di tangan negara. Sementara itu, Kantor Berita Antara juga memiliki satu anak perusahaan aktif yaitu, PT. Antara ETP.

PT. Antara ETP secara resmi berdiri sejak 24 Januari 2022 dan mendapatkan lisensi ETP dari Bank Indonesia pada tanggal 17 Oktober 2022. Sejak 1 Desember 2022, PT. Antara ETP telah beroperasi menjalankan *venue electronic trading platform* yang didukung oleh Bloomberg sebagai *partner* penyedia layanan dan teknologi. PT. Antara ETP menggunakan basis *platform* perdagangan FXGO dari Bloomberg yang sudah terbukti efisien, aman dan telah digunakan di berbagai negara. Antara ETP bisa diakses oleh bank-bank dan korporasi yang berdomisili di Indonesia yang telah menandatangani perjanjian yang diperlukan dengan Bloomberg dan Antara ETP untuk memperoleh akses ke *platform* Antara ETP.

BAB II

KINERJA DAN PROGNOZA RKAP 2023

1. Situasi Sosial-Ekonomi dan Pengaruhnya pada Kinerja Perusahaan

Prospek pemulihan ekonomi global sampai dengan akhir tahun 2023 dilihat dari data Kementerian Keuangan diperkirakan masih akan tertahan. Beberapa faktor yang memengaruhi perlambatan ekonomi global adalah tekanan sektor keuangan, kesulitan pembayaran utang (*debt distress*), dampak eskalasi perang di Ukraina, tingkat inflasi persisten tinggi, serta suku bunga yang tinggi dalam waktu yang lama. Walau demikian, proyeksi perekonomian global pada tahun 2024 diperkirakan akan membaik, dimana berdasarkan data World Economic Outlook (IMF), perekonomian global pada tahun 2024 diperkirakan berada pada level 3%. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi di Asia diproyeksikan tumbuh sebesar 5% pada tahun 2024.

Indonesia sendiri diperkirakan termasuk sebagai salah satu negara yang masih mampu tumbuh kuat hingga akhir 2023, melanjutkan momentum positif periode sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi nasional tumbuh di atas 5.0 persen dalam periode tujuh kuartal berturut-turut dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Pertumbuhan ekonomi diarahkan lebih berkualitas dan inklusif, terutama ditunjukkan oleh kemampuan menurunkan tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan serta ketimpangan. Walaupun fundamental ekonomi domestik yang kokoh dan stabil tersebut ditopang oleh terjaganya inflasi di tingkat yang relatif rendah. Dengan memperhatikan proyeksi perekonomian global, fundamental ekonomi yang kuat serta kebijakan fiskal yang cermat, responsif, dan prudent tersebut, perekonomian Indonesia pada tahun 2024 diperkirakan mampu tumbuh hingga 5.2%. Oleh karena itu, diperlukan percepatan transformasi ekonomi untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan.

Seiring dengan pemulihan kondisi ekonomi nasional, Perum LKBN Antara tetap mampu bertumbuh positif dan berhasil membukukan pendapatan sebanyak Rp. 448.932.266.107- pada akhir tahun 2023. Hal ini ditopang dengan adanya pendapatan dari Kerjasama Operasional bersama Bloomberg sebesar 33.28%.

2. Perbandingan RKAP dan Pencapaian Kinerja Perusahaan

Dalam salah satu Strategi Perum LKBN Antara tahun 2023 Revitalisasi Aset Pasca Aksi Korporasi atas Aksi Korporasi, program pelaksanaan pembangunan Kompleks Antara Pasar Baru masih akan berlanjut hingga TW 1 pada tahun 2024, walaupun untuk Gedung Wisma Antara ② telah selesai, sehingga ruang kerja yang disediakan untuk para pegawai sudah dapat terpakai. Dengan adanya kepemilikan terhadap Gedung kantor sendiri, Perum LKBN Antara dapat melakukan efisiensi sebesar Rp 5,2M dari Biaya Sewa dan Service Charge yang harus dikeluarkan atau sebesar Rp. 2,2M (nilai setelah dikurangi pendapatan deviden atas kepemilikan Wisma Antara), dibandingkan saat bertempat di Wisma Antara, selain di tahun 2024 apabila semua revitalisasi atas aset telah selesai, Perum LKBN Antara bisa mendapatkan potensi pendapatan baru dari monetasi aset atas aksi korporasi di tahun 2024.

Berdasarkan parameter kinerja perusahaan pada 2023 yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2023 menunjukkan bahwa LKBN Antara telah menyelesaikan beberapa target penting atas inisiatif strategis.

Pencapaian inisiatif strategis pada tahun 2023 Perum LKBN Antara berdasarkan RKAP 2023 dapat digambarkan dalam tabel berikut:

No	Inisiatif Strategi 2023	Capaian per-September 2023	Program Kerja Yang Masih Harus Dilakukan
1	Revitalisasi Aset Pasca Aksi Korporasi	69%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renovasi Pasar baru masih belum selesai, perpanjangan hingga TW 1 tahun 2024 2. Masih belum selesai penghapusan asset furniture dan alat kerja dari target 1925 3. Renovasi asset Cisarua (ex-PNRI) akan dilaksanakan pada 2024 4. Renovasi aset Ambon akan dilaksanakan pada 2024 5. Masih belum selesai Pembangunan Kantor Biro Kaltara 6. Sebagian besar Renovasi bangunan dan Prasarana kantor Biro selesai 7. Program kendaraan dinas Direksi maupun operasional di tahun 2024
2	Membangun Literasi Politik untuk meningkatkan Kesadaran Politik Jelang Pemilu 2024	100%	Jumlah produksi berita anti-hoax sampai dengan TWIII 2023 sebanyak 351 berita
3	Membentuk Talenta Digital dan inklusivitas untuk menciptakan ekosistem kerja yang dinamis dan agile	45%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Struktur Organisasi di TW 4 2. Dashboard HRMS 3. Penerapan implementasi talent management 4. blueprint atas Digital talent 5. evaluasi manning pada SBU ADM dengan job Analysis dan workload analysis 6. Job Analysis dan Workload Analysis pada unit kerja Perusahaan 7. Talenta mapping, career path dan job grading untuk Human Capital 8. Kesiapan talent Mobility 9. kebijakan atas fasilitas Kesehatan 10. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tahun 2023
4	Meningkatkan tata kelola perusahaan melalui pemutakhiran dan penguatan sistem	72%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Audit TJSL (SROI) 2. Monitoring/reviu atas pelaksanaan program Pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri 3. Kenaikan nilai maturitas IT dibanding tahun sebelumnya
5	Melakukan diversifikasi model bisnis melalui inovasi berkelanjutan	96%	Pemutakhiran situs Antaranews.com yang dapat diakses menggunakan desktop masih dalam progress penyelesaian
6	Redefinisi Masa Depan Kantor Berita Antara	67%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengesahan Konsep Antara Baru 2. Melaksanakan studi banding ke perusahaan/instansi terkait di luar negeri oleh Direksi dan Tim kerja Antara Baru 3. Pelaksanaan Rebranding Antara 4. Membangun Antara di IKN (Ibukota Negara Nusantara)

Tabel 2. 1 Capaian Inisiatif Strategis 2024

Kinerja Pendapatan Dibandingkan dengan RKAP

Sementara itu prognosa pencapaian kinerja pendapatan pendapatan PSO dan komersial pada tahun 2023 dibandingkan dengan RKAP dan laporan yang telah diaudit pada tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

(dalam juta rupiah)

No	Nama Akun	Audited 2022	RKAP 2023	2023 (Prognosa)
1	Penugasan Pemerintah (PSO)	151,616	155,743	162,771
2	Komersil	247,571	279,798	286,161
3	Divisi Layanan Data	166,159	169,639	172,449
4	Divisi Layanan Media Dan Komunikasi	60,216	78,298	78,737
5	Biro Daerah	19,662	19,976	19,976
6	Anak Perusahaan PT AETP	1,534	11,885	15,000
	Total	399,187	435,540	448,932

Tabel 2. 2 Prognosa Komposisi Pendapatan Komersial Antara

Dari sisi pendapatan, kinerja perusahaan pada tahun 2023 diperkirakan pada akhir tahun telah mencapai target RKAP. Pendapatan PSO pada tahun 2023 mengalami kenaikan 7.36% dibanding tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun 2023 pemberlakuan pajak PPN tidak diberlakukan.

Beberapa aspek keuangan penting yang dapat menjadi indikator kinerja perusahaan pada tahun 2023 bisa digambarkan dalam tabel berikut:

(dalam juta rupiah)

Aspek	2022	RKAP 2023	2023 (Prognosa)
Pendapatan usaha	399,187	435,540	448,932
Beban pokok usaha	278,676	304,067	312,586
Beban umum	106,181	95,860	106,720
Laba bersih	134,200	22,499	22,734
Arus kas operasi	(16,824)	52,594	32,707
Arus kas	143,294	110,216	113,732
EBITDA	43,850	47,770	47,780

Tabel 2. 3 Perbandingan Capaian Keuangan 2023 dan 2024

Kinerja Pengembangan Sumber Daya Manusia dibanding RKAP

Perum LKBN Antara telah melaksanakan program pengembangan SDM untuk karyawannya dalam bentuk pelatihan, dengan data realisasi pelatihan untuk karyawan Perum LKBN Antara hingga bulan September 2023 mencakup 166 In House training dengan jumlah peserta sebesar 2.486 orang, 59 pelatihan publik yang diikuti 268 peserta serta 4 pelatihan sertifikasi yang diikuti 35 peserta. Selain itu, guna memenuhi arahan Kementerian BUMN terkait Pelatihan Digital Talent dengan 14 area pengembangan pelatihan dengan 108 peserta.

Kategori Pelatihan	Jumlah Pelatihan	Target Pelatihan	Jumlah Peserta
In house	166	125	2.486
Public	59	100	268
Digital Talent	14	6	108

Tabel 2. 4 Kategori Pelatihan

Kinerja Pemenuhan Berita Penugasan Negara (PSO)

Hingga saat ini, perusahaan diperkirakan akan memenuhi semua target tahun 2023 terkait pemenuhan berita PSO sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

PRODUK	KUOTA	%	REALISASI												JUMLAH	
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des		
TEKS																
TEMA 1	43,665	30.0%	3,485	3,567	3,797	3,362	3,548	3,427	3,471	3,874	4,100	4,414	4,414	2,207	43,665	
TEMA 2	43,665	30.0%	3,126	3,647	3,553	3,507	3,967	3,067	3,389	4,174	4,249	4,394	4,394	2,197	43,665	
TEMA 3	58,220	40.0%	4,816	5,145	5,404	4,537	5,233	5,139	5,053	4,967	5,058	5,147	5,147	2,574	58,220	
JUMLAH	145,550		11,427	12,359	12,754	11,406	12,748	11,633	11,913	13,015	13,407	13,955	13,955	6,978	145,550	
ARTIKEL																
TEMA 1	510	30.0%	37	27	26	19	36	27	28	35	26	100	100	50	510	
TEMA 2	510	30.0%	22	30	37	30	44	33	32	31	31	88	88	44	510	
TEMA 3	680	40.0%	51	40	54	60	51	77	66	74	82	50	50	25	680	
JUMLAH	1,700		110	97	117	109	131	137	126	140	139	238	238	119	1,700	
FOTO																
TEMA 1	5,400	30.0%	461	491	439	470	355	356	419	432		565	565	282	5,400	
TEMA 2	5,400	30.0%	284	394	327	206	416	310	432	436		741	741	371	5,400	
TEMA 3	7,200	40.0%	532	600	656	406	629	716	578	696		682	682	341	7,200	
JUMLAH	18,000		1,277	1,485	1,422	1,082	1,400	1,382	1,429	1,564		1,988	1,988	994	18,000	
PHOTO STORY																
TEMA 1	14	30.0%	1	1	1	2	1	1	1	1		2	1		14	
TEMA 2	13	30.0%	1	1	1	-	1	2	1	2		1	1		13	
TEMA 3	18	40.0%	-	1	1	2	1	2	2	1		2	2	1	18	
JUMLAH	45		2	3	3	4	3	5	4	4		5	4	1	45	
INFOGRAFIS																
TEMA 1	45	30.0%	7	5	4	3	3	4	4	4		3	3	2	45	
TEMA 2	45	30.0%	7	7	4	3	6	4	5	5		1	1	1	45	
TEMA 3	60	40.0%	4	5	3	6	5	4	5	7		6	6	3	60	
JUMLAH	150		18	17	11	12	14	12	14	16		10	10	5	150	
TV HARDNEWS																
TEMA 1	2,250	30.0%	234	216	255	216	203	207	210	180	185	151	151	76	2,382	
TEMA 2	2,250	30.0%	245	213	214	197	238	195	194	198	182	159	159	79	2,380	
TEMA 3	3,000	40.0%	304	279	288	252	317	240	274	266	255	223	223	111	3,182	
JUMLAH	7,500		783	708	757	665	758	642	678	644	622	533	533	266	7,944	
FEATURES																
TEMA 1	12	30.0%	1	-	-	1	1	4	2	1	1	1			12	
TEMA 2	12	30.0%	1	1	-	-	-	2	-	1	3	2	2		12	
TEMA 3	16	40.0%	2	2	3	-	3	1	2	1	1	1			16	
JUMLAH	40		4	3	3	1	4	7	4	3	5	4	2	-	40	
PODCAST																
TEMA 1	5	33.3%	1	-	-	1	-	1	-	-	2				5	
TEMA 2	4	26.7%	1	-	1	-	-	-	1	1	-				4	
TEMA 3	6	40.0%	1	1	1	-	1	-	-	-	2				6	
JUMLAH	15		3	1	2	1	1	1	1	1	4	-	-	-	15	

Tabel 2. 5 Pemenuhan kewajiban berita penugasan pada 2023 -

BAB III RENCANA KERJA PERUSAHAAN TAHUN 2024

1. Kondisi Perekonomian yang Mempengaruhi Pencapaian RKAP

Indonesia telah berhasil mengatasi rintangan akibat pandemi dengan hasil yang baik, dan menjadi salah satu negara yang berhasil menangani krisis Kesehatan dengan cepat dan baik. Pemulihan ekonomi yang cepat, konsisten dan inklusif dengan pertumbuhan ekonomi selama tujuh kuartal terakhir sejak tahun 2021 secara konsisten berada di atas 5%.

Kondisi perekonomian Indonesia masih cukup solid dan terkendali meskipun dihadapkan pada guncangan dan pelemahan global. Di tengah fluktuasi perekonomian dunia, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal tiga diperkirakan tetap tumbuh positif didukung oleh inflasi yang terkendali, surplusnya neraca perdagangan, serta membaiknya daya beli masyarakat.

Menurut Proyeksi Kementerian Keuangan, pada tahun 2024, Indonesia sebagai negara dengan sistem ekonomi terbuka, prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh dinamika dan prospek ekonomi global maupun faktor-faktor domestik. Prospek pertumbuhan dari sisi global untuk tahun 2024 diperkirakan membaik dibandingkan tahun 2023 yang dianggap sebagai tahun yang paling lemah. Namun kita akan terus melakukan antisipasi dari berbagai tantangan lain baik dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Masalah perubahan iklim dan perkembangan teknologi informasi dan digital yang cepat, serta ancaman pandemi juga masih menjadi risiko yang harus kita perhitungkan.

Berdasarkan prospek pertumbuhan ekonomi tahun 2024 tersebut, Perum LKBN Antara telah merencanakan sasaran strategis guna mengakselerasi kinerja perusahaan melalui transformasi bisnis perusahaan. Peningkatan pendapatan akan dilakukan melalui diversifikasi produk dan bisnis guna mencapai peningkatan pendapatan secara berkelanjutan, serta ekspansi bisnis dengan layanan *Electronic Trading Platform* di Anak Usaha.

2. Asumsi Penyusunan RKAP

Indikator	Outlook 2023	RAPBN 2024
Pertumbuhan ekonomi (% <i>,yoy</i>)	5,1	5,2
Inflasi (% <i>,yoy</i>)	3,1	2,8
Nilai tukar rupiah (<i>Rp/USD</i>)	15.100	15.000
Suku bunga (%)	6,8	6,7
Harga minyak mentah Indonesia (<i>USD/barrel</i>)	78	80

Tabel 3. 1 Asumsi Penyusunan RKAP 2024 (Sumber: Aspirasi Pemegang Saham)

Dari asumsi ekonomi makro di atas, yang paling mempengaruhi kondisi laporan keuangan Perum LKBN Antara adalah nilai tukar Rupiah terhadap Dollar US karena beberapa sumber pendapatan diperoleh dalam bentuk Dollar US, meskipun pengeluaran pembiayaan operasional misalnya *profit sharing* kepada mitra asing, pembayaran biaya operasional biro luar negeri dan pembiayaan liputan luar negeri akan membebani kondisi keuangan dalam jumlah yang cukup signifikan. Tingkat inflasi akan berpengaruh terhadap kenaikan biaya-biaya operasional.

3. Kebijakan, Sasaran Usaha, dan Strategi Perusahaan

Kebijakan

Kebijakan penganggaran dalam RKAP tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Kenaikan pendapatan minimum adalah 7% dari prognosa tahun 2023
- b. Gross Profit Margin harus mencapai 31%
- c. Rencana Pendapatan dalam RKAP 2024 sebesar Rp481,32 Miliar adalah:
 - Porsi pendapatan PSO 37% atau Rp176,35 Miliar
 - Porsi pendapatan komersil 60% atau Rp288,92 Miliar
 - Porsi pendapatan anak usaha (Antara ETP) 3% atau Rp16,06 Miliar
- d. Mengalokasikan anggaran tiga koma lima persen (3.50%) dari total biaya human capital, untuk Porgram Peningkatan kualitas SDM perusahaan berbasis kompetensi.
- e. Mengalokasikan anggaran sebesar Rp500Juta sebagai kegiatan program TJSJ tahun 2023 diprioritaskan pada Pilar Sosial dan Pilar Lingkungan menyesuaikan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).
- f. Arus Kas bersih operasional perusahaan tahun 2024 adalah Rp24,54 Miliar
- g. Tingkat pencapaian EBITDA Anggaran tahun 2024 sebesar Rp37,78 Miliar
- h. Tingkat pencapaian laba di tahun 2024 Rp12,13 Miliar
- i. Target atas *cash flow* akhir tahun 2024 Rp95,55 Miliar

Pembiayaan program dan kegiatan yang terkait dengan Arah Kebijakan Strategis Perusahaan 2024 adalah tetap menjadi fokus prioritas.

Untuk mempermudah pembuatan program kerja yang sesuai dengan arah strategi dan kebijakan perusahaan, maka dibuatkan KPI yang bisa menjadi dasar pembuatan program kerja dan kegiatan agar menjadi terukur dan terarah.

Sasaran Usaha

Sejumlah sasaran kunci yang ingin dicapai perusahaan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

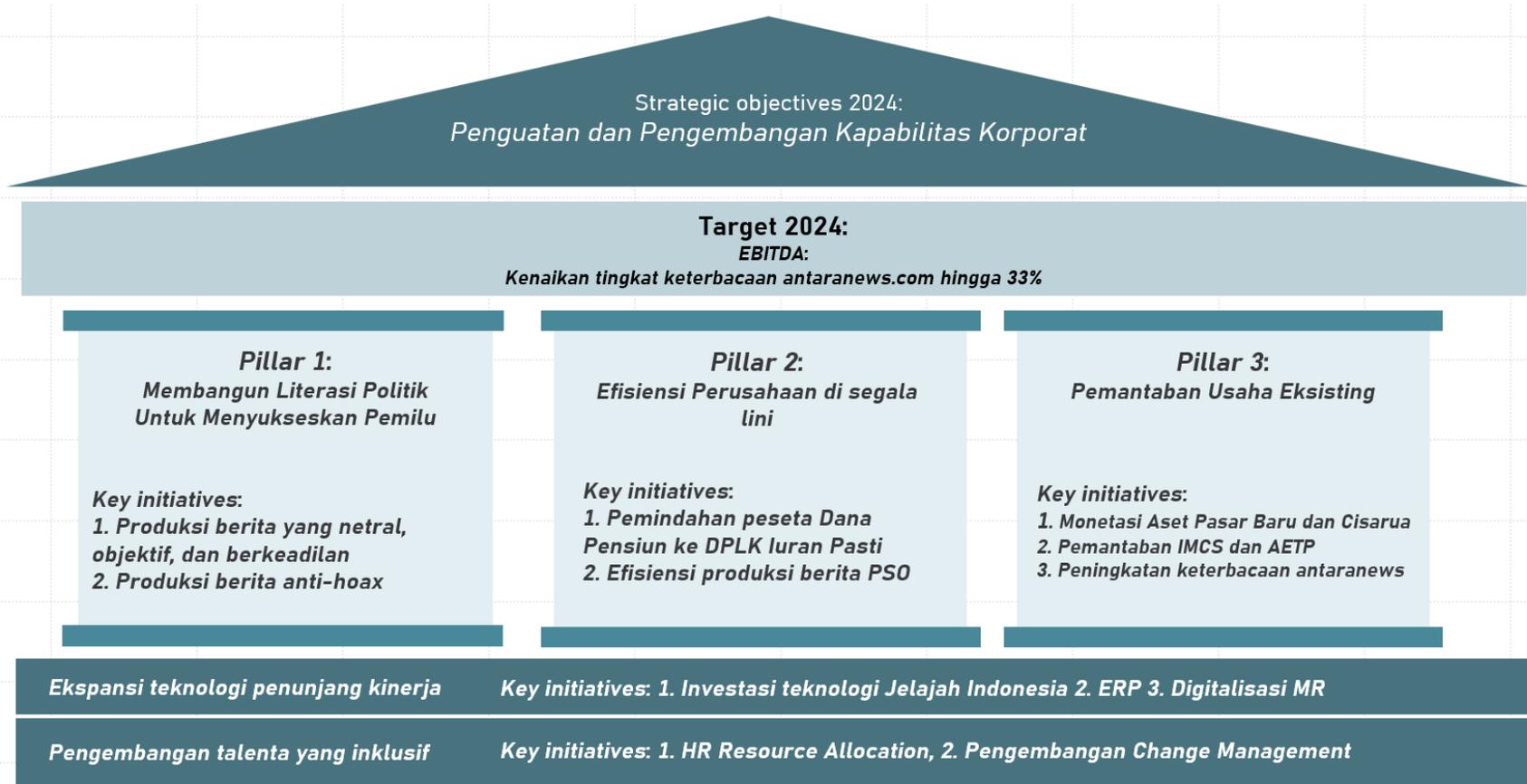
Aspek	Sasaran 2024	Perbandingan 2023 (prognosa)
Pendapatan	Rp 481,32 miliar	Rp 448,93 miliar
Laba bersih	Rp 12,14 miliar	Rp 22,73 miliar
Pemberitaan	Rp. 176,35 milliar	Rp. 162,77 milliar
Ekspansi bisnis (AETP)	Rp. 16,06 milliar	Rp. 14,99 milliar

Tabel 3. 2 Sasaran Usaha Kantor Berita Antara tahun 2023

Secara umum, sasaran utama Perum LKBN Antara pada tahun 2024 adalah menaikkan pendapatan komersial dan anak perusahaan sebesar 6% menjadi Rp 303,51 miliar – dengan tambahan pendapatan PSO yang diasumsikan naik menjadi Rp 176,35 miliar.

Strategi Perusahaan

Berdasarkan sasaran-sasaran usaha di atas, Perum LKBN Antara menetapkan strategi perusahaan sebagai berikut;

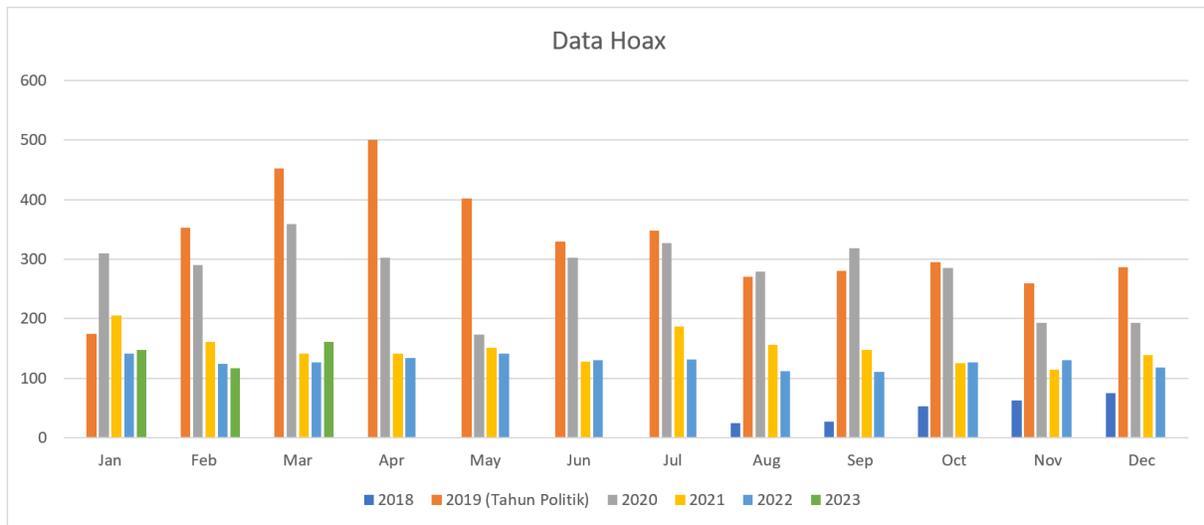


Gambar 2 Strategi Perum LKBN Antara tahun 2024

3.1.1. Membangun Literasi Politik Untuk Menyukseskan Pemilu

Sebagai Kantor Berita Negara, Perum LKBN Antara turut serta menyukseskan agenda Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Pemilu yang dilaksanakan mulai dari Pemilihan Anggota Legislatif (DPR-RI, DPD-RI, DPRD), pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan dilanjutkan pemilihan Kepala Daerah, mengharuskan masyarakat memahami tentang informasi terkait pemilu dengan mendapatkan berita yang objektif dan imparsiial agar bisa memiliki intelektual dalam menjalankan pesta demokrasi yang sehat.

Antara juga berperan penting menjadi penjaga gawang terakhir kebenaran, objektivitas, dan keberimbangan informasi yang beredar di masyarakat terkait pemilu. Dalam hal ini, salah satu program unggulan perusahaan adalah memproduksi berita-berita yang mengklarifikasi berita bohong (hoax). Grafik di bawah ini menunjukkan bahwa berita bohong mulai naik 1 tahun menjelang Pemilu dan akan mencapai puncaknya pada bulan-bulan di sekitar pemungutan suara. Oleh karena itu peran Antara sangat penting untuk meluruskan berita-berita bohong.



Gambar 3 Tren berita bohong pada masa pemilu

Strategi	Program Kerja Utama	Biaya	Sasaran
Membangun Literasi Politik untuk Menyukseskan Pemilu	Produksi berita anti-hoax	-	Peningkatan keterbacaan antaranews 33% menjadi 80 juta setahun
	Jelajah Indonesia	Rp 4,000,000,000.-	
	Peningkatan kualitas berita PSO	-	Peningkatan persen kelolosan berita PSO sebesar 5% menjadi 80%
	Pengelolaan ulang sosial media		Peningkatan jumlah follower media sosial Antara hingga 15%

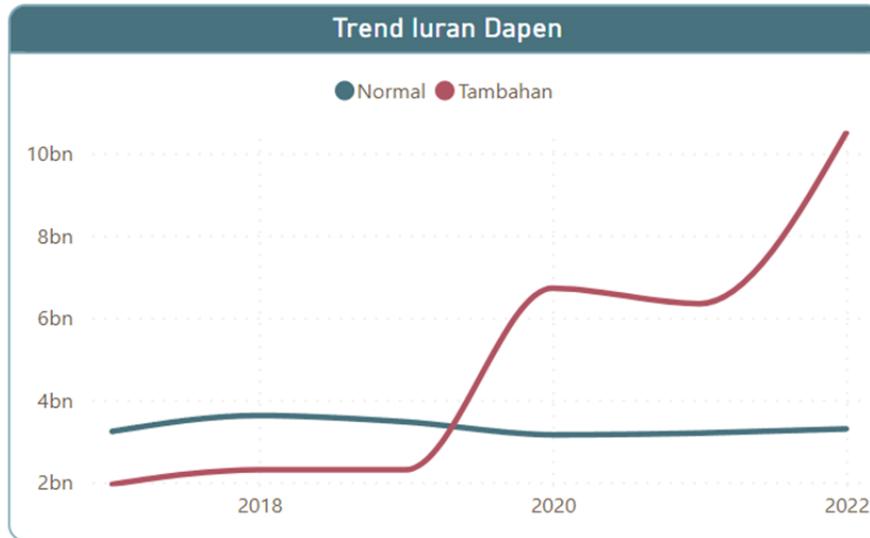
3.1.2. Efisiensi Perusahaan di Segala Lini

Salah satu strategi utama perusahaan pada tahun 2024 adalah melakukan efisiensi di semua unit kerja. Pada unit kerja supporting, Perum LKBN Antara berencana untuk membubarkan Dana Pensiun yang selama dua tahun terakhir menyumbang beban umum dan administrasi cukup signifikan sebesar Rp10 miliar per tahun. Sementara itu pada unit kerja produksi, perusahaan akan membatasi

produksi berita PSO sebesar 120 persen – mengingat overproduksi berita selama lima tahun terakhir selalu berada di atas 140 persen dan berdampak pada besarnya tunjangan kinerja untuk karyawan.

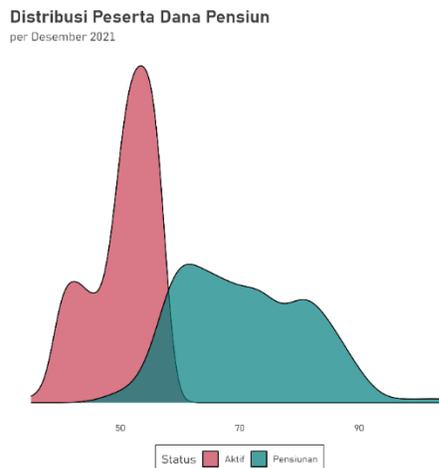
a. Pengalihan Program Dana Pensiun menjadi DPLK Manfaat Pasti

Pembubaran Dana Pensiun menjadi agenda penting bagi perusahaan mengingat beban perusahaan untuk menutup defisit solvabilitas terus naik dari tahun ke tahun selama empat tahun terakhir, sebagaimana terlihat pada grafik berikut:



Pada tahun 2022 lalu, beban iuran tambahan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan naik hampir dua kali lipat menjadi Rp10 miliar akibat defisit solvabilitas yang terus meningkat. Pada tahun 2023 ini, iuran tambahan untuk Dana Pensiun diperkirakan akan terealisasi sebesar Rp12 miliar.

Naiknya iuran tambahan tersebut terjadi karena faktor fundamental situasi Dana Pensiun Perum LKBN Antara yang tidak menerima peserta baru sejak tahun 2012. Selain itu, profil kepesertaan Dana Pensiun juga didominasi oleh peserta pasif dengan rasio perbandingan 140 peserta aktif dan 450 peserta pasif. Selain itu, umur para peserta aktif pun lebih banyak berada pada usia menjelang pensiun (50-55) sebagaimana terlihat pada grafik distribusi peserta sebagai berikut:



Faktor-faktor di atas membuat risiko kenaikan defisit solvabilitas (yang berdampak pada bertambahnya iuran tambahan oleh pendiri) membuat perusahaan memutuskan untuk menyelesaikan program Dana Pensiun pada 2024. Jika dilanjutkan, tren penurunan defisit solvabilitas dikhawatirkan akan terus menurun pada tahun-tahun mendatang sampai pada level yang tidak dapat ditanggung oleh perusahaan.

Selain itu, hasil uji tuntas terhadap Dana Pensiun Perum LKBN Antara pada tahun ini menunjukkan bahwa asumsi utama yang digunakan oleh Dana Pensiun perlu dikuatkan kembali. Tabel mortalita (asumsi pertama) yang digunakan oleh Dana Pensiun memangkas usia harapan hidup para pensiunan sampai pada 74 tahun, sementara bunga teknis (asumsi kedua) yang digunakan juga tidak sesuai dengan kinerja real Dapen. Dapen selama ini menggunakan asumsi tingkat bunga di sekitar 10% meskipun kinerja nyata selama 10 tahun terakhir hanya 6,42%.

Jika kedua asumsi tersebut dirubah sesuai dengan praktik terbaik – dengan menyesuaikan tabel mortalita dan menurunkan asumsi bunga, maka defisit solvabilitas yang harus ditanggung perusahaan akan naik hampir 8 kali lipat – dari Rp26,7 milyar menjadi Rp177, 21 milyar.

Simulasi Kekayaan Pendanaan (Rp milyar)	Hasil Valuasi Aktuaria - Program Pensiun		
	Bunga = 10%	Bunga = 10%	Bunga = 6.52%
	GAM83 (Modified) 31/12/2021*	GAM71 (P/W) 30/06/2022	
Defisit Solvabilitas	-26,83	-80,07	-177,21
Rasio Solvabilitas (R/S)	81,0%	58,0%	38,4%
(Defisit)/Surplus	-27,41	-92,87	-202,53
Rasio Pendanaan (R/P)	80,7%	54,3%	35,3%
Iuran tambahan per tahun	10,49	23,03	59,30

Atas pertimbangan-pertimbangan:

- Kondisi fundamental berhentinya peserta aktif Dana Pensiun sejak tahun 2012,
- Semakin meningkatnya defisit solvabilitas yang harus ditanggung perusahaan,
- Ketidakmampuan perusahaan untuk menguatkan asumsi dengan mengubah tabel mortalita dan menurunkan tingkat bunga teknis,

Perusahaan memutuskan untuk melikuidasi Dana Pensiun pada tahun 2024 sampai dengan 2025.

Dengan adanya program pengalihan Dana Pensiun ini, perusahaan diharapkan dapat melakukan efisiensi lebih dari Rp10 – 20 milyar setiap tahunnya setelah tahun 2025.



Proses likuidasi Dana Pensiun dan pengalihannya memang akan memukul mundur kinerja keuangan perusahaan pada tahun 2024 – karena perusahaan harus menutup defisit solvabilitas yang menjadi hak peserta Dana Pensiun.

Aspek	Nilai Sekarang	Pelunasan	Defisit
Kekayaan Untuk Pendanaan	123.077.660.064		
Liabilitas Solvabilitas			
Peserta Aktif	52.384.257.539	25.682.767.080	-26.701.490.459
Pensiun Ditunda	586.807.453	586.807.453	Lunas
Pensiunan	96.808.085.531	96.808.085.531	Lunas

Untuk mengantisipasi dampak keuangan dari aksi pengalihan Dana Pensiun tersebut, perusahaan telah menyiapkan anggaran sebagai berikut:

Aspek	Nilai	Keterangan
Defisit solvabilitas	Rp 26,7 milyar	Penutupan defisit solvabilitas
Dana Cadangan	Rp 7,3 milyar	Cadangan yang disiapkan perusahaan untuk menjamin nilai investasi dapen yang dicairkan pada 2024 – 2025 bernilai sama dengan nilai per tanggal likuidasi (31 Desember 2023), terutama untuk beberapa hal berikut: 1. Nilai tanah dan bangunan dengan nilai buku sebesar Rp9 milyar 2. Nilai obligasi pada BUMN karya yang tengah turun 3. Nilai penyertaan langsung yang sulit terjual sesuai harga buku
Pembelian aset Dapen di Surabaya	Rp 7,8 milyar	Telah masuk ke dalam rencana investasi RKAP 2024 dalam buku ini

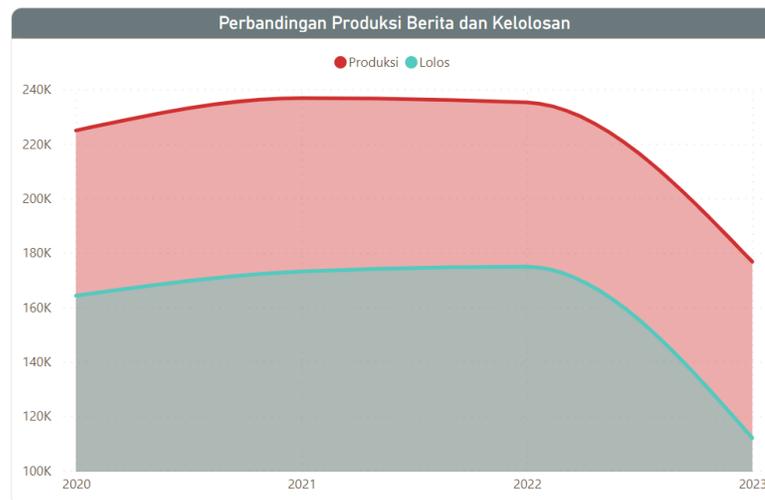
Terkait proses pengalihan program Dana Pensiun Manfaat Pasti menjadi Dana Pensiun Lembaga Keuangan, perusahaan telah mengesahkan dokumen roadmap yang menargetkan keseluruhan proses pengalihan selesai pada tahun 2025.

Secara umum, garis waktu yang penyelesaian aset-aset Dana Pensiun dapat digambarkan dalam tabel berikut:

2024	2025
<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan OJK terhadap rencana likuidasi Dana Pensiun Perum LKBN Antara 2. Penyelesaian atas aset-aset investasi yang mudah dicairkan (saham, reksadana, surat berharga negara, dan obligasi) 3. Valuasi aktuarial awal untuk menentukan hak sekaligus bagi masing-masing peserta 4. Pembayaran atas manfaat sekaligus bagi pensiunan sebesar Rp 95 milyar – ditargetkan dapat dibayarkan lunas dengan aset investasi Dapen 5. Pemilihan dan pemindahan DPLK bagi peserta aktif Dapen – pembayaran hak bagi para peserta aktif ini akan dicicil selama dua tahun sesuai dengan kinerja pelepasan aset dari tim likuidasi Dapen 6. Pembelian aset investasi tanah dan bangunan Dapen di Surabaya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian aset-aset investasi Dapen yang sulit terjual 2. Penyelesaian pembayaran manfaat sekaligus bagi peserta aktif 3. Persetujuan OJK terhadap penyelesaian Dapen 4. Pengumuman di berita negara

b. Pembatasan Produksi Berita PSO 120%

Kebijakan efisiensi strategis berikutnya, yang dicanangkan akan dilaksanakan secara penuh pada 2024 dan sudah mulai dilakukan pada dua bulan terakhir tahun 2023, adalah pembatasan produksi berita PSO. Selama tiga tahun terakhir, produksi berita PSO selalu berada di atas 130 persen. Berikut adalah data over produksi selama 2020 – 2023 (tahun 2023 adalah data produksi hingga September dan verifikasi kelolosan hingga bulan Agustus):



	2020		2021		2022		2023	
	Produksi	Lolos	Produksi	Lolos	Produksi	Lolos	Produksi	Lolos
	~225	~165	~235	~175	~235	~175	~180	~110

Foto Hardnews	13.381	10.855	13.261	12.071	12.913	11.521	9.649	8049
Infografis	97	66	103	82	147	113	141	45
Photo Stories	40	32	40	36	31	28	28	8
Podcast					16	11	10	8
Teks Feature	1.424	990	1.642	1.166	1.344	924	1.626	966
Teks Hardnews	132.634	100.093	127.451	98.197	129.040	97.082	138.790	97.176
Video Feature	39	25	36	27	45	33	30	9
Video Hardnews	8472	5.343	8.191	6.157	9.048	5.960	8.133	5.635

Tabel 3. 3 Tabel Produksi dan Lolos PSO

Overproduksi yang signifikan tersebut merupakan inefisiensi atas tenaga kerja wartawan Antara – karena berita yang diproduksi terbuang dan tidak terbayar – dan berdampak secara keuangan mengingat insentif kinerja yang diberlakukan perusahaan hingga saat ini adalah berdasarkan produksi – bukan tingkat kelulusan berita pewarta. Atas pertimbangan itulah perusahaan memutuskan untuk melakukan pembatasan produksi berita PSO pada 2024 dengan nilai maksimal 120% dari total kuota yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi.

3.1.3. Pemantapan Usaha Eksisting

Pilar strategi berikutnya adalah pemantapan usaha eksisting yang meliputi beberapa hal dimulainya monetasi aset di Pasar Baru dan Cisarua, peningkatan keterbacaan AntaraneWS, dan ekspansi bisnis IMCS di level Biro.

Dari sisi korporasi media, pada tahun 2024 Perum LKBN Antara melakukan revitalisasi perubahan perwajahan website antaranews.com sebagai kanal yang menyentuh langsung pada publik melalui "Jelajah Indonesia". Perubahan perwajahan website ini diharapkan dapat lebih meningkatkan value perusahaan. Meski demikian, Perum LKBN Antara juga tetap mempertahankan bisnis B2B melalui platform jejaring media BRANDA.

Pengembangan produk Layanan Media dan Komunikasi Terpadu (Integrated Media and Communications services/IMCS) pada tahun 2024 terus diupayakan untuk dikembangkan dari sisi perluasan bisnis melalui penyediaan solusi konsultasi media dan strategi komunikasi yang menjangkau seluruh korporasi, organisasi, perusahaan BUMN, Kementerian/Lembaga Tinggi Negara, serta Perusahaan swasta baik lokal maupun asing.

Strategi	Program Kerja Utama	Model bisnis	Sasaran
Pemantapan Usaha Eksisting	Monetasi aset Pasar Baru	Penyewaan ruang untuk tenant dan event	Penambahan pendapatan hingga Rp6 milyar
	Monetasi aset Cisarua	Menjadi lokasi pelatihan untuk korporasi	
	Peningkatan keterbacaan Antaranews	Launching Jelajah Indonesia dan pembaruan studio Antara TV	Peningkatan keterbacaan antaranews 33% menjadi 80 juta setahun
	Pemantapan IMCS	Perluasan IMCS ke level biro dan sektor swasta	Peningkatan pendapatan biro hingga 11% dibanding prognosa 2023, serta peningkatan pendapatan Divisi LMK yang membawahi IMCS hingga 10%

Pengembangan bisnis diharapkan dalam sasaran jangka panjang kritical Perum LKBN Antara untuk merealisasikan ketercapaian kemandirian keuangan yang diterjemahkan sebagai semakin mengecilnya kontribusi PSO dalam profil pendapatan perusahaan. Pada tahun 2024, Perum LKBN

Antara menargetkan kontribusi pendapatan komersial dan anak perusahaan sebesar 63 persen, sementara PSO hanya menyumbang 37 persen. (Prognosa 2023)

3.1.4. Ekspansi Teknologi dan Aset Tetap Penunjang Kinerja

Pada tahun 2024, perusahaan akan melakukan investasi dengan jumlah yang cukup signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya – dengan mengesampingkan pembelian dan pengembangan aset akibat penjualan Wisma Antara tahun 2022.



a. Pembuatan studio Antara TV

Salah satu agenda utama investasi pada 2024 adalah pembuatan studio untuk Antara TV yang akan dianggarkan dengan biaya sebesar Rp7,5 milyar. Melalui investasi ini, Antara TV diharapkan dapat dikembangkan menjadi berita video terdepan untuk kejadian-kejadian di berbagai tempat dan pelosok di Tanah Air. Antara TV diharapkan dapat menjadi salah satu berita video terdepan di Indonesia dan regional. Hal ini sejalan dengan hasil pertemuan antara Dewan Pengawas dengan Wakil Menteri Kominfo agar “produksi video feature juga bisa diproduksi secara proporsional. Berita dan feature video ini secara paralel dapat diintegrasikan di portal news.”

b. Pengadaan teknologi penunjang Jelajah Indonesia

Agenda investasi berikutnya adalah pengadaan teknologi penunjang untuk fitur Jelajah Indonesia. Fitur ini, selain akan meningkatkan jumlah pembaca antaranews juga akan menjadi bentuk kerjasama baru antara Direktorat Pemberitaan dengan Direktorat Komersil, Pengembangan Bisnis, dan IT.

Program Investasi	Jumlah	Output	Target terukur
Jelajah Indonesia	4,000,000,000	Perwajahan baru antaranews dan fitur interaktif baru	Kenaikan pembaca antaranews hingga 33% dari 2023
Nusantara Repository	2,000,000,000		
Pengembangan IT	2,000,000,000	Penguatan sistem IT untuk menghadapi serangan siber	Pengurangan kemungkinan terjadinya risiko berhentinya sistem pemberitaan dan keuangan pada masa pemilihan umum

c. Akuisi aset tetap tidak bergerak

Selain investasi untuk pembaruan alat kerja dan teknologi, Perum LKBN Antara juga berencana untuk mengakuisi dan mengembangkan sejumlah aset tetap tidak bergerak.

Pengembangan aset-aset tersebut diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi perusahaan untuk tahun-tahun ke depan.

Rincian dari rencana akuisisi dan pengembangan tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

Program Investasi	Jumlah	Output	Target terukur
Kelanjutan renovasi Pasar Baru	23,400,000,000	Ruang kerja bagi Direktorat Pemberitaan dan lokasi untuk bisnis MICE Antara	Tambahan pendapatan Rp6 milyar
Renovasi aset Cisarua	5,000,000,000	Ruang bisnis pelatihan bagi LPA	Belum ada untuk tahun 2024 karena diproyeksi selesai pada akhir tahun
Pembangunan kantor di Ibu Kota Indonesia baru	1,000,000,000	Akan menjadi kantor operasional perusahaan di ibu kota	Belum ditetapkan target karena belum selesai pada 2024

3.1.5. Pengembangan talenta inklusif dan perbaikan tata kelola

Untuk peningkatan produktivitas dan kualitas SDM, Perum LKBN Antara harus menyiapkan sumber daya manusia yang produktif, inovatif, dan berdaya saing global dengan tetap memiliki budaya AKHLAK, dan menjaga jati diri budaya bangsa. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan melalui pelatihan yang fokus pada pengembangan talenta digital, memberikan kesempatan kepada perempuan dan top talent muda (millennial) untuk mengisi jabatan di perusahaan serta hal-hal yang terkait dengan perkembangan teknologi terbaru.

Untuk menyiapkan perusahaan terhadap tantangan terhadap perkembangan teknologi dan target di atas, maka perusahaan perlu menyiapkan talenta-talenta digital yang melek teknologi. Untuk keperluan tersebut perusahaan telah menyiapkan master plan teknologi dan informasi, bukan saja untuk fungsi IT tetapi fungsi-fungsi lainnya dalam manajemen. Dikarenakan saat ini talenta Antara belum mumpuni untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang sudah lebih banyak dilaksanakan secara berdasarkan digital.

Selain menyiapkan talenta digital perusahaan juga menyiapkan sumber daya manusia yang inklusif untuk menciptakan ekosistem kerja yang dinamis dan agile. Dalam hal ini perusahaan telah mempunyai kebijakan berperilaku saling menghargai di tempat kerja (Respectful Workplace Policy/WRP) di lingkungan Perum LKBN Antara sesuai dengan SKEP Nomor: Per-008/DIR01.ANT/VIII/2022. Dalam peraturan ini, dijelaskan terkait menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan setara, menghargai keberagaman, bebas dari ujaran kebencian, diskriminasi, kekerasan dan pelecehan dapat memberikan efek positif bagi para insan Antara. Selain juga harapan dari KBUMN yang disampaikan melalui APS Penyusunan RKAP tahun 2024 untuk para Perusahaan BUMN untuk dapat mengimplementasikan RWP secara konsisten dan konsekuen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perum LKBN Antara juga mendesain dan menjalankan program-program yang mendukung perkembangan talenta, ketersediaan peraturan dan kebijakan yang mengatur terciptanya ekosistem kerja yang dinamis dan agile, dengan harapan dapat mendukung peningkatan pendapatan menuju Perusahaan yang mandiri.

Perum LKBN Antara senantiasa melakukan perbaikan sistem terus menerus dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan kualitas perusahaan. Penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik merupakan landasan bagi terbentuknya sistem, struktur dan budaya perusahaan yang fleksibel serta adaptif atas perubahan lingkungan bisnis yang kompetitif serta mampu membangun sistem pengendalian internal dan manajemen risiko yang handal serta menyempurnakan struktur organisasi.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik juga diyakini mampu memperkuat posisi daya saing Perusahaan secara berkesinambungan melalui program pengelolaan sumber daya, pelaksanaan audit, perbaikan penerapan roadmap manajemen risiko yang mengacu pada rekomendasi yang diperoleh dari hasil penilaian indeks kematangan risiko (risk maturity index) tahun 2023, penyusunan roadmap pemenuhan gap dari kesiapan perusahaan menghadapi transformasi Industri 4.0 di Indonesia berdasarkan hasil asesmen INDI 4.0, maupun pelaksanaan asesmen Good Corporate Governance (GCG) guna meningkatkan tata kelola perusahaan terus diupayakan dilakukan dengan menargetkan skor untuk asesmen ini lebih baik dari tahun sebelumnya, dengan pelaksanaan penyelesaian area pengembangan (areas of improvement/AOI) atas hasil asesmen sebelumnya.

Perusahaan berupaya maksimal melaksanakan kepatuhan pada tata kelola yang telah ditetapkan guna memastikan pengembangan berkelanjutan, menangani dampak risiko secara lebih efisien dan efektif yang dapat meningkatkan value perusahaan guna menambah kepercayaan terhadap pelanggan.

Dalam hubungannya dengan perbaikan dan pengembangan sistem, perusahaan juga telah mengatur mengenai pedoman pengelolaan inovasi, sebagai bentuk dukungan untuk menciptakan budaya inovasi di perusahaan melalui Surat Keputusan Nomor: 010/MO/DIR01.ANT/IX/2022 tentang Pedoman Tata Cara Penyampaian Inovasi (Manajemen Inovasi), dimana di dalam pedoman tersebut terdapat tatacara dan penyampaian agar Insan Antara dapat turut serta membangun Perum LKBN Antara menjadi lebih maju.

Program Kerja

Inisiatif strategis di atas akan diwujudkan dalam program kerja sebagai berikut:

Strategi	Program Kerja	PIC
Membangun literasi politik untuk menyukseskan agenda pemilu	Produksi berita anti-hoax	1. Direktorat Pemberitaan 2. Direktorat Komersil, Pengembangan Bisnis dan TI
	Pengelolaan ulang sosial media	
	Peningkatan kualitas berita PSO	
	Peningkatan <i>pageview</i>	
Efisiensi perusahaan di segala lini	Pengalihan peserta Dana Pensiun menjadi DPLK iuran pasti	1. Direktorat Utama 2. Direktorat Pemberitaan 3. Direktorat Keuangan dan MR
	Pembatasan produksi berita PSO hingga 120%	
	Pelaksanaan roadmap atas tindak lanjut Dana Pensiun	
Pemantapan usaha eksisting	Monetasi aset Perusahaan	1. Direktorat Utama 2. Direktorat Komersil, Pengembangan Bisnis dan TI 3. Direktorat Pemberitaan
	Pengembangan IMCS ke level biro	
	Peningkatan tingkat keterbacaan antaranews.com	
	Pengembangan Infrastruktur Aset Digital (Antara Media Sosial)	
	Penguatan digital marketing Perusahaan	
Ekspansi teknologi dan aset tetap penunjang kinerja	Teknologi	1. Direktorat Utama 2. Direktorat Komersil, Pengembangan Data dan TI 3. Direktorat Keuangan dan MR
	Pengembangan teknologi penunjang Jelajah Indonesia	
	Implementasi ERP di Perusahaan dengan cara mengintegrasikan Antara Virtual Office System (AVOS) dengan sistem digital perusahaan lain (customer relationship management, pengelolaan aset digital – SIMASET, dan e-procurement)	
	Digitalisasi sistem manajemen risiko	
	Implementasi, Penilaian dan laporan Progres Tindaklanjut maturitas TI sesuai roadmap	
	Implementasi pengurangan <i>gap</i> asesmen INDI 4.0	
	Pemenuhan permintaan BUMN terkait:	

Strategi	Program Kerja	PIC
	a. Dukungan pengembangan Portal Aset BUMN b. Pemenuhan kuantitas dan kualitas portal HC KBUMN dan Dashboard HCIS FHCI	
	Aset tetap	
	Pembelian aset Dana Pensiun di Surabaya	
	Penyelesaian pembangunan Kantor Biro Kaltara	
	Penyelesaian renovasi aset Cisarua	
	Pengadaan kendaraan bermotor listrik	
	Renovasi Kantor Biro	
	Ketersediaan alat pendukung listrik (genset) untuk Kantor Pusat	
Pengembangan talenta inklusif dan perbaikan tata kelola	Talenta	Direktorat Utama dan Direktorat Keuangan & MR
	Peningkatan kualitas talenta dengan: a. Implementasi Talent Management yang menyangkut: Talent Development, Career path, Job Grading dan Performance Management b. Implementasi <i>Respectful Workplace Policy</i> (RWP) secara konsisten c. Implementasi <i>Human Capital Maturity Assessment</i> d. Implementasi AKHLAK <i>Culture Journey</i> sesuai tahapan e. Implementasi digital talent berdasar kebutuhan pengembangan kompetensi digital SDM yang sesuai dengan Perusahaan	
	Implementasi program Perputaran Talenta (Talent Mobility) sesuai ketentuan yang berlaku	
	Implementasi program Blueprint Pemenuhan Amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	
	Menyediakan aplikasi e-learning untuk pengembangan talenta Internal Perusahaan	
	Pengembangan talenta internal untuk data analitik, program bidang pembelajaran dan pengembangan, riset, dan inovasi	
	Implementasi talent Management Center melalui ketersediaan assessment center untuk internal	
	Ketersediaan kebijakan untuk pengembangan talenta perusahaan: a. Penyusunan blue-print karyawan sesuai dengan program pemerintah (SKKNI) b. Pelaksanaan pelatihan sesuai dengan kebutuhan karyawan c. Ketersediaan jenjang karir dan penempatan insan Antara sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan perusahaan	
	Keikutsertaan talenta dalam program <i>digital talent</i> BUMN	
	Kepatuhan	
	Peningkatan Skor GCG	
	Penyelesaian PKB baru	
	Ketersediaan dan ketepatan penyampaian laporan keuangan sesuai standar BUMN yang diaudit menggunakan jasa Akuntan Publik terpercaya	
	Penilaian tingkat kesehatan perusahaan oleh lembaga pemeringkat	
	Penilaian indeks maturitas risiko oleh lembaga eksternal	
Implementasi Roadmap Perbaikan Penerapan Manajemen Risiko		

Tabel 3. 4 Strategi dan Program Kerja Antara 2024

4. Penugasan Pemerintah bidang Pers

Sasaran

Dalam rangka mengembangkan pendapat publik yang sehat, mendidik, mencerahkan, memberdayakan, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta membantu Pemerintah dalam meningkatkan citra positif Indonesia, Perum LKBN Antara mendapat penugasan Pemerintah c.q

Kementerian Komunikasi dan Informatika, untuk melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik/Public Service Obligation (PSO) untuk Informasi Publik Bidang Pers tahun Anggaran 2024.

PSO Untuk Informasi Publik Bidang Pers merupakan penugasan khusus Pemerintah kepada Perum LKBN Antara berupa penyampaian pelayanan informasi jenis tertentu melalui perencanaan, pembuatan, penyampaian, distribusi, dan atau penyebarluasan informasi kegiatan kenegaraan dan kemasyarakatan baik di tingkat Nasional, Daerah, maupun Internasional sesuai dengan konstruksi program bidang/tema dan kisi-kisi pemberitaan, serta agenda setting yang telah disepakati bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Produk PSO bidang pers merupakan semua jenis produk berita pers yang memenuhi kaidah jurnalistik dan mengandung unsur pendidikan, pencerahan, pemberdayaan, serta memperkuat rasa nasionalisme. Ruang lingkup penugasan PSO bidang pers ini mencakup: kuota produk, saluran distribusi, hak dan kewajiban, nilai perjanjian, cara pembayaran, pajak, sanksi, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pengawasan internal, keadaan memaksa, penyelesaian perselisihan, perubahan dan adendum, dan jangka waktu.

Berdasarkan pencapaian pada tahun-tahun sebelumnya, sasaran dan kuota produksi pemberitaan untuk penugasan pemerintah (berita PSO) adalah sebagai berikut:

Tahun Produk	Teks Hardnews	Teks Artikel	Berita Foto	Photo Story	TV Features	TV Hardnews	Infografis	Podcast
2024 (Rencana)	144.535	1.700	1.700	45	40	7500	150	15
2023 (Prognosa)	145.550	1.700	18.000	45	40	7.500	150	15
2022	145.190	1.500	18.000	40	45	7.500	150	15
2021	146.000	1.700	17.000	50	40	7.500	100	
2020	143.466	1.396	14.247	45	34	6.175	100	
2019	144.860	1.700	16.596	50	30	6.750	100	
2018	143.614	1.544	15.244	47	25	5.826	50	

Tabel 3. 5 Perkiraan Kuota Produksi Berita Penugasan Pemerintah Bidang Pers Tahun 2024

Selain itu, LKBN Antara juga akan melengkapi berita PSO dengan format baru yang terdiri dari;

- Anti Hoax* yang bertujuan untuk memerangi disinformasi dalam masyarakat. Produk ini akan masuk dalam kategori *text hardnews*.
- Fokus Berita* yang merupakan produk pemberitaan mendalam dan investigatif yang akan masuk dalam kategori *teks artikel*.
- Podcast* yang merupakan web based talkshow atau program TV yang menyerupai siaran radio, produksi ini akan dimasukkan ke dalam TV Features. Pada 2024, podcast merupakan produk yang didistribusikan melalui siaran radio.

Ruang Lingkup Pemberitaan PSO

Tema pemberitaan untuk penugasan pemerintah akan menyesuaikan dengan Program Prioritas Nasional 2024 yang terdiri dari:

- Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim
- Peningkatan kualitas SDM dalam kesehatan dan pendidikan
- Penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan decent job
- Mendorong pemulihan dunia usaha

- e. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas
- f. Ekonomi hijau
- g. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi

Produk dan Saluran Distribusi Berita PSO

Di tahun 2024, Produk PSO yang dipercayakan kepada Perum LKBN Antara serta saluran distribusi untuk menyalurkan produk tersebut, adalah sebagai berikut:

Produk	Saluran Distribusi
<ul style="list-style-type: none"> a. Teks <i>hardnews</i>, b. teks artikel, c. <i>anti hoax</i>, fokus berita / pempunan / spektrum, dan infografis 	<ul style="list-style-type: none"> a. Portal <i>antaranews.com</i> b. RRI c. Radio daerah d. Koran daerah e. Radio Komunitas f. Media luar ruang (<i>imedia/videotron</i>)
<ul style="list-style-type: none"> a. TV <i>features</i> b. TV <i>hardnews</i> 	<ul style="list-style-type: none"> a. TVRI nasional b. TVRI daerah c. TV swasta daerah
<ul style="list-style-type: none"> a. Berita foto b. <i>Photo story</i> 	<ul style="list-style-type: none"> a. Portal <i>antaranews.com</i> b. Media luar ruang (<i>imedia/videotron</i>) c. Pameran Hybrid
Podcast/ <i>Talkshow</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Portal <i>antaranews.com</i> b. Youtube c. Spotify d. Radio Lokal e. Radio Grup Kompas f. Radio RRI Perbatasan

Tabel 3. 6 Produk dan Saluran Distribusi Berita Penugasan Pemerintah

Hak dan Kewajiban

Pihak Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kominfo) berhak menetapkan konstruksi program, mengusulkan agenda setting, memperoleh produk PSO, memberikan tugas kepada LKBN Antara untuk bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memaksimalkan distribusi produk PSO, serta memberikan teguran jika terjadi penyimpangan.

Sementara itu, kewajiban Kominfo adalah merencanakan pelaksanaan PSO, memberikan kompensasi, melaksanakan verifikasi, dan melaksanakan monitoring dan evaluasi. Perum LKBN Antara berhak untuk menerima kompensasi atas pelaksanaan PSO berdasarkan hasil verifikasi. Selain itu, perusahaan juga berkewajiban untuk melaksanakan PSO bidang pers sesuai kesepakatan dan konstruksi program, melaksanakan agenda setting, melakukan kerja sama untuk distribusi, melakukan pendampingan saat verifikasi, membukukan anggaran PSO secara terpisah, membuat laporan pertanggung jawaban, mengembalikan kelebihan pembayaran kepada kas negara.

Nilai Perjanjian

Berdasarkan data tahun sebelumnya, nilai perjanjian penugasan PSO bidang pers untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tahun	Nilai kontrak	Realisasi
2024 (rencana)	176.35	176.35
2023 (prognosa)	172.77	172.77
2022	168.29	168.29
2021	166.16	166.16
2020	158.38	151.85
2019	159.07	156.13
2018	160.06	155.93

Tabel 3. 7 Nilai Kontrak dan Realisasi Penugasan PSO

Rencana Pemenuhan Produksi PSO 2024

Berikut adalah rencana pemenuhan produksi berita PSO untuk tahun 2024, per produk yang akan diajukan:

PRODUK	KUOTA 2024	REALISASI											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TEKS	144,535	11,347	12,273	12,665	11,326	12,659	11,552	11,830	12,924	13,314	13,858	13,858	6,929
ARTIKEL	1,700	110	97	117	109	131	137	126	140	139	238	238	119
FOTO	1,700	121	140	134	104	132	130	135	147	185	185	185	102
PHOTO STORY	45	2	3	3	4	3	5	4	4	7	5	4	1
INFOGRAFIS	150	18	17	11	12	14	12	14	16	10	10	10	5
TV HARDNEWS	7,500	774	700	748	657	749	635	670	637	615	527	526	262
FEATURES	40	4	3	3	1	4	7	4	3	5	4	2	-
PODCAST	15	3	1	2	1	1	1	1	1	4	-	-	-

Tabel 3.8 Rencana pemenuhan produksi berita PSO tahun 2024

Jangka Waktu

Jangka waktu perjanjian PSO bidang pers akan diperbaharui setiap satu tahun sekali.

Anggaran, Pendapatan, dan Biaya

Tabel berikut menjabarkan pendapatan dan biaya penugasan pemerintah untuk LKBN Antara:

(dalam juta rupiah)

URAIAN	Prognosa 2023 PSO	RKAP 2024 PSO
PENDAPATAN USAHA		
Pendapatan PSO	162,771	176,350
BEBAN POKOK USAHA		
Beban Pokok PSO	(53,830)	(60,102)
Gaji	(26,414)	(28,341)
Incentif	(3,865)	(3,973)
Tunjangan Tetap	(29,753)	(33,062)
Lembur	(8)	(7)
Outbound	(500)	(470)
Gaji - Outsource	(1,425)	(1,464)
Incentif - Outsource	(4)	(4)
Internet	(1,004)	(1,033)
Konsultan	(704)	(832)
Total Beban Pokok Usaha	(117,506)	(129,288)
Gross Margin	45,264	47,062
BEBAN PENJUALAN		
Buku	(68)	(71)
Promosi	(22)	(23)
Total Beban Penjualan	(91)	(93)
BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI		
Bonus	(6,410)	(6,590)
Thr	(4,508)	(4,734)
Asuransi	(1,477)	(1,517)
Pensiun	(4,339)	(8,651)
Penghargaan Karyawan	(239)	(246)
Pesangon	(32)	(33)
Pelatihan	(359)	(824)
Ibo	(126)	(129)
Rekrutasi	(29)	(29)
Promosi	(120)	(124)
Tunjangan Tidak Tetap	(7,602)	(7,843)
ATK	(178)	(183)
Listrik	(576)	(578)
Telepon	(35)	(36)
Sewa Gedung	(1,040)	(605)
Sewa Alat Kerja	(328)	(334)

URAIAN	Prognosa 2023 PSO	RKAP 2024 PSO
Perawatan Alat Kerja	(1,038)	(1,062)
Air	(60)	(61)
Rtk	(387)	(391)
Keanggotaan	(52)	(50)
Rapat	(1,137)	(1,157)
Kontribusi Lingkungan	(373)	(366)
Materai	(13)	(13)
Sppd Non Project	(2,670)	(2,837)
Transport	(1,358)	(1,998)
Depresiasi Prasarana	(1,525)	(1,567)
Biaya Penyusutan Aset Hak Guna	(523)	(537)
Beban Pph. Ps. 21	(334)	-
Beban Pph. Ps. 23	(1)	(1)
Beban PPN	(2)	(2)
Pajak Daerah Dan Pajak Lainnya	(183)	(188)
Total Beban Umum dan Administrasi	(37,053)	(42,686)
BEBAN DILUAR USAHA		
Pendapatan Bunga Bank	165	169
Pendapatan Lainnya	396	393
Pendapatan Bunga Deposito	75	77
(Pendapatan)/Biaya Selisih Kurs	(0)	57
Keuntungan Penjualan Aset	30	31
Administrasi Bank	(156)	(160)
Bunga Pinjaman	(476)	(490)
Beban Lainnya	(175)	(180)
Total Beban Diluar Usaha	(143)	(103)
LABA SEBELUM PAJAK	7,978	4,180
Beban Pph. Ps. 29	(1,054)	(547)
LABA SETELAH PAJAK	6,924	3,633

Tabel 3. 9 Anggaran Pendapatan dan Biaya Penugasan Pemerintah (PSO) Kepada Antara 2024

Gambaran PSO 2023

Sejak tahun 2016, prosentase pendapatan melalui penugasan pemerintah selalu berada di bawah pendapatan melalui usaha komersial. Penurunan ini selaras dengan tujuan perusahaan yang ingin meningkatkan kemandirian keuangan tanpa bergantung kepada pemerintah. Berikut adalah komposisi pendapatan Komersil dan Pendapatan PSO:



Gambar 3 Komposisi Pendapatan PSO dan Komersil

Selain keberhasilan menurunkan persentase pendapatan dari penugasan pemerintah, Perum LKBN Antara masih harus menjawab beberapa tantangan terkait pelaksanaan PSO bidang Pers.

Tantangan yang pertama adalah pelaksanaan tanggung jawab pembayaran biaya produksi berita yang selalu terlambat dari jadwal, mengingat proses penandatanganan keputusan Menkominfo atas penugasan PSO kepada LKBN Antara maupun perjanjian kerja sama atas pelaksanaan PSO tidak ditandatangani tepat waktu di awal tahun, tetapi lebih sering di atas triwulan satu. Hal ini mengakibatkan sulitnya perusahaan untuk menjaga arus kas agar tetap positif.

Terkait tantangan ini, manajemen Antara telah menetapkan dua strategi utama yaitu, melibatkan Kementerian BUMN untuk melakukan negosiasi perjanjian kerja sama dengan kementerian teknis (Kemkominfo) dan mengambil *standby loan* kepada bank BUMN. Keterlibatan Kementerian BUMN diharapkan dapat meningkatkan daya tawar perusahaan dalam memastikan ketepatan waktu pembayaran biaya produksi berita PSO, sementara *standby loan* berfungsi untuk menjaga arus kas demi keberlangsungan operasional perusahaan.

Di sisi lain, Perum LKBN Antara juga tengah mengusulkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk menyepakati perjanjian dengan jangka waktu lebih dari tahun. Perjanjian *multi-years* akan mengurangi risiko keuangan di LKBN Antara dan secara psikologis menyediakan rasa aman bagi para karyawan. Dengan model ini, perusahaan akan lebih fokus dalam melaksanakan tugas pemerintah di bidang pers – dan memenuhi semua syarat *service level agreement* – tanpa harus disibukkan oleh negosiasi berkepanjangan dengan kementerian teknis.

Sementara itu, tantangan yang kedua adalah risiko fundamental dialihkannya penugasan PSO bidang Pers kepada institusi media non-BUMN. Berbeda dengan penugasan pemerintah untuk beberapa sektor lain, tidak ada kewajiban dalam undang-undang yang mensyaratkan bahwa produksi berita PSO harus dijalankan oleh BUMN. Pihak manajemen sudah mensiasati risiko hilangnya pendapatan PSO ini dengan terus melakukan inovasi produk yang dapat meningkatkan pendapatan komersial – di antaranya adalah penyediaan layanan komunikasi strategis (IMCS dan layanan data keuangan)/

Tantangan yang terakhir adalah pemenuhan target produksi berita PSO pada masa pesta demokrasi. Sebagai alat Negara untuk mendidik, mencerahkan, memberdayakan publik melalui produksi berita dan distribusi konten multimedia dalam bingkai NKRI atau mengimplementasikan unsur 3N+1 (*educating, enlightening, empowering* dan *nationalism*). Untuk mengatasi tantangan tersebut, Perum LKBN Antara telah mengajukan usulan penyesuaian jumlah kuota sesuai dengan kemampuan maksimal para jurnalis dalam melakukan peliputan. Hal ini juga selaras dengan salah program Perusahaan pada tahun 2024, yaitu “Peningkatan Produksi Berita Cegah Hoax dalam tahun Pemilu”.

Usulan penyesuaian ini telah diajukan kepada kementerian teknis dengan dibantu oleh Kementerian BUMN.

Gambaran PSO 2024

Tahun 2024, Tema yang menjadi dasar untuk membuat berita PSO adalah ***Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi*** yang inklusif dan berkelanjutan.

1.1 Evaluasi Mandiri atas Tata Kelola Penugasan Kewajiban PSO

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan PSO yang telah dilakukan oleh Perum LKBN Antara, sejak tahun 2021 telah ditetapkan untuk dilakukan evaluasi mandiri (*self assessment*) setiap tahunnya atas tata kelola penugasan PSO.

Pada tahun 2023 ini, Perum LKBN Antara telah melakukan *self asesment* sebagai bentuk pertanggungjawaban atas rencana aksi yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Perum LKBN Antara Nomor 02/MOU/DJIKP/HK/04.02/04/2022 dan HK.08.00/45/DIR01.ANT/PKS/2022 tentang Teknis Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik (PSO) untuk Informasi Publik Bidang Pers Tahun Anggaran 2022 dan bentuk pertanggungjawaban atas rencana aksi pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Informasi Publik Bidang Pers Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Produk dan Konstruksi Program Kewajiban Pelayanan Publik untuk Informasi Publik Bidang Pers Tahun Anggaran 2022.

Ruang lingkup evaluasi secara mandiri meliputi aspek-aspek dalam rangkaian proses bisnis pelaksanaan PSO Bidang Pers oleh Perum LKBN Antara, mulai dari legalitas hingga monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

Tujuan evaluasi secara mandiri atas penerapan tata kelola penugasan PSO Bidang Pers adalah:

1. Mengukur kualitas penerapan tata kelola penugasan PSO Bidang Pers oleh Perum LKBN Antara melalui penilaian atau evaluasi berdasar kriteria pemenuhan target atas setiap komponen proses bisnis PSO Bidang Pers, dengan dengan pemberian skor atau nilai.
2. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan penerapan tata kelola penugasan PSO Bidang Pers oleh Perum LKBN Antara, serta mengusulkan rekomendasi perbaikan.
3. Memonitor konsistensi penerapan tata kelola penugasan PSO Bidang Pers oleh Perum LKBN Antara, dan memperoleh masukan untuk penyempurnaan dan pengembangan kebijakan tata kelola penugasan PSO Bidang Pers.

Evaluasi secara mandiri dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari. Pelaksanaan evaluasi secara mandiri dilakukan sebagai penerapan tata kelola penugasan PSO Bidang Pers ini yang merupakan bagian dari proses implementasi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) dan berkelanjutan di Perum LKBN Antara, sehingga hasil evaluasi secara mandiri ini sekaligus merupakan penilaian atas kemajuan pelaksanaan GCG perusahaan sampai saat ini.

Aspek pengujian dalam evaluasi secara mandiri atas penerapan tata kelola penugasan PSO Bidang Pers, meliputi:

1. Legalitas
2. Pemenuhan Produk PSO 2022
3. Pemenuhan Distribusi mencakup: (a) Kanal Distribusi, (b) Ketepatan waktu pelaksanaan
4. Pelaporan

5. Keuangan dan Perpajakan
6. Pengawasan Internal

Berdasarkan hasil evaluasi secara mandiri (*self assessment*) atas penerapan tata kelola penugasan PSO Bidang Pers oleh Perum LKBN Antara Tahun 2022, mencapai skor 100%, dengan pemberian bobot pada masing-masing indikator seperti tertera pada Tabel di bawah. Angka tersebut menunjukkan bahwa penerapan tata kelola penugasan PSO Bidang Pers oleh Perum LKBN Antara Tahun 2022, mencapai kualifikasi **SANGAT BAIK**.

Hasil evaluasi secara mandiri atas penerapan tata kelola penugasan PSO Bidang Pers oleh Perum LKBN Antara Tahun 2022 dapat dikhtisarkan sebagai berikut:

No	Indikator	Bobot	Skor (%)	Capaian
1	Legalitas	15	15.00	1.00
2	Pemenuhan Produksi PSO	20	20.00	1.00
3	Pemenuhan Distribusi PSO	20	20.00	1.00
4	Pelaporan	15	15.00	1.00
5	Keuangan dan Perpajakan	15	15.00	1.00
6	Pengawasan Internal	15	15.00	1.00
Skor Keseluruhan		100	100	
Kualifikasi Kualitas Penerapan GCG		Sangat Baik		

Tabel 3. 10 Hasil Evaluasi Mandiri Penerapan Tata Kelola PSO

Hasil evaluasi secara mandiri yang diuraikan untuk setiap aspek pengujian sebagai berikut:

1. Aspek Legalitas

Berdasarkan hasil evaluasi secara mandiri yang telah dilakukan pada aspek legalitas terhadap penerapan tata kelola penugasan PSO Bidang Pers, skor yang dicapai adalah 15 dari bobot sebesar 15 atau setara dengan prosentase pencapaian sebesar 100%. Angka tersebut berarti secara umum penerapan tata kelola penugasan PSO Bidang Pers, mencapai kualifikasi **SANGAT BAIK**.

Hal tersebut dapat diketahui dari beberapa praktik yang telah berjalan baik, yaitu:

- a. Penerbitan Buku Panduan PSO 2022
- b. Sosialisasi Produksi PSO di dewan redaksi pusat dan daerah
- c. Ketepatan Penandatanganan Kontrak Kerja Sama (PKS) pelaksanaan PSO 2022 pada 20 April 2022 atau lebih cepat dari target yakni Juni 2022

Sedangkan untuk Ketersediaan Landasan Hukum untuk Pelaksanaan PSO yakni Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI, diterbitkan pada Maret 2022, atau lebih awal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sekitar April atau Mei pada tahun berjalan. Ini menandakan ada komitmen bersama antar pemangku kepentingan yakni Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Perum LKBN Antara, agar Kepmen dapat diterbitkan di awal tahun atau maksimal pada bulan Maret tahun berjalan. Dengan begitu, seluruh kegiatan penugasan PSO Bidang Pers dapat berjalan optimal dan serapan anggaran maksimal.

2. Aspek Pemenuhan Produk PSO

Berdasar hasil evaluasi secara mandiri yang telah dilakukan pada aspek pemenuhan produk PSO 2022 terhadap penerapan tata kelola penugasan PSO Bidang Pers, skor yang dicapai adalah 20 dari bobot sebesar 20 atau setara dengan prosentase pencapaian sebesar 100%. Angka tersebut berarti secara umum penerapan tata kelola penugasan PSO Bidang Pers, mencapai kualifikasi **SANGAT BAIK**. Hal tersebut dapat diketahui dari beberapa praktik yang telah berjalan baik, yaitu:

- a. Produksi telah berjalan sejak awal tahun
- b. Tingkat ketidakkelolosan produk dalam proses verifikasi sekitar 5 (lima) persen
- c. Kualitas produk semakin baik, ditandai dengan tingkat kelolosan dalam proses verifikasi yang rata-rata mencapai 95-100 persen.

Tim produksi Perum LKBN Antara beberapa kali melakukan penyesuaian jumlah kuota produk yang dihasilkan per bulan, agar tidak terjadi ketimpangan jumlah kuota antar tema 1 (perekonomian, kemaritiman, dan investasi) tema 2 (politik, hukum dan keamanan) dan tema 3 (Pembangunan manusia dan kebudayaan).

3. Aspek Pemenuhan Distribusi PSO

Berdasarkan hasil evaluasi secara mandiri yang telah dilakukan pada aspek pemenuhan distribusi PSO terhadap penerapan tata kelola penugasan PSO Bidang Pers 2022, skor yang dicapai adalah 20 dari bobot sebesar 20 atau setara dengan prosentase pencapaian sebesar 100%. Angka tersebut berarti secara umum penerapan tata kelola penugasan PSO Bidang Pers, mencapai kualifikasi SANGAT BAIK.

Hal tersebut dapat diketahui dari beberapa praktik yang telah berjalan baik, yaitu:

- a. Jumlah produk yang didistribusikan atau diseminasi sesuai target
- b. Jumlah kanal distribusi yang digunakan, sesuai target

Meski demikian ada 2 (dua) hal yang perlu mendapat perhatian, yakni:

1. Penerapan Undang-Undang Nomor 7/2001 tentang Harmonisasi Pajak yang menetapkan jasa penyiaran non komersial dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) 11%, mengakibatkan penyesuaian volume distribusi di beberapa kanal seperti media cetak daerah yang dinilai mitra sebagai hal yang inkonsisten. Semisal semula terbit 2(dua) kali sebulan menjadi 1(satu) kali terbit per bulan. Hal itu berpengaruh terhadap antusiasme pembaca.
2. Kanal distribusi 2(dua) TV Swasta daerah untuk distribusi video hardnews dan video feature, yang mengalami kendala siaran dan SDM, sehingga tidak dapat melanjutkan Kerjasama. Namun keberadaannya dapat digantikan stasiun TV swasta daerah lain, di provinsi yang sama yaitu Kalimantan Timur.
3. Beberapa stasiun TV swasta tidak sesuai awal waktu Kerjasama yang disepakati, yakni per akhir April pada tahun berjalan, karena kendala manajerial dan teknis penyiaran.
4. Beberapa portal berita daerah yang tidak menyorakan NKRI atau tidak jelas komitmen kerjasamanya.

4. Aspek Pelaporan

Berdasarkan hasil evaluasi secara mandiri yang telah dilakukan pada aspek pelaporan PSO terhadap penerapan tata Kelola penugasan PSO Bidang Pers 2022, skor yang dicapai adalah 15 dari bobot sebesar 15 atau setara dengan prosentase pencapaian sebesar 100%. Angka tersebut berarti secara umum penerapan tata Kelola penugasan PSO Bidang Pers aspek pelaporan PSO, mencapai kualifikasi SANGAT BAIK.

Hal tersebut dapat diketahui dari beberapa praktik yang berjalan kurang baik, yaitu:

- a. Pelaporan bulanan berjalan sesuai tercantum dalam PKS Teknis pelaksanaan PSO Bidang Pers yang disepakati Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo dan Direktur Utama Perum LKBN Antara.
- b. Laporan tahunan PSO 2022 yang diterbitkan lebih awal yakni pertengahan Januari 2023.

Meski demikian ada beberapa hal yang telah dijalankan dengan baik yakni Laporan Tahunan dan ketepatan proses pencairan.

5. Aspek Keuangan dan Perpajakan

Berdasarkan hasil evaluasi secara mandiri yang telah dilakukan pada aspek keuangan dan perpajakan PSO terhadap penerapan tata kelola penugasan PSO Bidang Pers 2022, skor yang dicapai adalah 15 dari bobot sebesar 15 atau setara dengan prosentase pencapaian sebesar 100%. Angka tersebut berarti secara umum penerapan tata kelola penugasan PSO Bidang Pers, pada aspek keuangan dan perpajakan PSO, mencapai kualifikasi SANGAT BAIK.

Hal tersebut dapat diketahui dari beberapa praktik yang berjalan baik, yaitu:

- a. Proses penagihan atas pencairan PSO yang sesuai kerangka waktu
- b. Ketersediaan bukti potong PPh 23

6. Aspek Pengawasan Internal

Berdasarkan hasil evaluasi secara mandiri yang telah dilakukan pada aspek pengawasan internal PSO terhadap penerapan tata kelola penugasan PSO Bidang Pers 2022, skor yang dicapai adalah 15 dari bobot sebesar 15 atau setara dengan prosentase pencapaian sebesar 100%. Angka tersebut berarti secara umum penerapan tata kelola penugasan PSO Bidang Pers pada aspek pengawasan internal PSO, mencapai kualifikasi SANGAT BAIK.

Hal ini ditandai dengan kegiatan monitoring dan evaluasi yang berjalan dalam pelaksanaan PSO 2022 yaitu:

- a. Kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) baik secara on desk maupun on site di internal Perum LKBN Antara.
- b. Kegiatan monitoring dan evaluasi secara on site bersama tim monev Kementerian Kominfo di biro Antara dan mitra distribusi di 5 (lima) provinsi yakni Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara dan Maluku.
- c. Keberadaan Laporan Monev PSO 2022.

Berdasarkan hasil *self assesment* di atas dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Legalitas

- a. Kesamaan paham bahwa penerbitan legalitas penugasan PSO Bidang Pers lebih awal pada setiap tahun berjalan, akan mendorong proses bisnis pelaksanaan PSO Bidang Pers lebih efektif dan efisien mulai dari perencanaan hingga monitoring dan evaluasi. Sehingga penugasan PSO Bidang Pers oleh Perum LKBN ANTARA dapat dilaksanakan paling lambat Maret pada tahun berjalan.
- b. Sosialisasi/konfirmasi terkait perpajakan dapat disampaikan lebih awal sehingga pelaksanaan PSO Bidang Pers dapat dijalankan sesuai ketentuan lebih awal terutama yang menyangkut distribusi.

2. Pemenuhan Produksi PSO

- a. Koordinasi intensif antarpemangku kepentingan, agar pembentukan tim agenda setting dan tim verifikasi dapat menyesuaikan penerbitan Kepmen penugasan dan PKS Teknis Pelaksanaan Penugasan PSO Bidang Pers.
- b. Kegiatan produksi yang telah dilakukan sejak awal tahun, dapat didukung optimal dengan Keputusan Menteri Kominfo yang lebih awal diterbitkan, beserta tim Agenda Setting yang ditetapkan di awal tahun, sehingga penyesuaian kuota per tema dan bidang tidak menumpuk di pertengahan hingga akhir tahun.

3. Pemenuhan Distribusi PSO

- a. Sosialisasi/konfirmasi lebih awal antarpemangku kepentingan terkait pelaksanaan PSO Bidang Pers, terutama menyangkut perpajakan, yakni Kemenkeu, Kemenkominfo, KemenBUMN dan Perum LKBN Antara.
- b. Koordinasi intensif antarpemangku kepentingan, terkait penerbitan Kepmen penugasan dan PKS Teknis Pelaksanaan Penugasan PSO Bidang Pers, agar dapat diterbitkan lebih awal di TW I.
- c. Pemilihan mitra distribusi yang lebih selektif disertai surat pernyataan kepada mitra untuk menyelesaikan penugasan diseminasi PSO sesuai kerangka waktu yang ditetapkan bersama antara Kemenkominfo, Perum LKBN Antara dan media mitra distribusi, yakni maksimal 1 (satu) tahun.
- d. Perlu kerja sama dengan asosiasi media siber/asosiasi portal berita online guna mengantisipasi portal berita daerah yang tidak menyuarakan NKRI, abal-abal dan lainnya.

4. Pengawasan Internal

- a. Perlu ditetapkan kerangka waktu yang jelas untuk kegiatan monev internal.
- b. Perlu indikator yang jelas tentang capaian produksi dan distribusi PSO, sehingga memiliki standar/ukuran yang sama, untuk digunakan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan.
- c. PSO Bidang Pers
Bukti tayang, baik media cetak maupun media elektronik dapat disampaikan dalam bentuk digital, melalui 1 (satu) sistem pusat data yang dapat diakses setiap saat oleh tim Kementerian Kominfo dan Perum LKBN ANTARA, sehingga lebih efektif dan efisien.

5. Mekanisme Tindak Lanjut

Adanya mekanisme bersama antara Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Kominfo, dan Perum LKBN ANTARA untuk menindaklanjuti hasil evaluasi Inspektorat Kominfo, terkait pelaksanaan penugasan PSO Bidang Pers kepada Perum LKBN ANTARA.

BAB IV ANGGARAN PERUSAHAAN

1. Gambaran Umum Laba/Rugi Usaha

Catatan terpenting pada kinerja laba rugi perusahaan pada tahun 2024 adalah kenaikan beban administrasi dan umum yang cukup signifikan (23,6%) dibandingkan dengan prognosa tahun ini. Kenaikan tersebut berdampak pada kinerja laba perusahaan yang juga diperkirakan akan turun sebesar 46.62 %.

Turunnya laba pada tahun 2024 dan kenaikan pada beban administrasi dan umum terjadi karena aksi korporasi pemindahan peserta Dana Pensiun Perum LKBN Antara ke DPLK iuran pasti yang akan memakan biaya sekitar Rp 34 miliar (yang sudah dijelaskan pada bab terkait Dana Pensiun)

(Dalam juta rupiah)

Item	2022	2023	2024	RKAP 2024
	Audited	Prognosa	RKAP	Growth
PENDAPATAN USAHA	399,187	448,932	481,324	7.22%
BEBAN POKOK USAHA	278,676	312,586	331,415	6.02%
LABA BRUTO	120,511	136,346	149,909	9.95%
Beban Penjualan	482	292	1,200	311.37%
Beban Administrasi dan Umum	105,699	106,429	131,582	23.63%
Penghasilan (Beban) Lain-lain Bersih	125,533	(961)	(1,568)	63.24%
LABA SEBELUM PAJAK	139,862	28,665	15,558	-45.73%
Beban Pajak Penghasilan	5,662	5,930	3,423	-42.28%
LABA TAHUN BERJALAN	134,200	22,734	12,135	-46.62%

Tabel 4. 1 Gambaran Umum Laba/ Rugi Usaha

2. Anggaran Pendapatan Usaha

Sub-bab ini merupakan gambaran terhadap target pendapatan untuk setiap unit usaha *profit center* perusahaan. Pada tahun 2024, PSO dan layanan data (KSO Bloomberg) masih menjadi kontributor utama pendapatan Perum LKBN Antara dengan prosentase lebih dari 70%. Sementara itu, pendapatan dari Departemen Layanan Komunikasi Strategis terlihat mengalami kenaikan signifikan sebesar 163% karena terjadinya penggabungan dengan Departemen Layanan Media dan Distribusi.

Di sisi lain, perluasan model bisnis IMCS ke level biro juga diasumsikan akan membuat pendapatan di biro-biro naik 16 – 17 %.

(dalam juta rupiah)

Item	2022	2023	2024	RKAP 2024
	Audited	Prognosa	RKAP	Growth
Pendapatan PSO	151,616	162,771	176,350	8.34%
Pendapatan Komersil	246,037	271,161	288,918	6.55%
Pendapatan ETP	1,534	15,000	16,056	7.04%
Total	399,187	448,932	481,324	7.22%

Tabel 4. 2 Anggaran pendapatan 2024

(dalam juta rupiah)

No	ITEM	2022	2023	2024	RKAP 2024
		Audited	Prognosa	RKAP	Growth
A. Koordinator PSO					
1	Koordinator PSO	151,616	162,771	176,350	8.34%
B. Komersil					
1	Dept. Kejasama Operasi Bloomberg	148,893	155,498	160,163	3.00%
2	Dept. Layanan Komunikasi Strategis	29,368	35,365	43,717	23.61%
3	Dept. Kerjasama Dan Konten	30,026	30,538	40,447	32.45%
4	Dept. Kerjasama Operasi Reuters	15,311	14,496	15,366	6.00%
5	Dept. Lembaga Pendidikan Antara	822	1,891	3,180	68.16%
6	Dept. Data Dan Informasi Finansial	1,954	2,454	2,672	8.88%
7	Divisi Antara Digital Media	-	10,943	-	-100.00%
8	Biro Jawa Timur	2,028	2,967	3,472	17.00%
9	Biro Kalimantan Tengah	2,689	2,636	3,084	17.01%
10	Biro Kalimantan Selatan	1,952	1,913	2,238	17.01%
11	Biro Jawa Barat	1,241	1,217	1,424	17.01%
12	Biro Jawa Tengah	914	896	1,048	17.00%
13	Biro Sumatera Utara	896	878	1,027	17.00%
14	Biro Penyangga Jakarta	1,190	677	792	17.00%
15	Biro Riau	645	632	740	17.01%
16	Biro Bangka Belitung	628	616	720	17.01%
17	Biro Kalimantan Timur	608	595	697	17.01%
18	Biro Nusa Tenggara Barat	537	546	639	17.01%
19	Biro Sumatera Barat	543	532	623	17.01%
20	Biro Nangroe Aceh Darusalam	832	521	610	17.01%
21	Biro Papua	491	481	563	17.02%
22	Biro Kalimantan Barat	478	469	549	17.01%
23	Biro Bali	457	448	524	17.00%
24	Biro Sumatera Selatan	438	429	502	17.00%
25	Biro Jambi	430	422	493	17.00%
26	Biro Lampung	405	397	464	17.00%
27	Biro Banten	334	328	383	17.00%
28	Biro Sulawesi Selatan	310	303	355	17.00%
29	Biro Sulawesi Tengah	257	252	294	17.02%
30	Biro Kepulauan Riau	179	244	286	17.01%
31	Biro Sulawesi Tenggara	178	243	285	17.01%
32	Biro Maluku	205	201	235	16.99%
33	Biro Kalimantan Utara	194	190	222	17.01%
34	Biro Nusa Tenggara Timur	190	187	218	16.98%
35	Biro Gorontalo	180	176	206	17.02%
36	Biro Bengkulu	25	171	200	16.98%
37	Biro Sulawesi Utara	55	152	178	17.01%
38	Biro Yogyakarta	105	133	155	17.04%
39	Biro Papua Barat	45	113	132	16.97%
40	Biro Luar Negeri	-	10	12	17.54%
41	Biro Maluku Utara	1	1	2	17.79%
C. Anak Perusahaan					
1	PT AETP	1,534	15,000	16,056	7.04%
	TOTAL	399,187	448,932	481,324	7.22%

Tabel 4. 3 Rincian Anggaran Pendapatan 2024

3. Anggaran Biaya Usaha

(dalam juta rupiah)

No	Nama Unit	Audited 2022	2023 (Prognosa)	RKAP 2024	%
1	Divisi Layanan Data	427	461	962	108.67%
2	Dept. KSO Bloomberg	103,478	92,672	102,994	11.14%
3	Dept. KSO Reuters	7,423	8,779	7,787	-11.30%
4	Dept. Analisa dan Informasi	2,236	2,623	3,026	15.34%
5	Divisi Layanan Media dan Komunikasi	1,915	1,405	817	-41.82%
6	Dept. Kerjasama Konten	5,458	7,192	9,290	29.18%
7	Dept. Layanan Komunikasi Strategis	15,765	13,309	15,733	18.21%
8	Dept. Lembaga Pendidikan Antara	1,577	2,140	2,996	39.96%
9	Dept. Auditorium Adhiyana	1,562	66	-	-100.00%
10	Divisi Antara Digital Media	26,304	12,504	-	-100.00%
11	Dept. Pendukung Bisnis	-	-	884	100.00%
12	Direktorat Pemberitaan	99,812	57,772	48,241	-16.50%
13	Koordinator Biro dan PSO	2,916	35,557	50,937	43.25%
14	Kurator	540	704	751	6.58%
15	Direksi	11,243	15,815	11,447	-27.62%
16	Dewan Pengawas	3,251	4,408	4,743	7.61%
17	Komite Audit	470	593	673	13.60%
18	Sekretariat Perusahaan	1,462	3,186	2,785	-12.57%
19	Dept. Hukum dan Administrasi	999	1,244	1,418	14.02%
20	Dept. TJSI dan Komunikasi Perusahaan	1,554	1,963	2,130	8.52%
21	Divisi Manajemen Strategis	767	490	4,355	789.10%
22	Dept. Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja	435	579	559	-3.36%
23	Dept. Pengelolaan Data dan Inovasi	1,043	1,493	1,393	-6.67%
24	Dept. Manajemen Risiko	-	-	522	100.00%
25	Divisi Teknologi Informasi	940	624	636	2.05%
26	Dept. Perencanaan dan Tata Kelola TI	-	-	724	100.00%
27	Dept. Operasional TI	3,291	4,846	5,034	3.88%
28	Dept. Pengembangan TI	872	1,082	1,181	9.18%
29	Dept. Teknik Umum	4,269	2,646	-	-100.00%
30	Divisi MSDM	1,767	2,136	2,038	-4.61%
31	Dept. Manajemen SDM	21,782	44,930	57,484	27.94%
32	Dept. Pengembangan SDM	3,382	2,236	4,591	105.29%
33	Divisi Umum dan Aset	-	-	656	100.00%
34	Dept. Umum	18,050	19,890	21,097	6.07%
35	Dept. Pengadaan dan Manajemen Aset	-	-	1,252	100.00%
36	Divisi Keuangan	627	587	515	-12.26%
37	Dept. Anggaran, Akuntansi dan Pelaporan	(9,758)	9,596	23,616	146.11%
38	Dept. Treasury, Piutang dan Perpajakan	1,153	1,440	1,500	4.17%
39	Satuan Pengawasan Internal	354	548	631	15.04%
40	Dept. Audit Keuangan dan Operasional	352	299	360	20.69%

No	Nama Unit	Audited 2022	2023 (Prognosa)	RKAP 2024	%
41	Dept. GCG Dan Penugasan Khusus	681	708	679	-4.18%
42	Biro Jawa Timur	4,199	5,200	5,763	10.84%
43	Biro Jawa Tengah	3,366	3,677	4,065	10.57%
44	Biro Kalimantan Tengah	2,186	2,809	3,131	11.46%
45	Biro Jawa Barat	2,196	2,645	2,927	10.67%
46	Biro Kalimantan Selatan	1,917	2,329	2,755	18.29%
47	Biro Sumatera Utara	1,659	1,967	2,213	12.49%
48	Biro Sulawesi Selatan	1,622	1,893	2,149	13.57%
49	Biro Sumatera Barat	1,825	1,804	2,011	11.45%
50	Biro Penyangga Jakarta	1,623	1,529	1,684	10.14%
51	Biro Bali	1,367	1,525	1,613	5.80%
52	Biro Banten	1,194	1,404	1,581	12.63%
53	Biro Yogyakarta	1,487	1,458	1,548	6.15%
54	Biro Nusa Tenggara Barat	1,326	1,416	1,494	5.52%
55	Biro Riau	1,004	1,281	1,472	14.97%
56	Biro Papua	1,161	1,340	1,452	8.30%
57	Biro Nangroe Aceh Darusalam	1,423	1,302	1,388	6.56%
58	Biro Lampung	1,339	1,340	1,386	3.45%
59	Biro Bangka Belitung	1,080	1,252	1,364	8.89%
60	Biro Kalimantan Timur	944	1,214	1,275	4.97%
61	Biro Luar Negeri	1,777	1,272	1,230	-3.28%
62	Biro Sumatera Selatan	1,086	1,109	1,216	9.59%
63	Biro Kalimantan Barat	1,353	1,192	1,200	0.73%
64	Biro Jambi	998	1,021	1,077	5.41%
65	Biro Sulawesi Tenggara	789	964	1,050	8.93%
66	Biro Nusa Tenggara Timur	779	932	1,010	8.38%
67	Biro Sulawesi Utara	694	913	993	8.79%
68	Biro Kepulauan Riau	714	847	922	8.88%
69	Biro Bengkulu	526	795	895	12.54%
70	Biro Maluku	775	813	865	6.40%
71	Biro Sulawesi Tengah	701	767	864	12.58%
72	Biro Kalimantan Utara	602	749	819	9.35%
73	Biro Gorontalo	742	668	713	6.66%
74	Biro Papua Barat	468	613	698	13.72%
75	Biro Maluku Utara	193	207	210	1.55%
76	PT AETP	1,345	13,377	12,845	-3.98%
	TOTAL	384,857	420,148	464,316	10.51%

Tabel 4. 4 Anggaran biaya usaha 2024

4. Anggaran Pendapatan dan Biaya Lainnya

(dalam juta rupiah)

ITEM	2022	2023	2024	RKAP 2024
	Audited	Prognosa	RKAP	Growth
Pendapatan Bunga Bank	804	618	677	9.51%
Pendapatan Lainnya	147.878	3.006	4.604	53.14%
Bagian Laba (Rugi) Bersih Anak Perusahaan	139.950	-	-	0.00%
Pendapatan Bunga Deposito	728	375	554	47.59%
(Pendapatan)/Biaya Selisih Kurs	215	88	202	130.33%
Keuntungan Penjualan Aset	1.543	-	112	100.00%
Pendapatan Cadangan Pemulihan Piutang	1.406	-	-	0.00%
TOTAL	292.524	4.087	6.148	50.41%

Tabel 4. 5 Anggaran Pendapatan Lainnya 2024

(dalam juta rupiah)

ITEM	2022	2023	2024	RKAP 2024
	Audited	Prognosa	RKAP	Growth
Administrasi Bank	548	780	801	2.79%
Bunga Pinjaman	1,322	2,382	2,449	2.80%
Beban Lainnya	2,777	875	1,666	90.50%
Beban Bunga Psak 73	135	-	-	0.00%
TOTAL	4,782	4,036	4,916	21.80%

Tabel 4. 6 Anggaran Biaya Lainnya 2024

5. Anggaran Investasi dan Pengembangan

Rencana investasi perusahaan pada tahun 2024 telah dijelaskan pada bab tentang strategi,

(dalam juta rupiah)

No	Uraian	Prognosa 2023
1	Pembangunan kompleks ANTARA Pasar Baru	52,500
2	Renovasi Wisma ANTARA-B (Ex-PANN)	27,620
3	Pengadaan Meubelair di Wisma ANTARA-B	791
4	Renovasi Bangunan & Prasarana Biro lainnya	260
5	Peralatan kantor	4,000
6	Pembelian Tanah dan Bangunan PNRI	4,493
	TOTAL	89,664

Tabel 4. 7 Prognosa investasi tahun 2023

Ketidaktercapaian CAPEX pada tahun 2023 disebabkan oleh:

- 1) Baru diterimanya perizinan dalam melakukan renovasi Komplek Antara Pasar Baru, sehingga realisasi renovasi Komplek Antara Pasar Baru pada Desember 2023 baru mencapai 70% dan diperkirakan akan selesai pada April 2024.
- 2) Renovasi aset Cisarua belum dapat dilakukan dikarenakan baru dilakukan AJB pada 27 Juli 2023.

- 3) Pembelian aset tanah dan bangunan milik PNRI di Ambon belum dapat direalisasikan karena terdapat kenaikan NJOP yang signifikan.
- 4) Aset tanah atas hibah di Kaltara pada 2023 baru dilakukan *land clearing*.
- 5) Kendaraan belum dilakukan realisasi dikarenakan belum tersedianya tempat untuk parkir kendaraan, Pada 2024 baru akan dilakukan renovasi atas kantin dan parkir di Wisma Antara B.

(dalam juta rupiah)

No	Uraian	RKAP 2024
1	Kelanjutan pembangunan kompleks ANTARA Pasar Baru	23,400
2	Pembelian Aset (Tanah & Bangunan)	7,670
3	Penyediaan studio TV Pasar Baru	7,500
4	Renovasi area parkir dan kantin Wisma Antara B	2,000
5	Kelanjutan renovasi asset (ex-Gedung PNRI)	5,000
6	Tindak lanjut Pembangunan kantor di Kalimantan Utara	1,000
7	Renovasi bangunan & prasarana Biro lainnya	1,000
8	Dukungan kelistrikan	1,000
9	Peralatan kantor	3,000
10	Investasi untuk pengembangan TI	8,000
11	Investasi untu pengembangan anak usaha (Antara ETP)	3,000
	TOTAL	62,570

Tabel 4. 8 Rencana Investasi dan Pengembangan 2024

6. Anggaran Sumber Daya Manusia

(dalam juta rupiah)

No	Nama Akun	Audited 2022	2023 (Prognosa)	RKAP 2024	%
1	Gaji	35,860	43,493	42,686	-1.86%
2	Incentif	5,760	6,208	6,351	2.29%
3	Bonus	8,055	7,673	7,801	1.67%
4	Tantiem	1,740	1,830	1,920	4.92%
5	Thr	6,918	6,979	7,240	3.74%
6	Tunjangan Tetap	16,790	44,235	48,857	10.45%
7	Asuransi	7,531	7,401	7,585	2.49%
8	Lembur	115	61	56	-8.27%
9	Pensiun	11,668	21,693	41,256	90.18%
10	Penghargaan Karyawan	1,869	1,196	1,230	2.80%
11	Pesangon	99	159	163	2.79%
12	Pelatihan	1,752	1,622	3,938	142.75%
13	Outbound	432	2,072	1,670	-19.40%
14	Ibo	407	630	647	2.80%
15	Rekrutasi	152	143	147	2.79%
16	Promosi	348	601	618	2.80%
17	Tunjangan Tidak Tetap	25,003	12,436	12,792	2.86%
	TOTAL	124,498	158,432	184,955	16.74%

Tabel 4. 9 Anggaran Sumber Daya Manusia 2024

7. Anggaran Teknologi Informasi

(dalam juta rupiah)

No	Uraian	RKAP 2024
1	Aplikasi dan server	8,000
	TOTAL	8,000

Tabel 4. 10 Anggaran Teknologi Informasi 2024

8. Anggaran Penelitian dan Pengembangan

(dalam juta rupiah)

No	Uraian	Audited 2022	2023 (Prognosa)	RKAP 2024	%
1	18 komponen Biaya SDM	124,498	158,432	184,955	16.74%
2	18 komponen Biaya SDM dikurangi Pelatihan, Outbound dan IBO	121,907	154,108	178,700	15.96%
3	Biaya RnD	2,591	4,324	6,255	44.66%
4	% Biaya RnD	2,13%	2,81%	3,50%	24.75%
5	Rincian Biaya RnD				
	a, Biaya Pelatihan	1,752	1,622	3,938	142.75%
	b, Biaya Outbound	432	2,072	1,670	-19.40%
	c, Biaya IBO	407	630	647	2.80%
	Jumlah Biaya RnD	2,591	4,324	6,255	44.66%

Tabel 4. 11 Anggaran Penelitian dan Pengembangan 2024

9. Rencana Pemenuhan TKDN

(dalam juta rupiah)

Uraian	RKAP 2024			%
	TKDN	Non TKDN	Jumlah	
PENDAPATAN				
Pendapatan PSO	79,358	96,993	176,350	45%
Pendapatan Komersil	130,013	158,905	288,918	45%
Pendapatan AETP	7,225	8,831	16,056	45%
Total Pendapatan	216,596	264,728	481,324	45%
BEBAN POKOK				
Beban Pokok PSO	27,046	33,056	60,102	45%
Beban Pokok Komersil	64,471	78,798	143,270	45%
Beban Pokok AETP	5,612	6,859	12,470	45%
Gaji	19,209	23,477	42,686	45%
Insentif	2,858	3,493	6,351	45%
Tunjangan Tetap	21,986	26,871	48,857	45%
Lembur	25	31	56	45%
Outbound	752	919	1,670	45%

Uraian	RKAP 2024			%
	TKDN	Non TKDN	Jumlah	
Gaji - Outsource	3,295	4,027	7,322	45%
Incentif - Outsource	3	3	6	45%
Internet	1,921	2,348	4,269	45%
Konsultan	1,961	2,396	4,357	45%
Total Beban Pokok	149,137	182,278	331,415	45%
Gross Margin	67,459	82,450	149,909	45%
BEBAN PEMASARAN				
Promosi	540	660	1,200	45%
Total Beban Pemasaran	540	660	1,200	45%
BEBAN UMUM ADMINISTRASI				
Bonus	4,374	5,346	9,721	45%
THR	3,258	3,982	7,240	45%
Asuransi	3,413	4,172	7,585	45%
Pensiun	18,565	22,691	41,256	45%
Penghargaan Karyawan	553	676	1,230	45%
Pesangon	73	90	163	45%
Pelatihan	1,772	2,166	3,938	45%
Ibo	291	356	647	45%
Rekrutasi	66	81	147	45%
Promosi	278	340	618	45%
Tunjangan Tidak Tetap	5,756	7,035	12,792	45%
ATK	268	327	595	45%
Listrik	580	709	1,289	45%
Telepon	39	48	86	45%
Sewa Gedung	742	907	1,650	45%
Sewa Alat Kerja	1,101	1,346	2,448	45%
Perawatan Alat Kerja	1,277	1,561	2,838	45%
Air	60	74	134	45%
RTK	590	721	1,310	45%
Keanggotaan	93	114	208	45%
Rapat	1,032	1,261	2,293	45%
Kontribusi Lingkungan	576	704	1,280	45%
Materai	16	20	36	45%
Sppd Non Project	2,042	2,496	4,538	45%
Transport	2,942	3,596	6,539	45%
Depresiasi Prasarana	5,128	6,268	11,396	45%
Biaya Penyusutan Aset Hak Guna	1,209	1,477	2,686	45%
Bad Debt Pendapatan	2,959	3,617	6,576	45%
Beban Pph. Ps. 23	1	2	3	45%

Uraian	RKAP 2024			%
	TKDN	Non TKDN	Jumlah	
Beban Ppn	4	5	9	45%
Pajak Daerah Dan Pajak Lainnya	149	182	331	45%
Total Beban Umum & Administrasi	59,212	72,370	131,582	45%
PENDAPATAN (BEBAN) LAINNYA				
PENDAPATAN LAIN-LAIN				
Pendapatan Bunga Bank	381	466	847	45%
Pendapatan Lainnya	883	1,080	1,963	45%
Pendapatan Bunga Deposito	173	212	385	45%
Keuntungan Penjualan Aset	69	84	153	45%
Total Pendapatan Lain-Lain	1,507	1,841	3,348	45%
BEBAN LAIN-LAIN				
Administrasi Bank	361	441	801	45%
Bunga Pinjaman	1,102	1,347	2,449	45%
Beban Lainnya	750	916	1,666	45%
Total Beban Lain-Lain	2,212	2,704	4,916	45%
LABA SEBELUM PAJAK	7,001	8,557	15,558	45%
Beban PPh. Ps. 29	1,540	1,882	3,423	45%
LABA SETELAH PAJAK	5,461	6,674	12,135	45%

Tabel 4. 12 Rencana Pemenuhan TKDN 2024

BAB V PROYEKSI KEUANGAN PERUSAHAAN

1. Proyeksi Keuangan Pokok Perusahaan

1.1. Proyeksi Neraca

(dalam juta Rupiah)

Uraian	2022 Audited	2023 (Prognosa)	2024 RKAP	RKAP 2024 Growth
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan Setara Kas	143,294	113,732	95,548	-15.99%
Piutang Usaha	81,951	98,701	103,905	5.27%
Piutang Lain-lain	954	756	855	13.08%
Persediaan	-	-	-	0.00%
Pajak Dibayar di Muka	5,186	8,979	7,606	-15.28%
Beban Dibayar di Muka	1,124	2,694	2,882	6.99%
Uang Muka Kerja	2,351	4,714	3,043	-35.44%
Jumlah Aset Lancar	234,860	229,575	213,840	-6.85%
ASET TIDAK LANCAR				
Aset Pajak Tangguhan	34,278	34,964	34,621	-0.98%
Investasi pada Entitas Asosiasi	659	659	659	0.00%
Aset Hak Guna - Bersih	4,994	3,853	3,083	-20.00%
Aset Tetap	113,139	172,325	227,985	32.30%
Uang Jaminan	1,507	1,786	1,647	-7.82%
Aset Tidak Lancar Lainnya	4,394	4,014	3,517	-12.40%
Jumlah Aset Tidak Lancar	158,971	217,602	271,510	24.77%
JUMLAH ASET	393,831	447,177	485,350	8.54%
LIABILITAS				
Liabilitas Jangka Pendek				
Utang usaha	12,778	11,769	12,460	5.87%
Utang lain-lain	4,932	5,068	5,000	-1.33%
Utang pajak	2,736	4,697	3,717	-20.88%
Utang dana pensiun	1,660	1,660	14,830	793.40%
Beban yang masih harus dibayar	17,403	18,796	18,099	-3.70%
Bagian Jangka Pendek dari Utang Jangka Panjang	-	-	-	0.00%
Pinjaman Bank	-	11,655	18,025	54.66%
Utang Sewa Pembiayaan	365	-	-	0.00%

Uraian	2022 Audited	2023 (Prognosa)	2024 RKAP	RKAP 2024 Growth
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	39,875	53,644	72,131	34.46%
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas Pajak Tangguhan	2	2	2	0.00%
Utang Jangka Panjang setelah dikurangi bagian jangka pendek	-	-	-	0.00%
Pinjaman Bank	-	21,336	41,152	92.88%
Utang Sewa Pembiayaan				0.00%
Liabilitas Sewa	4,951	3,027	3,087	2.00%
Liabilitas Imbalan Pascakerja	125,256	122,751	-	-100.00%
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	130,209	147,116	44,241	-69.93%
Jumlah Liabilitas	170,084	200,760	116,372	-42.03%
EKUITAS				
Modal Disetor	9,116	9,116	9,116	0.00%
Tambahan Modal Disetor	15,572	15,572	15,572	0.00%
Tambahan Modal Disetor Lainnya	32,033	32,033	32,033	0.00%
Saldo Laba	-	-	-	0.00%
Ditentukan Penggunaannya	18,956	44,749	44,749	0.00%
Belum Ditentukan Penggunaannya	147,401	144,278	266,839	84.95%
Jumlah	223,078	245,749	368,310	49.87%
Kepentingan Nonpengendali	668	668	668	0.00%
JUMLAH EKUITAS	223,747	246,417	368,978	49.74%
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	393,831	447,177	485,350	8.54%

Tabel 5.1 Proyeksi Neraca 2024

1.2. Proyeksi Laba/Rugi

(dalam juta Rupiah)

Uraian	2022 Audited	2023 (Prognosa)	2024 RKAP	RKAP 2024 Growth
PENDAPATAN USAHA	399,187	448,932	481,324	7.22%
BEBAN POKOK USAHA	278,676	312,586	331,415	6.02%
LABA BRUTO	120,511	136,346	149,909	9.95%

Uraian	2022 Audited	2023 (Prognosa)	2024 RKAP	RKAP 2024 Growth
Beban Penjualan	482	292	1,200	311.37%
Beban Administrasi dan Umum	105,699	106,429	131,582	23.63%
Penghasilan (Beban) Lain-lain - Bersih	125,533	(961)	(1,568)	63.24%
LABA SEBELUM PAJAK	139,862	28,665	15,558	-45.73%
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	5,662	5,930	3,423	-42.28%
LABA TAHUN BERJALAN	134,200	22,734	12,135	-46.62%
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
Pos-pos yang Tidak dapat Direklasifikasi ke Laba Rugi				
Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti	(7,096)	-	-	-
Pajak Terkait	1,561	-	-	-
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan - Bersih	128,664	22,734	12,135	-46.62%
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN				
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik Entitas Induk	134,195	22,734	12,135	-46.62%
Kepentingan Non pengendali	5	-	-	0.00%
JUMLAH	134,200	22,734	12,135	-46.62%
LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik Entitas Induk	128,664	22,734	12,135	-46.62%
Kepentingan Non pengendali				
JUMLAH	128,664	22,734	12,135	-46.62%

Tabel 5. 2 Proyeksi Laba/Rugi 2024

1.3. Arus Kas

(dalam juta Rupiah)

Uraian	2022 Audited	2023 (Prognosa)	2024 RKAP	RKAP 2024 Growth
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan Kas dari Pelanggan	246,571	274,025	295,200	7.73%
Penerimaan dari Pemerintah	148,583	169,315	172,823	2.07%
Pembayaran Kas kepada Pemasok dan Karyawan	(403,047)	(404,193)	(431,477)	6.75%
Penerimaan Bunga	1,532	-	-	
Penerimaan Lain-lain	-	-	-	
Pembayaran Pajak	(10,464)	(6,441)	(12,008)	86.44%
Pembayaran Lain-lain	-	-	-	
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(16,824)	32,707	24,539	-24.97%
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Penerimaan Dividen	153,908	762	-	
Perolehan Aset Tetap	(87,210)	(93,357)	(62,570)	-32.98%
Penjualan Aset Tetap	1,543	115	-	
Perolehan Aset Tidak berwujud	(2,177)	-	-	
Penempatan Investasi	-	-	-	
Penempatan Pendanaan	-	-	-	
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	66,064	(92,480)	(62,570)	-32.34%
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Penerimaan Pinjaman Bank	25,000	83,000	73,334	-11.65%
Pembayaran Pinjaman Bank	(26,521)	(50,010)	(46,326)	-7.37%
Pembayaran Bunga Bank	-	(2,779)	(7,159)	157.60%
Pembayaran Sewa Pembiayaan	-	-	-	
Penerimaan Setoran Modal dari Kepentingan Non-pengendali	300	-	-	
Pembayaran Liabilitas Sewa	(3,216)	-	-	
Kas Bersih Digunakan untuk (Diperoleh dari) Untuk Aktivitas Pendanaan	(4,437)	30,211	19,848	-34.30%
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	44,802	(29,562)	(18,184)	-38.49%
SALDO AWAL KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	98,491	143,294	113,732	-20.63%
SALDO AWAL KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	143,294	113,732	95,548	-15.99%

Tabel 5.3 Proyeksi Arus Kas 2024

1.4. Proyeksi Sumber dan Penggunaan Dana

(dalam juta rupiah)

URAIAN	RKAP 2024			TOTAL
	KOMERSIL	PSO	PT, AETP	
PENDAPATAN USAHA				
Pendapatan PSO	-	176,350	-	176,350
Pendapatan Komersial	288,918	-	-	288,918
Pendapatan AETP	-	-	16,056	16,056
Total Pendapatan	288,918	176,350	16,056	481,324
BEBAN POKOK USAHA				
Beban Pokok PSO	-	60,102	-	60,102
Beban Pokok Komersial	142,895	-	-	142,895
Beban Pokok AETP	-	-	12,845	12,845
Gaji	13,518	29,168	-	42,686
Incentif	2,352	3,999	-	6,351
Tunjangan Tetap	15,555	33,302	-	48,857
Lembur	47	9	-	56
Outbound	1,125	545	-	1,670
Gaji - Outsource	5,492	1,831	-	7,322
Incentif - Outsource	2	4	-	6
Internet	3,047	1,222	-	4,269
Konsultan	3,485	871	-	4,357
Total Beban Pokok Usaha	187,519	131,051	12,845	331,415
LABA BRUTO	101,399	45,299	3,211	149,909
BEBAN PENJUALAN				
Promosi	1,142	59	-	1,200
Total Beban Penjualan	1,142	59	-	1,200
BEBAN UMUM ADMINISTRASI				
Bonus	3,081	6,639	-	9,721
Thr	2,470	4,770	-	7,240
Asuransi	6,068	1,517	-	7,585
Pensiun	33,004	8,251	-	41,256
Penghargaan Karyawan	1,230	-	-	1,230
Pesangon	163	-	-	163
Pelatihan	2,919	1,018	-	3,938
Ibo	486	162	-	647
Rekrutasi	111	37	-	147
Promosi	618	-	-	618
Tunjangan Tidak Tetap	4,907	7,885	-	12,792

URAIAN	RKAP 2024			TOTAL
	KOMERSIL	PSO	PT, AETP	
Atk	408	187	-	595
Listrik	668	621	-	1,289
Telepon	48	39	-	86
Sewa Gedung	1,131	519	-	1,650
Sewa Alat Kerja	1,847	601	-	2,448
Perawatan Alat Kerja	1,731	1,107	-	2,838
Air	69	66	-	134
Rtk	862	448	-	1,310
Keanggotaan	148	59	-	208
Rapat	1,290	1,003	-	2,293
Kontribusi Lingkungan	1,172	108	-	1,280
Materai	21	14	-	36
Sppd Non Project	2,733	1,806	-	4,538
Transport	4,429	2,110	-	6,539
Depresiasi Prasarana	8,547	2,849	-	11,396
Biaya Penyusutan Aset Hak Guna	2,686	-	-	2,686
Bad Debt Pendapatan	6,576	-	-	6,576
Beban Pajak	3	-	-	3
Beban Ppn	9	-	-	9
Pajak Daerah Dan Pajak Lainnya	331	-	-	331
Total Beban Umum dan Administrasi	89,766	41,816	-	131,582
PENDAPATAN (BEBAN) LAINNYA				
Pendapatan Lain				
Pendapatan Bunga Bank	847	-	-	847
Pendapatan Lainnya	1,963	-	-	1,963
Pendapatan Bunga Deposito	385	-	-	385
Keuntungan Penjualan Aset	153	-	-	153
Total Pendapatan Lain	3,348	-	-	3,348
Beban Lain				
Administrasi Bank	801	-	-	801
Bunga Pinjaman	2,449	-	-	2,449
Beban Lainnya	899	-	767	1,666
Total Beban Lain	4,149	-	767	4,916
Total Pendapatan (Beban) Lainnya	801	-	767	1,568
LABA SEBELUM PAJAK	9,690	3,424	2,444	15,558
Beban PPh. Ps. 29	2,716	-	706	3,423
LABA (RUGI) BERSIH	6,973	3,424	1,738	12,135

Tabel 5. 4 Proyeksi Sumber dan Penggunaan Dana 2024

2. Proyeksi Pokok Keuangan Anak Perusahaan (AETP)

2.1. Proyeksi Neraca

(dalam juta rupiah)

Uraian	2023	2024	RKAP 2024
	Prognosa	RKAP	Growth
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	28,681	31,277	9.05%
Pihak Berelasi	-	-	0.00%
Piutang Usaha	3,401	2,676	-21.31%
Piutang Lain-lain	-	-	0.00%
Persediaan	-	-	0.00%
Uang Muka	16	16	0.00%
Pajak Dibayar di Muka	2,321	554	-76.14%
Aset Lancar Lainnya	-	-	0.00%
Jumlah Aset Lancar	34,418	34,522	0.30%
ASET TIDAK LANCAR			
Aset Tetap - Bersih	990	943	-4.73%
Aset Hak Guna Usaha	631	287	-54.55%
Uang Jaminan	162	162	0.00%
Aset Tidak Lancar Lainnya	-	-	0.00%
Jumlah Aset Tidak Lancar	1,782	1,391	-21.93%
JUMLAH ASET	36,201	35,914	-0.79%
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang Usaha	-	-	0.00%
Utang lain-lain	465	-	-100.00%
Utang pajak	132	101	-23.44%
Beban Akrual	-	-	0.00%
Bagian Lancar atas Liabilitas Jangka Panjang:	-	-	0.00%
Liabilitas Sewa	435	109	-75.00%
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1,032	210	-79.68%
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas Pajak Tangguhan	2	2	0.00%
Liabilitas Sewa Guna Usaha	260	102	-60.91%
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	262	104	-60.45%
Jumlah Liabilitas	1,294	313	-75.79%

Uraian	2023	2024	RKAP 2024
	Prognosa	RKAP	Growth
EKUITAS			
Modal Saham	30,000	30,000	0.00%
Tambahan modal disetor	(1,340)	(1,340)	0.00%
Keuntungan/(Kerugian) Aktuarial	(851)	(851)	0.00%
Saldo Laba Ditentukan Penggunaannya	3,454	5,087	47.29%
Saldo Laba Belum Ditentukan Penggunaannya	3,643	3,748	2.86%
Penghasilan Komprehensif Lain	-	-	0.00%
JUMLAH EKUITAS	34,906	36,644	4.98%
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	36,201	36,958	2.09%

Tabel 5. 5 Proyeksi Neraca Anak Perusahaan Antara pada 2024

2.2. Proyeksi Laba/Rugi

(dalam juta rupiah)

Uraian	2023	2024	RKAP 2024
	Prognosa	RKAP	Growth
PENDAPATAN USAHA	15,000	16,056	7.04%
BEBAN POKOK USAHA	12,000	12,845	7.04%
LABA KOTOR	3,000	3,211	7.04%
Beban Penjualan	-	-	0.00%
Beban Administrasi dan Umum	-	-	0.00%
Penghasilan (Beban) Lain-lain - Bersih	(707)	(767)	8.54%
LABA SEBELUM PAJAK	2,293	2,444	6.57%
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	660	706	7.04%
LABA TAHUN BERJALAN	1,633	1,738	6.39%

Tabel 5. 6 Proyeksi Laba/Rugi Anak Perusahaan Antara pada 2024

2.3. Proyeksi Arus Kas

(dalam juta rupiah)

Uraian	2023	2024	RKAP 2024
	Prognosa	RKAP	Growth
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan Kas dari Pelanggan	13,000	17,662	35.86%
Pembayaran kepada Pemasok dan Karyawan	(10,928)	(13,531)	23.82%
Penerimaan Bunga	563	1,000	77.69%

Uraian	2023	2024	RKAP 2024
	Prognosa	RKAP	Growth
Penerimaan Lain-lain	563	-	-100.00%
Pembayaran Pajak	(2,154)	(1,256)	-41.68%
Pembayaran Lain-lain	-	-	0.00%
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasi	1,044	3,875	271.25%
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Perolehan Aset Tetap	(200)	(235)	17.50%
Penerimaan penempatan Investasi	-	-	0.00%
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(200)	(235)	17.50%
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Penerimaan Pinjaman Bank	-	-	0.00%
Pembayaran Pinjaman Bank	-	-	0.00%
Kas Bersih Digunakan untuk (Diperoleh dari) Untuk Aktivitas Pendanaan	-	-	0.00%
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS			
	844	3,640	331.40%
SALDO AWAL KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	27,837	28,681	3.03%
SALDO AWAL KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE	28,681	32,320	12.69%

Tabel 5. 7 Proyeksi Arus Kas Anak Perusahaan Antara 2024

BAB VI PROFIL MANAJEMEN RISIKO

1. Gambaran Umum

1.1 Klasifikasi Intensitas Risiko

Sesuai dengan Aspirasi Pemegang Saham Kementerian BUMN pada tahun 2024, Perum LKBN Antara menempatkan diri sebagai BUMN dengan klasifikasi intensitas risiko “SISTEMIK B”. Posisi Antara sebagai BUMN dengan klasifikasi risiko Sistemik B tersebut telah selaras dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN (PER-2/MBU/03/2023).

No	Kriteria	Threshold Permen 2	Antara	Posisi	Klasifikasi
1.	Total aset	Rp 100 trilyun	Rp 393 milyar	Kecil	SISTEMIK B
2.	Total modal	Rp 25 trilyun	Rp 223 milyar		
3.	PSO	Penerima PSO	Menerima PSO	Kompleks	

Tabel 6.1 Klasifikasi Intensitas Risiko

Oleh karena itu, Perum LKBN Antara akan mematuhi segala konsekuensi terkait kelengkapan organ dan pelaporan yang sesuai dengan klasifikasi risiko tersebut.

Namun demikian, untuk kelengkapan organ pengelola risiko, Perusahaan pada tahun 2024 berpendapat bahwa Perum LKBN Antara belum memerlukan pemisahan antara Direktur Keuangan dengan Direktur Manajemen Risiko karena nilai PSO yang relatif sangat kecil dibanding dengan BUMN-BUMN lainnya – sehingga risiko atas penugasan negara masih dapat dikendalikan oleh Direktur Keuangan yang merangkap sebagai Direktur Manajemen Risiko.

Tabel di atas menggambarkan bahwa nilai PSO yang diterima oleh Antara jauh lebih kecil dibandingkan dengan BUMN-BUMN penerima PSO lainnya. Dari sekitar Rp 6 trilyun anggaran negara untuk PSO tahun 2022, Perum LKBN Antara hanya menerima 2,8 persen dari keseluruhan anggaran tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat risiko penerimaan PSO Perusahaan tidak dapat dibandingkan dengan penerima PSO lainnya karena skala yang berbeda.

Selain itu, jika dibandingkan dengan BUMN berklasifikasi risiko sistemik B lainnya (yang menerima PMN atau subsidi), nilai PSO Antara juga masih tergolong kecil, sebagaimana tergambar pada grafik berikut:

1.2 Konteks Risiko yang akan Dihadapi pada 2024

Secara umum, perusahaan akan terpapar dua situasi eksternal dan internal yang terjadi pada tahun 2024. Situasi eksternal pertama yang akan mempengaruhi kinerja Perum LKBN Antara adalah diselenggarakannya pemilihan umum pada. Sementara itu, pada sisi internal, Perusahaan pada tahun yang sama juga akan melakukan sejumlah investasi strategis besar yang dihadapkan dapat mendatangkan tambahan pendapatan secara jangka panjang.

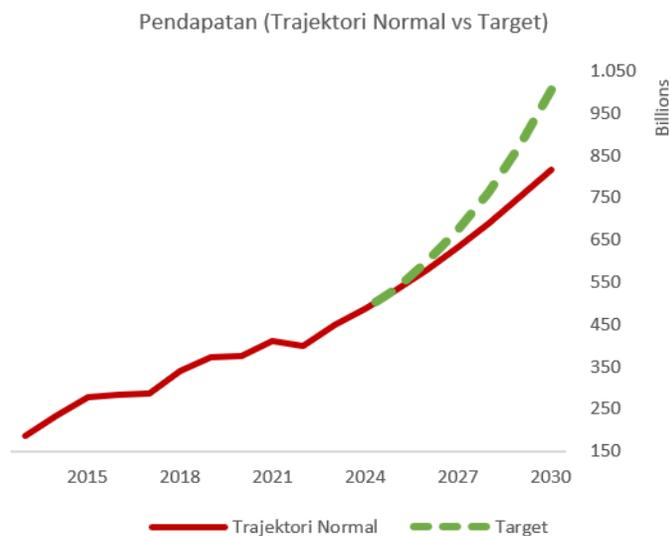
a. Pemilihan Umum

Pada konteks pemilihan umum, pesta demokrasi akan menjadi ajang pertarungan reputasi dan masa depan perusahaan. Pemberitaan Antara ditantang untuk tetap menjaga keseimbangan sehingga tidak mempengaruhi hubungan baik perusahaan dengan pemerintah baru yang akan terbentuk dari hasil pemilihan umum. Namun di sisi lain, pemilihan umum juga akan menjadi peluang bagi sumber pendapatan baru dengan kerja sama-kerja sama dengan lembaga negara penyelenggara pemungutan suara.

Selain harus menjaga keseimbangan pemberitaan pada masa pemilu, Antara juga harus waspada dengan serangan siber yang cenderung selalu meningkat pada masa-masa sensitif seperti ini. Perum LKBN Antara telah menyiapkan sejumlah aksi mitigasi untuk mengantisipasi risiko serangan siber – yang berpotensi mengganggu operasional Antara dalam menyiarkan berita-berita politik tersebut.

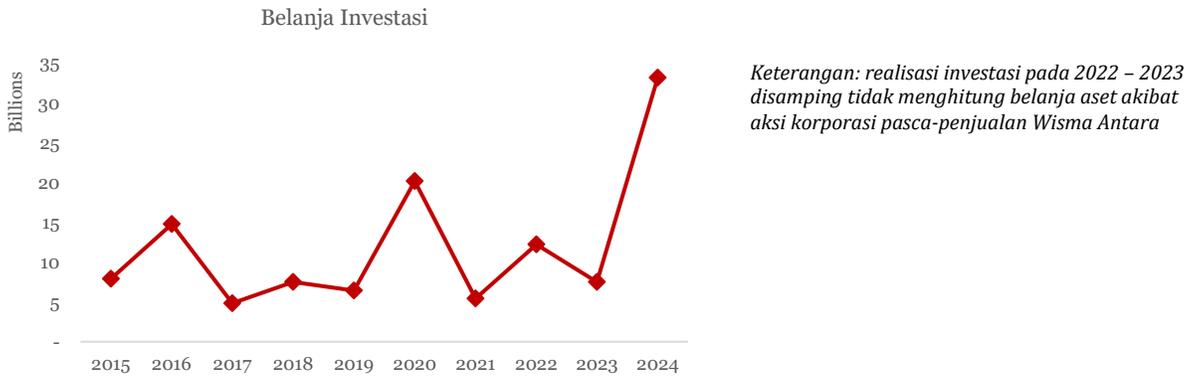
b. Investasi yang Cenderung Signifikan dibanding Tahun-Tahun Sebelumnya

Secara umum, manajemen Perum LKBN Antara memandang bahwa tahun 2024 merupakan tahun pijakan untuk rencana jangka panjang mencapai tonggak pendapatan sebesar satu triliun rupiah pada 2030. Target ini cukup ambisius mengingat perusahaan harus meningkatkan pendapatan lebih dari dua kali lipat hanya dalam waktu enam tahun, Grafik berikut ini menggambarkan target tersebut dibandingkan dengan trajektori normal capaian selama 10 tahun terakhir



Gambar 6.1 Trajektori Pendapatan Perusahaan 2015-2030

Pandangan manajemen bahwa 2024 merupakan tahun dasar yang menjadi fondasi tercapainya target jangka panjang 2030 tersebut tergambar dalam rencana investasi dan pengembangan pada RKAP 2024 ini. Pada tahun depan, perusahaan mencanangkan investasi dengan angka yang secara signifikan jauh lebih besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Perusahaan akan melakukan pembaruan di bidang teknologi dan alat-alat kerja sebagai penunjang kinerja perusahaan selama enam tahun mendatang. Besarnya peningkatan capital expenditure perusahaan dibanding tahun-tahun sebelumnya tersebut tergambar pada grafik di bawah ini:



Gambar 4 Belanja Investasi Perusahaan Tahun 2015-

Secara total, rencana investasi pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Prognosa 2023
1	Pembangunan kompleks ANTARA Pasar Baru	52,500
2	Renovasi Wisma ANTARA-B (Ex-PANN)	27,620
3	Pengadaan Meubelair di Wisma ANTARA-B	791
4	Renovasi Bangunan & Prasarana Biro lainnya	260
5	Peralatan kantor	4,000
6	Pembelian Tanah dan Bangunan PNRI	4,493
	TOTAL	89,664

Tabel 6.2 Rencana Investasi Perusahaan Tahun 2024

c. Pengalihan Dana Pensiun

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, salah satu kebijakan terbesar Perusahaan yang akan dijalankan pada tahun 2024 ini adalah Pengalihan Program Dana Pensiun Pemberi Kerja Manfaat Pasti (DPPK MP) menjadi program Dana Pensiun Lembaga Keuangan Iuran Pasti.

Rencana pengalihan ini – selain diharapkan dapat memberikan efisiensi bagi perusahaan sebesar lebih dari Rp100 milyar selama kurun waktu lima tahun sejak 2024 – akan membawa risiko besar bagi kas perusahaan. Perusahaan telah berkomitmen untuk menutup defisit solvabilitas Dana Pensiun Perum LKBN Antara yang pada tahun 2022 lalu sebesar Rp26,7 milyar dan telah menyiapkan anggaran untuk hal tersebut. Namun demikian, angka defisit tersebut dapat membesar menjadi lebih dari Rp30 milyar karena terdapat sejumlah aset investasi Dana Pensiun yang tidak sehat.

Selain membengkaknya defisit solvabilitas, risiko lain dari aksi korporasi ini adalah penolakan dari peserta Dana Pensiun. Perusahaan harus bisa meyakinkan para pensiunan dan pegawai aktif bahwa pengalihan ini adalah kebijakan terbaik untuk menyelamatkan perusahaan dan masa depan pensiunan – lihat kajian Uji Tuntas Dana Pensiun untuk penjelasan yang lebih detail.

d. Pembatasan Berita PSO

Konteks internal terakhir yang juga sangat signifikan pada 2024 adalah pembatasan produksi berita PSO pada 2024, dengan angka maksimal sebesar 120% dari pagu Kominfo. Kebijakan – yang diharapkan dapat membawa efisiensi produksi berita PSO tersebut – dapat berdampak negatif pada penurunan pendapatan PSO.

2. Program Kerja Manajemen Risiko 2024

Program kerja unit kerja Manajemen Risiko pada tahun 2024 dapat digambarkan pada tabel berikut (program kerja ini disusun berdasarkan klasifikasi intensitas risiko dan roadmap perbaikan manajemen risiko perusahaan):

No	Program Kerja	Target pelaksanaan	Output
1.	Sosialisasi risiko pada Unit Kerja Perusahaan	Sepanjang tahun	Peningkatan kesadaran risiko bagi seluruh insan Antara
2.	Pengkinian Pedoman dan SOP MR	TW I	Penyesuaian SOP dengan praktik terbaik
3.	Penyusunan Risk Appetite	TW IV	Panduan bagi penyusunan program kerja tahun 2025 yang sesuai dengan selera risiko perusahaan
4.	Pelatihan dan sertifikasi personil organ pengelola risiko	Sepanjang tahun	Pemenuhan target kualifikasi personil organ pengelola risiko sebesar 90%
5.	Pembentukan Risk Champion	Februari	Adanya personil di tingkat unit kerja yang dapat mengelola risiko
6.	Digitalisasi Sistem Informasi MR Terpadu	Selesai pada Oktober	Kemudahan dalam pengelolaan sistem informasi risiko perusahaan
7.	Monitoring KRI	Sepanjang tahun	Risiko perusahaan dapat terpantau dapat ditindak lanjuti dengan cepat sebelum terjadi
8.	Integrasi MR dengan Perencanaan (RKAP dan RJPP)	TW IV	Perencanaan perusahaan telah terintegrasi dengan risiko yang dihadapi
9.	Penerapan Audit Risiko	TW IV	Efektifitas penerapan manajemen risiko perusahaan dapat dievaluasi
10.	Pengembangan Database Loss Event	TW IV	Perusahaan mempunyai database terjadinya risiko – yang kemudian akan memperkaya dan menyiapkan perusahaan jika terekspose dengan risiko serupa
11.	Evaluasi Maturitas Risiko oleh lembaga independen	TW II	Perusahaan dapat mengetahui maturitas risiko dan membantu perencanaan perbaikan pada tahun-tahun berikutnya
12.	Review pelaksanaan pelaksanaan Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR) oleh lembaga independen	TW IV	Perusahaan dapat menilai efektifitas kontrol internal terhadap pelaporan keuangan

Tabel 6.3 Program Kerja Manajemen Risiko 2024

3. Kapasitas Risiko

Kapasitas risiko perusahaan pada tahun 2024 dapat dirangkum sebagai berikut:

Aspek	Besaran	Dasar perhitungan
<i>Risk Capacity</i>	Rp 141,7 milyar	Nilai net-working capital dalam RKAP 2024 (aset lancar dikurangi liabilitas jangka pendek)
<i>Risk Appetite</i>	Rp 28,3 milyar	20% dari risk capacity – angka 20% merupakan penilaian terhadap selera risiko perusahaan tahun 2024 yang secara umum tinggi (strategis)
<i>Risk Tolerance</i>	Rp 35,4 milyar	25% dari risk capacity – angka 25% merupakan penilaian terhadap selera risiko perusahaan tahun 2024 yang secara umum tinggi (strategis)
<i>Risk Limit</i>	Rp 12,2 milyar	8,7% dari risk capacity – angka 8,6% merupakan probabilitas dari ketidak-tercapaian NWC (risk capacity) hasil dari simulasi monte carlo sebanyak 10.000 kali terhadap risk capacity dengan variabel-variabel yang mempengaruhi NWC – dengan penyesuaian distribusi yang tidak normal berdasarkan capaian historis lima tahun terakhir. Jumlah simulasi di mana NWC kurang dari Rp 141,7 milyar = 864 Jumlah total simulasi = 10.000 Probabilitas ketidak tercapaian = 8,6%

Tabel 6.4 Kapasitas Risiko Perusahaan 2024

4. Matriks Strategi Risiko

4.1. Selera Risiko

Dua tabel berikut ini merupakan pernyataan selera risiko perusahaan beserta parameternya yang telah disetujui oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas, sebagaimana terdapat dalam lampiran buku RKAP ini.

Kategori risiko	Selera	Pernyataan selera risiko
Bisnis dan strategi	Strategis/Tinggi	Manajemen menyadari bahwa tahun 2024 merupakan fondasi yang penting untuk mencapai target jangka panjang perusahaan, dan dengan demikian akan melakukan tindakan strategis berisiko signifikan dengan melakukan investasi di bidang teknologi yang menunjang kinerja jangka panjang,
Operasional	Strategis/Tinggi	Tahun 2024 yang bertepatan dengan tahun pemilihan umum presiden dan legislatif merupakan peluang bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerja pemberitaan (dengan indikator tingkat keterbacaan) dan siap mengambil tindakan berisiko tinggi untuk kategori ini,
Keuangan	Moderat	Perusahaan akan memenuhi kewajiban keuangan dan mempertahankan struktur keuangan yang sehat dan menjaga keberlangsungan usaha secara berkesinambungan.
Keselamatan kerja	Tidak toleran	Untuk mendapatkan berita-berita eksklusif yang hanya bisa didapatkan dari Kantor Berita Antara dan meningkatkan reputasi perusahaan di bidang pers, perusahaan akan mengirim wartawan untuk melakukan peliputan ke daerah konflik, daerah rawan bencana, dan liputan berbahaya lainnya. Meskipun demikian, perusahaan akan menjaga keselamatan wartawan dengan maksimal dengan maksimal. Untuk kategori ini, selera perusahaan adalah tidak toleran.
Hukum dan kepatuhan	Tidak Toleran	Perusahaan akan selalu patuh terhadap semua regulasi yang berlaku, baik untuk induk maupun untuk anak perusahaan, dan tidak akan mentoleransi pelanggaran-pelanggaran hukum yang berdampak besar pada keuangan maupun reputasi perusahaan,
Reputasi	Strategis	Perusahaan akan melakukan sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan reputasi perusahaan sebagai kantor berita pada tahun pemilihan umum dan menerima risiko dalam batas moderat,
Informasi Teknologi	Tidak toleran	Perusahaan menyadari bahwa kelancaran operasi untuk mencapai target pada tahun 2024 sangat bergantung pada keamanan sistem teknologi informasi, dan tidak akan toleran terhadap risiko-risiko keamanan siber yang mengancam berjalannya operasional perusahaan.

Tabel 6.5 Selera Risiko Perusahaan 2024

4.2. Parameter dan Limit Risiko

No,	Kategori Risiko BUMN	Sikap Terhadap Risiko	Parameter	Satuan Ukuran	Nilai Batasan/Limit
1	Bisnis dan Strategi	Strategis	Deviasi terhadap penyelesaian investasi strategis perusahaan	Bulan	3
2	Operasional	Strategis	Deviasi terhadap jumlah pembaca dari target	Jumlah	10 juta
3	Keuangan	Moderat	Jumlah kas setara kas minimal	Rupiah	50 milyar
4	Keselamatan Kerja	Strategis	Jumlah kecelakaan kerja yang mengakibatkan kehilangan nyawa	Jumlah	0
5	Hukum dan Kepatuhan	Tidak toleran	Jumlah tuntutan hukum yang masuk di meja persidangan oleh pihak eksternal maupun internal	Jumlah	3
6	Reputasi	Strategis	Jumlah peristiwa terkait perusahaan yang mendapatkan publikasi negatif di media nasional	Jumlah	3

No,	Kategori Risiko BUMN	Sikap Terhadap Risiko	Parameter	Satuan Ukuran	Nilai Batasan/Limit
7	Informasi Teknologi	Tidak toleran	Jumlah gangguan yang menyebabkan sistem krusial mati total selama lebih dari enam jam	Jumlah	0

Tabel 6.6 Parameter dan Limit Risiko 2024

5. Gambaran Risiko Utama dalam Taksonomi Risiko K-BUMN

Tema Risiko	Kategori Risiko	Peristiwa Risiko (T3)	Risiko
Tema Risiko Masing-Masing BUMN/Anak Perusahaan	Risiko Industri Umum	Risiko Industri Umum - Keuangan	Membengkaknya defisit solvabilitas Dapen saat pembubaran
Tema Risiko Masing-Masing BUMN/Anak Perusahaan	Risiko Industri Umum	Risiko Industri Umum - Teknologi & Keamanan Siber	Meningkatnya serangan siber pada masa pemilihan umum
Tema Risiko Portofolio Induk BUMN	Risiko Kebijakan	Risiko Kebijakan - SDM	Kegagalan perundingan PKB baru
Tema Risiko Masing-Masing BUMN/Anak Perusahaan	Risiko Industri Umum	Risiko Industri Umum - Operasional	Tingkat penyerapan anggaran PSO hanya 90%
Tema Risiko Masing-Masing BUMN/Anak Perusahaan	Risiko Industri Umum	Risiko Industri Umum - Operasional	Memburuknya hubungan dengan pemerintah baru
Tema Risiko Masing-Masing BUMN/Anak Perusahaan	Risiko Industri Umum	Risiko Industri Umum - Reputasi & Kepatuhan	Terjadinya pelanggaran terhadap perjanjian kerjasama dengan Bloomberg
Tema Risiko Portofolio Induk BUMN	Risiko Kebijakan	Risiko Kebijakan - SDM	Penolakan pemindahan DPPK ke DPLK
Tema Risiko Masing-Masing BUMN/Anak Perusahaan	Risiko Industri Umum	Risiko Industri Umum - Operasional	Terhambatnya perkembangan Antara ETP
Tema Risiko Masing-Masing BUMN/Anak Perusahaan	Risiko Industri Umum	Risiko Industri Umum - Keuangan	Tidak tertagihnya piutang usaha
Tema Risiko Masing-Masing BUMN/Anak Perusahaan	Risiko Industri Umum	Risiko Industri Umum - Operasional	Terjadi kesalahan dalam menyusun strategi perencanaan dan manajemen monetasi aset.
Tema Risiko Masing-Masing BUMN/Anak Perusahaan	Risiko Industri Umum	Risiko Industri Umum - Proyek	Keterlambatan penyelesaian proyek renovasi Pasar Baru dan Cisarua
Tema Risiko Masing-Masing BUMN/Anak Perusahaan	Risiko Industri Umum	Risiko Industri Umum - Formulasi Strategis	proses ekspansi produk IMCS ke biro daerah tidak maksimal

Tabel 6.7 Risiko Utama dalam Taksonomi Risiko K-BUMN

6. Ringkasan Risiko Utama

No	Inheren		Penjelasan	Rencana Perlakuan Risiko	Residual	
	D	P			D	P
RU-1			<p>Peristiwa: Membengkaknya defisit solvabilitas Dapen saat pembubaran</p> <p>Penyebab:</p>	<p>Perlakuan Pencadangan free cash flow untuk membeli aset Dana Pensiun yang tidak terjual</p>		

No	Inheren		Penjelasan	Rencana Perlakuan Risiko	Residual	
	D	P			D	P
			<ul style="list-style-type: none"> Sebagian asset dana pensiun sudah tidak dapat dicairkan karena sebagian reksadana dan emiten saham yang diinvestasikan sudah bubar <p>Inheren risk: Dampak: Rp. 10 Miliar (jumlah aset tidak sehat Dana Pensiun) Prob: 95%</p> <p>Residual risk: Dampak: Rp. 3 Miliar Prob: 49%</p>	<p>KRI Prosentase pembengkakan defisit (defisit solvabilitas tercatat dengan hasil likuidasi aset)</p> <ul style="list-style-type: none"> Aman: 30% Hati-hati: 40% Bahaya: 50% 		
RU-2			<p>Peristiwa: Meningkatnya serangan siber pada masa pemilihan umum</p> <p>Penyebab:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sistem pertahanan IT belum kuat menghadapi peningkatan serangan eksternal yang massif. Peningkatan serangan siber secara signifikan <p>Inheren risk: Dampak: Berhentinya aplikasi pemberitaan dan keuangan selama lebih dari 6 jam Prob: 80%</p> <p>Residual risk: Dampak: Aplikasi dan Infrastruktur pendukung yang kurang penting tidak berfungsi selama lebih dari 1 hari s/d 3 hari Prob: 80%</p>	<p>Perlakuan</p> <ul style="list-style-type: none"> Membuat disaster Recovery Center Meningkatkan keamanan sistem dari segi firewall <p>KRI Jumlah serangan siber yang menembus sistem per triwulan</p> <ul style="list-style-type: none"> Aman: 3 Hati-hati: 7 Bahaya: 10 		
RU-3			<p>Peristiwa: Kegagalan perundingan PKB baru</p> <p>Penyebab:</p> <ul style="list-style-type: none"> Perdebatan terkait kenaikan gaji <p>Inheren risk: Dampak: Demonstrasi serikat pekerja yang diberitakan media nasional Prob: 75%</p> <p>Residual risk: Dampak: Keluhan tingkat wilayah Prob: 10%</p>	<p>Perlakuan Melibatkan konsultan hukum independen untuk membantu penyelesaian perundingan PKB</p> <p>KRI Bulan penyelesaian PKB terhitung dari awal tahun 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> Aman: Januari Hati-hati: Februari Bahaya: Maret 		
RU-4			<p>Peristiwa: Tingkat penyerapan anggaran PSO hanya 90%</p> <p>Penyebab:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kebijakan pembatasan produksi berita PSO 120% dari pagu untuk efisiensi produksi, membuat kemungkinan penyerapan anggaran PSO hanya 90 persen 	<p>Perlakuan</p> <ul style="list-style-type: none"> Efisiensi HPP PSO Perbaikan sistem keredaksian SP2MT Penguatan coaching clinic terkait kisi-kisi PSO <p>KRI Jumlah berita lolos per kuota per periode</p>		

No	Inheren		Penjelasan	Rencana Perlakuan Risiko	Residual	
	D	P			D	P
			<ul style="list-style-type: none"> Mekanisme insentif kinerja lebih dominan tergantung pada faktor produksi, bukan hasil kelolosan atau ukuran kualitas lainnya Berita PSO dan Non PSO masih tercampur karena sistem ticketing <p>Inheren risk: Dampak: Rp7,69 milyar (penurunan pendapatan PSO*GPM 30%) Prob: 85% -- berdasarkan tingkat kelolosan berita PSO pada tiga tahun terakhir</p> <p>Residual risk: Dampak: Rp3,8 milyar Prob: 30%</p>	<ul style="list-style-type: none"> Aman: 100% Hati-hati: 95% Bahaya: 90% 		
RU-5			<p>Peristiwa: Memburuknya hubungan dengan pemerintah baru</p> <p>Penyebab:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pemenang pemilihan umum merasa dirugikan oleh pemberitaan Antara <p>Inheren risk: Dampak: Rp. Rp. 7.86 Miliar (Penurunan pendapatan LMK sebesar 30%) Prob: 80%</p> <p>Residual risk: Dampak: Rp. 2 Miliar Prob: 70%</p>	<p>Perlakuan Kontrol tingkat keberpihakan berita yang berkaitan dengan pemilu oleh Redaktur</p> <p>KRI Persen berita salah dibanding produksi</p> <ul style="list-style-type: none"> Aman: 1% Hati-hati: 2% Bahaya: 5% 		
RU-6			<p>Peristiwa: Terjadinya pelanggaran terhadap perjanjian kerjasama dengan Bloomberg</p> <p>Penyebab:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ketidakmampuan/Kesalahan/Terlewatnya kepatuhan Antara ETP kepada perjanjian kerjasama dengan Bloomberg <p>Inheren risk: Dampak: Keluarnya bloomberg dari hubungan strategic partnership dengan Antara ETP Prob: 75%</p> <p>Residual risk: Dampak: keluhan yang perlu waktu penanganan 10 hari Prob: 50%</p>	<p>Perlakuan Perusahaan menjalankan koordinasi secara berkala dengan Bloomberg</p> <p>KRI Jumlah teguran tertulis, sanksi atau tuntutan</p> <ul style="list-style-type: none"> Aman: 0 Hati-hati: 1 Bahaya: 3 		
RU-7			<p>Peristiwa: Penolakan pemindahan DPPK ke DPLK</p> <p>Penyebab:</p>	<p>Perlakuan Sosialisasi komprehensif terkait jaminan manfaat yang diterima oleh penerima manfaat</p>		

No	Inheren		Penjelasan	Rencana Perlakuan Risiko	Residual	
	D	P			D	P
			<ul style="list-style-type: none"> Penerima manfaat merasa tidak aman dan khawatir akan merugi ketika peralihan dana pensiun <p>Inheren risk: Dampak: Penolakan terliput oleh media nasional yang menyebabkan reputasi perusahaan menurun Prob: 75%</p> <p>Residual risk: Dampak: Publikasi Negatif mencapai skala nasional pada media konvensional Prob: 25%</p>	<p>KRI Persebtase penerima manfaat yang menolak pemindahan</p> <ul style="list-style-type: none"> Aman: 10 Hati-hati: 30 Bahaya: 50 		
RU-8			<p>Peristiwa: Terhambatnya perkembangan Antara ETP</p> <p>Penyebab:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kurangnya pertumbuhan dalam jumlah transaksi bisa disebabkan oleh kondisi pasar keuangan yang tidak menguntungkan atau penurunan permintaan dari pelanggan <p>Inheren risk: Dampak: Tidak tercapainya peningkatan jumlah transaksi berdampak pada eksposur platform ETP kepada pelaku pasar uang dan pasar valuta asing yang mengalami pertumbuhan yang terbatas Prob: 75%</p> <p>Residual risk: Dampak: Penurunan pangsa pasar antara 5 persen Prob: 25%</p>	<p>Perlakuan Diskusi mengenai pengembangan produk akan dijadwalkan secara berkala dengan regulator dan mitra untuk memastikan kelancaran proses pengembangan</p> <p>KRI Penambahan transaksi pada TW 1 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> Aman: 3% Hati-hati: 2% Bahaya: 1% 		
RU-9			<p>Peristiwa: Tidak tertagihnya piutang usaha</p> <p>Penyebab:</p> <ul style="list-style-type: none"> Belum efektifnya sistem penagihan perusahaan <p>Inheren risk: Dampak: Rp. 3,19 Miliar (Kenaikan beban penyisihan piutang sebesar 50%) Prob: 90%</p> <p>Residual risk: Dampak: Rp 2,24 Miliar Prob: 46%</p>	<p>Perlakuan Pembentukan tim penagihan lintas direktorat</p> <p>KRI Overdue piutang berusia 6 bulan ke atas</p> <ul style="list-style-type: none"> Aman: 3% Hati-hati: 5% Bahaya: 10% 		
RU-10			<p>Peristiwa: Terjadi kesalahan dalam menyusun strategi perencanaan dan manajemen monetasi aset.</p> <p>Penyebab:</p>	<p>Perlakuan Memakai jasa Manajemen Residensial yang memiliki pengalaman baik dalam mengelola aset residensial</p>		

No	Inheren		Penjelasan	Rencana Perlakuan Risiko	Residual	
	D	P			D	P
			<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan belum memiliki pengalaman dalam mengelola aset residensial. <p>Inheren risk: Dampak: Rp. 2,98 Miliar (Potensi pendapatan jika tingkat okupansi aset tersebut 100%) Prob: 90%</p> <p>Residual risk: Dampak: Rp Rp. 2,98 Miliar Prob: 20%</p>	<p>KRI Realisasi pendapatan LPA dibandingkan dengan target pada TW3 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> Aman: 75% Hati-hati: 60% Bahaya: 50% 		
RU-11			<p>Peristiwa: Keterlambatan penyelesaian proyek renovasi Pasar Baru dan Cisarua</p> <p>Penyebab:</p> <ul style="list-style-type: none"> Keramaian lokasi di kantor Antara Pasar Baru dan akses jalan yang sulit dapat menghambat penyelesaian proyek renovasi terlambat dari target Maret 2024 kesalahan teknis yang tidak terduga akibat kesalahan vendor atau cuaca memburuk yang menyebabkan terhambatnya pekerjaan proyek konstruksi <p>Inheren risk: Dampak: Rp. 3,75 Miliar (Kenaikan biaya renovasi sebesar 5% dari anggaran) Prob: 70%</p> <p>Residual risk: Dampak: Rp 959 juta Prob: 36%</p>	<p>Perlakuan</p> <ul style="list-style-type: none"> Memonitor progress pelaksanaan proyek renovasi Pasar Baru, Cisarua dan IKN Monitoring pekerjaan proyek <p>KRI Progras penyelesaian proyek sebulan sebelum tenggat waktu yang ditetapkan</p> <ul style="list-style-type: none"> Aman: 90% Hati-hati: 80% Bahaya: 70% 		
RU-12			<p>Peristiwa: proses ekspansi produk IMCS ke biro daerah tidak maksimal</p> <p>Penyebab:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mekanisme insentif kinerja lebih dominan tergantung pada faktor produksi, bukan hasil kelolosan atau ukuran kualitas lainnya Berita PSO dan Non PSO masih tercampur karena sistem ticketing <p>Inheren risk: Dampak: Rp 900 juta (30% pendapatan Biro * GPM Komersil) Prob: 73%</p> <p>Residual risk: Dampak: Rp 900 juta Prob: 43%</p>	<p>Perlakuan</p> <ul style="list-style-type: none"> membuat perencanaan mengenai peningkatan sdm di biro untuk usaha bisnis perusahaan membuat feasibility study tiap daerah yang ada di biro agar menysasar pada target pengkajian sumberdaya yang dibutuhkan di daerah yang telah menjadi wilayah ekspansi bisnis <p>KRI Jumlah kerjasama produk IMCS pada sampel biro daerah di setiap pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> Aman: 6 Hati-hati: 3 Bahaya: 0 		

Tabel 6.8 Risiko Utama Perusahaan 2024

7. Heatmap



Gambar 5 Peta Risiko Utama Inheren dan Residual

8. Kriteria Risiko

Dengan mempertimbangkan batas toleransi risiko di atas, maka perusahaan menetapkan kriteria risiko sebagai berikut:

Kriteria Dampak:

Risiko	Skala				
	1 Sangat Rendah	2 Rendah	3 Moderat	4 Tinggi	5 Sangat Tinggi
Dampak Risiko Kuantitatif					
Dampak yang dapat mengakibatkan kerusakan/ kerugian/ penurunan dari nilai Batasan Risiko	$X \leq 20\%$ dari Batasan Risiko	$20\% < X \leq 40\%$ dari Batasan Risiko	$40\% < X \leq 60\%$ dari Batasan Risiko	$60\% < X \leq 80\%$ dari Batasan Risiko	$X > 80\%$ dari Batasan Risiko
Risiko Strategis					
Dampak keterlambatan pencapaian program strategis	Minimal 1 parameter target strategis yang harus selesai pada tahun ini tertunda	Minimal 1 parameter tujuan strategis yang harus selesai pada tahun ini	Minimal 1 parameter tujuan strategis yang harus selesai pada tahun ini tertunda antara 3 - 6 bulan	Minimal 1 parameter tujuan strategis yang harus selesai pada tahun ini tertunda antara 6 - 9 bulan	Minimal 1 parameter tujuan strategis yang harus selesai pada tahun ini tertunda lebih dari 9 bulan

Risiko	Skala				
	1	2	3	4	5
	Sangat Rendah	Rendah	Moderat	Tinggi	Sangat Tinggi
	kurang dari 1 bulan	tertunda antara 2 - 3 bulan			
Risiko Hukum					
Pelanggaran hukum	Tidak ada somasi/ tuntutan hukum	Perusahaan mendapat somasi,	Perusahaan mendapat tuntutan hukum,	Perusahaan diputuskan kalah di pengadilan tingkat pertama,	Perusahaan diputuskan kalah di pengadilan tingkat selanjutnya,
Risiko Kepatuhan					
Pelanggaran ketentuan kepatuhan	Teguran informal / verbal,	Diminta bertemu dengan pihak Regulator (misalkan OJK, Bank Indonesia, IDX, Kementerian terkait, Dirjen Pajak, dan lain-lain)	Peringatan tertulis / formal, terkena denda,	Regulator memberlakukan pembatasan dan / atau pembekuan terhadap aktivitas operasional / produk / jasa tertentu,	Regulator memberlakukan sanksi signifikan (misalkan <i>delisting</i> saham, tidak diperkenankan mengikuti kliring, menarik produk yang beredar, dan lain-lain)
Risiko Reputasi					
Keluhan pelanggan / nasabah / pembeli / supplier	Keluhan yang terisolasi dan dapat ditangani dalam 1 hari kerja	Keluhan yang terisolasi dan dapat diselesaikan dalam 3 hari kerja	Keluhan yang menyebar ke skala sektoral dan / atau diajukan secara kolektif yang dapat diselesaikan dalam waktu 7 hari kerja dan masih berada dalam kewenangan Pimpinan Cabang / Wilayah	Keluhan yang menyebar ke skala nasional dan / atau diajukan secara kolektif yang dapat diselesaikan dalam waktu 10 hari kerja dan / atau memerlukan penanganan kewenangan Kantor Pusat	Keluhan yang menyebar ke skala nasional / internasional dan / atau diajukan secara kolektif yang diselesaikan melebihi 10 hari kerja dan / atau memerlukan penanganan kewenangan Kantor Pusat
Pemberitaan negatif di media	Publikasi negatif yg terisolasi di wilayah sektoral melalui media konvensional (misalkan Radio lokal, TV lokal, Surat Kabar daerah)	Publikasi negatif yang lintas sektoral / wilayah / provinsi namun masih tersebar media konvensional,	Publikasi negatif skala nasional yang tersebar di media konvensional	Publikasi negatif mencapai skala nasional yang tersebar di sosial media dan / atau memerlukan penanganan kewenangan Kantor Pusat	Publikasi negatif mencapai skala internasional yang tersebar di sosial media dan / atau memerlukan penanganan kewenangan Kantor Pusat
Kehilangan daya saing	Penurunan pangsa pasar sampai dengan 5%	Penurunan pangsa pasar antara 5% sampai dengan 10%	Penurunan pangsa pasar antara 10% sampai dengan 15%	Penurunan pangsa pasar antara 15% sampai dengan 20%	Penurunan pangsa pasar lebih dari 20%
Risiko Sumber Daya Manusia					
Keluhan karyawan	Terdapat keluhan karyawan yang	Terdapat keluhan karyawan yang	Terdapat keluhan yang disalurkan mencapai tingkat	Unjuk rasa karyawan yang mengganggu	Demonstrasi terkoordinasi, terjadinya

Risiko	Skala				
	1	2	3	4	5
	Sangat Rendah	Rendah	Moderat	Tinggi	Sangat Tinggi
	disalurkan sampai tingkat SP Unit namun dapat diisolir dan diselesaikan oleh Pemimpin Unit	perlu diselesaikan oleh Penyelia Pemimpin Unit	sektoral / wilayah / provinsi,	aktivitas perusahaan dan / atau disertai terjadinya cedera serius / cacat permanen	kematian karyawan saat kerja
<i>Turn over</i> karyawan bertalenta (<i>regretted turnover</i>)	<i>Turn over</i> pegawai bertalenta kurang dari 1% setahun	<i>Turn over</i> pegawai bertalenta dari 1% sampai dengan 5% setahun	<i>Turn over</i> pegawai bertalenta antara 5% sampai dengan 10% setahun	<i>Turn over</i> pegawai bertalenta antara 10% sampai dengan 15% setahun	<i>Turn over</i> pegawai bertalenta >15% setahun
Risiko Sistem Infrastruktur Teknologi dan Keamanan Siber					
Gangguan aplikasi infrastruktur pendukung	Aplikasi & Infrastruktur pendukung yang kurang penting tidak berfungsi selama 1 hari	Aplikasi dan Infrastruktur pendukung yang kurang penting tidak berfungsi selama lebih dari 1 hari s/d 3 hari	Infrastruktur vital yang penting tidak berfungsi selama < 1 jam (misalkan Listrik, air, jaringan komunikasi & <i>online system</i>)	Infrastruktur vital yang penting tidak berfungsi selama 2 s/d 6 jam (misalkan Listrik, air, jaringan komunikasi & <i>online system</i>)	Infrastruktur vital yang penting tidak berfungsi selama lebih dari 6 jam (misalkan Listrik, air, jaringan komunikasi & <i>online system</i>)
Serangan siber	Jumlah rata-rata serangan siber per minggu di bawah 50 kali	Jumlah rata-rata serangan siber per minggu 50-99 kali	Jumlah rata-rata serangan siber per minggu 100-199 kali	Jumlah rata-rata serangan siber per minggu 200-500 kali	Jumlah rata-rata serangan siber per minggu lebih dari 500 kali
Penurunan hasil penilaian <i>platform security</i>	$X > 90\%$	$90\% \geq X > 80\%$	$80\% \geq X > 70\%$	$70\% \geq X > 60\%$	$X \leq 60\%$
Risiko Operasional					
Pelampauan pemenuhan SLA (<i>Service Level Agreement</i>)	< 1% dari standard SLA yang telah ditetapkan (diukur dari waktu kekosongan atau ketidaksediaan layanan produk atau tambahan biaya / ongkos)	Dari 1% s/d 2,5% dari standard SLA yang telah ditetapkan (diukur dari waktu kekosongan atau ketidaksediaan layanan produk atau tambahan biaya / ongkos)	Antara 2,5% s/d 10% dari standard SLA yang telah ditetapkan (diukur dari waktu kekosongan atau ketidaksediaan layanan produk atau tambahan biaya / ongkos)	Antara 10% s/d 20% dari standard SLA yang telah ditetapkan (diukur dari waktu kekosongan atau ketidaksediaan layanan produk atau tambahan biaya / ongkos)	>20% dari standard SLA yang telah ditetapkan (diukur dari waktu kekosongan atau ketidaksediaan layanan produk atau tambahan biaya / ongkos)
Risiko Health, Safety, Security and Environmental (HSSE) dan Sosial					
<i>Fatality</i>	Kasus Pertolongan Pertama	Kasus Perawatan Medis	Cacat tidak tetap / Ketidakhadir-an kerja yang terbatas	Kasus kematian tunggal / Cacat tetap / Ketidakhadir-an kerja yang lama	Kasus kematian jamak
	Tidak berpengaruh pada Kinerja Kerja	Efek kesehatan minor dan reversibel (tanpa rawat inap)	Efek ireversibel tanpa kehilangan nyawa tetapi dengan cacat serius	Efek ireversibel yang menyebabkan kematian	Wabah ke lingkungan

Risiko	Skala				
	1	2	3	4	5
	Sangat Rendah	Rendah	Moderat	Tinggi	Sangat Tinggi
			dan rawat inap berkepanjangan		
					Potensi menyebabkan banyak kematian misalnya bahan kimia beracun berbahaya
Kerusakan Lingkungan	Kerusakan terbatas pada area minimal dengan signifikansi rendah	Efek minor pada lingkungan biologis atau fisik	Efek jangka pendek (1-2 tahun) tetapi tidak mempengaruhi fungsi ekosistem	Efek lingkungan jangka menengah (3-5 tahun) yang serius	Kerusakan lingkungan jangka panjang (>5 tahun) dari fungsi ekosistem
Penurunan ESG rating Sustainalytic	$X > 90\%$ atau memperoleh rating "0-10	$90\% \geq X > 80\%$ atau memperoleh rating "10-20	$80\% \geq X > 70\%$ atau memperoleh rating "20-30	$70\% \geq X > 60\%$ atau memperoleh rating "30-40	$X \leq 60\%$ atau memperoleh rating "40+ "

Tabel 6. 9 Kriteria Dampak Risiko

Kriteria Kemungkinan

Parameter	Skala				
	1	2	3	4	5
	Sangat Jarang Terjadi	Jarang Terjadi	Bisa Terjadi	Sangat Mungkin Terjadi	Hampir Pasti Terjadi
Kemungkinan terjadi	Risiko mungkin terjadi sangat jarang, paling banyak satu kali dalam setahun	Risiko mungkin terjadi hanya sekali dalam 6 bulan	Risiko pernah terjadi namun tidak sering, sekali dalam 4 bulan	Risiko pernah terjadi sekali dalam 2 bulan	Risiko pernah terjadi sekali dalam 1 bulan
Frekuensi kejadian	< 1 permil dari frekuensi kejadian / jumlah transaksi	Dari 1 permil s/d 1% dari frekuensi kejadian / jumlah transaksi	Diatas 1% s/d 5% dari frekuensi kejadian / jumlah transaksi	Diatas 5 s/d 10% dari frekuensi kejadian / jumlah transaksi	> 10% dari frekuensi kejadian / jumlah transaksi
Persentase	Probabilitas kejadian Risiko di bawah 20%	Probabilitas kejadian Risiko dari 20% sampai dengan 40%	Probabilitas kejadian Risiko antara 40% sampai dengan 60%	Probabilitas kejadian Risiko antara 60% sampai dengan 80%	Probabilitas kejadian Risiko antara 80% sampai dengan 100%

Tabel 6. 10 Kriteria Kemungkinan Risiko

Level Risiko

PELUANG	5 Hampir Pasti Terjadi	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	4 Sangat Mungkin Terjadi	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
	3 Bisa Terjadi	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
	2 Jarang Terjadi	Sangat Rendah	Rendah	Rendah	Tinggi	Sangat Tinggi
	1 Sangat Jarang Terjadi	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Sangat Tinggi
		1 Tidak Berarti	2 Ringan	3 Sedang	4 Besar	5 Kritikal
DAMPAK						

Gambar 6 Heatmap Peta Risiko Perusahaan

BAB VII ASPIRASI PEMEGANG SAHAM

Bab ini menguraikan aspirasi pemegang saham kepada Perum LKBN Antara berdasarkan Surat Kementerian BUMN Nomor S-491/MBU/09/2023 tanggal 29 September 2023 tentang Aspirasi Pemegang Saham untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2024, sebagai berikut:

1. Aspirasi Pemegang Saham Dalam Fungsi Keuangan, Manajemen Risiko, SDM, Teknologi Informasi, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

1.1 Fungsi Keuangan

- a. Audit atas laporan keuangan dan pelaksanaan *Audit Upon Procedure (AUP)* direncanakan selesai pada bulan Februari 2024 sebagaimana harapan para pemegang saham pada APS.
- b. Pemegang saham juga berharap agar seluruh BUMN dapat meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan dengan ketentuan minimum opini auditor terhadap laporan keuangan audited BUMN pada level Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Berdasarkan data di beberapa tahun terakhir, Perum LKBN Antara selalu mendapatkan opini WTP.
- c. Pengungkapan besaran biaya jasa audit dan jasa non audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik yang sama disampaikan di dalam laporan tahunan sesuai arahan pada APS.
- d. Perum LKBN Antara berupaya seoptimal mungkin mengadopsi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 9 Tahun 2023 untuk poin-poin yang relevan yaitu tentang peran komite audit, pembatasan penggunaan jasa audit, ruang lingkup audit, dan independensi AP dan KAP terhadap Pihak.
- e. Sementara itu, Perum LKBN Antara telah menyesuaikan sejumlah target keuangan dengan aspirasi pemegang saham sebagaimana berikut:
 - a) *Ekspansi berkesinambungan* yang diukur dengan:
 1. Ekspansi EBITDA dan CFO (*Cash Flow from Operation*). Pada tahun 2024, arus kas operasi sebesar Rp 24,54 miliar, sementara EBITDA mengalami penurunan dari Rp 47,78 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp 37,78 miliar pada tahun 2024 atau turun sebesar 21% akibat aksi korporasi yaitu, peralihan peserta Dapen Perum LKBN Antara ke DPLK yang memerlukan biaya sekitar Rp 34 miliar. Aksi korporasi ini merupakan tindak lanjut implementasi roadmap Dapen Antara berdasarkan hasil kajian uji tuntas sesuai arahan KBUMN. Jika program Dana Pensiun dilanjutkan, maka Perusahaan akan terbebani iuran tambahan dan iuran pemberi kerja sebesar Rp 19 miliar pada tahun 2024 dan akan terus naik menjadi Rp 36 miliar pada tahun 2030. Aksi korporasi ini menyebabkan beban Perusahaan meningkat menjadi Rp 34 miliar pada tahun 2024, akan tetapi pada periode selanjutnya, beban Perusahaan hanya akan menjadi sekitar Rp 4 miliar per tahun, sebab Perusahaan hanya akan membayar iuran normal tanpa iuran tambahan. Berdasarkan aksi korporasi yang akan dilakukan dari tahun 2024 hingga 2030, Perusahaan dapat berhemat lebih dari Rp 100 miliar.
 2. *Net Profit* dengan target pada 2024 sebesar Rp 12,13 miliar.
 - b) Pada tahun ini, Perum LKBN Antara ditargetkan memenuhi aspirasi pemegang saham dengan nilai ROIC yang lebih besar dari WACC, Perbandingan *return on invested capital* (ROIC) dengan *weighted average cost of capital* (WACC) adalah 4.51%:8.62%.

- c) Aspirasi pemegang saham mengharapkan BUMN untuk secara bertahap dan jangka panjang dapat mempertahankan rasio keuangan yang sehat dengan peringkat *investment grade* seperti *financing debt to invested capital* pada kisaran 13.82% dan *financing debt to EBITDA* 1.57 kali.
- f. Sesuai dengan PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, untuk penilaian Tingkat Kesehatan BUMN, Dewan Pengawas berdasarkan evaluasi Komite Audit menunjuk Perusahaan Pemeringkat untuk melakukan pemeringkatan (*corporate rating*) dalam rangka penilaian Tingkat Kesehatan BUMN. Perum LKBN Antara diharapkan memperoleh tingkat Kesehatan minimal BBB (Sehat) dan akan menyampaikan hasil pemeringkatan kepada Kementerian BUMN selambat-lambatnya Mei 2024 sesuai arahan KBUMN.
- g. Perum LKBN Antara selalu mengikutsertakan Kementerian BUMN dalam pembahasan perencanaan penugasan dan mengusulkan penetapan penugasan dalam RUPS RKAP, sesuai dengan Undang Undang BUMN Nomor 19 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005.

1.2 Fungsi Manajemen Risiko

1. Strategi Risiko dan Perencanaan Risiko dalam Penyusunan RKAP 2023:

- a) Penyusunan RKAP 2024 Perum LKBN Antara berbasis manajemen risiko sesuai dengan strategi risiko yang disusun sebagaimana ketentuan pada bagian "C". Kebijakan Strategi Risiko Kementerian BUMN sebagaimana yang tertera pada APS.
- b) Keputusan dalam menetapkan pilihan sasaran dan strategi yang diusulkan dalam rancangan RKAP 2024 dilengkapi dengan pertimbangan berdasarkan hasil perhitungan antara risiko yang dapat diterima dengan hasil yang ditargetkan dapat diperoleh oleh perusahaan sebagaimana kebijakan strategi risiko BUMN.
- c) Target yang diusulkan dalam RKAP 2024 telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Target disusun berdasarkan nilai yang paling optimal sesuai dengan penerimaan risiko dalam strategi Risiko.
 - 2. Target yang diusulkan pada RKAP 2024 telah memberikan perlindungan dan penciptaan nilai bagi BUMN serta dapat direalisasikan dengan melindungi dari risiko yang tidak dapat diterima oleh Perusahaan.
 - 3. Target tersebut telah memperhitungkan risiko (*risk adjusted target*), Ketidaktercapaian target pada akhir tahun 2024 sepenuhnya merupakan tanggung jawab Direksi dalam melakukan pengurusan perusahaan dan Dewan Pengawas dalam melakukan pengawasan, kecuali yang disebabkan oleh suatu risiko yang semua perusahaan dalam industri tersebut terdampak.
 - 4. Perlakuan dan pengendalian risiko yang akan dilaksanakan untuk menurunkan risiko yang dapat diterima telah dimasukkan sebagai program kegiatan dan anggaran dalam RKAP 2024.
- d) Strategi dan target yang diusulkan dalam RKAP 2024, disusun berdasarkan profil risiko, perhitungan risiko, rencana perlakuan risiko dan peta risiko dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Profil risiko memuat informasi paling sedikit: (i) sasaran, (ii) strategi, (iii) taksonomi risiko, (iv) peristiwa risiko, (v) penyebab risiko, (vi) Key Risk Indicator (KRI), dan (vii) threshold KRI dalam 3 (tiga) kategori yaitu batas bahaya, batas hati-hati, dan batas aman sebagai early warning signal, (viii) kontrol saat ini (existing control) dan penilaian efektivitas kontrol, (ix) dampak risiko, dan (x) perkiraan waktu terjadinya eksposur risiko.

2. Perhitungan risiko pada RKAP 2024 terdiri dari risiko inheren dan risiko residual, memuat informasi paling sedikit: (i) peristiwa risiko, (ii) kuantifikasi risiko inheren, dan (iii) kuantifikasi risiko residual.
 - a) Nilai risiko inheren dan risiko residual terdiri dari: (i) eksposur risiko, (ii) skala risiko, dan (iii) level risiko.
 - b) Perhitungan eksposur risiko pada RKAP 2024 Perum LKBN Antara terdiri dari:
 - i. Eksposur risiko kuantitatif dihasilkan dari perkalian nilai dampak kuantitatif berupa nilai rupiah atau mata uang fungsional pembukuan atas Dampak langsung dan/atau tidak langsung secara finansial terhadap pencapaian target keuangan, dikali dengan nilai Probabilitas (%).
 - ii. Eksposur risiko kualitatif dihasilkan dari perkalian skor Risiko (berupa penilaian skala dampak dikali dengan 1% dari batasan risiko/*risk limit* level *enterprise*/korporat yang ditetapkan dalam strategi Risiko), dikali dengan nilai Probabilitas (%).
 - c) Perhitungan skala risiko menggunakan kriteria skala dampak dan skala probabilitas sebagaimana ketentuan dalam Petunjuk Teknis mengenai Proses Manajemen Risiko dan Agregasi pada Taksonomi Risiko Portofolio BUMN, Untuk kepentingan internal perusahaan dalam rangka pemantauan dan evaluasi risiko yang lebih mendalam, RKAP 2024 telah menetapkan kriteria Skala Dampak dan Skala Probabilitas yang berbeda dengan acuan pada Petunjuk Teknis tersebut.
 - d) Perhitungan level risiko menggunakan hasil pemetaan dengan skala risiko sebagaimana arahan pada APS KBUMN.
 - e) Hasil kuantifikasi risiko inheren disajikan paling sedikit memuat: (i) asumsi perhitungan dampak, (ii) nilai dampak rupiah atau mata uang fungsional pembukuan untuk risiko kuantitatif atau nilai skor risiko untuk risiko kualitatif, (iii) skala dampak, (iv) skala probabilitas, (v) eksposur risiko, (vi) skala risiko, dan (vii) level risiko.
 - f) Hasil kuantifikasi risiko residual disajikan dalam target triwulan paling sedikit memuat: (i) target nilai dampak tiap triwulan, (ii) target skala dampak tiap triwulan, (iii) target nilai probabilitas tiap triwulan, (iv) target skala probabilitas tiap triwulan, (v) target eksposur risiko tiap triwulan, (vi) target skala risiko tiap triwulan, dan (vii) target level risiko tiap triwulan.
 - g) Penjabaran target risiko residual triwulan pada RKAP 2024 berdasarkan sifat dan karakter setiap risiko seperti ditinjau dari estimasi waktu terjadinya (*one shot* atau *continuous*).
3. Rencana perlakuan risiko pada RKAP 2024 disusun untuk menurunkan tingkat risiko sesuai dengan target risiko residual, yang memuat informasi paling sedikit: (i) opsi perlakuan risiko dengan pilihan *accept/monitor*, *reduce/mitigate*, *transfer/sharing*, (ii) kegiatan rencana perlakuan risiko, (iii) jenis program kegiatan di dalam RKAP, (iv) *output* kegiatan perlakuan risiko, (v) anggaran biaya perlakuan risiko, (vi) pejabat yang bertanggung jawab, (vii) *timeline* pelaksanaan kegiatan perlakuan risiko.
4. Peta risiko memuat informasi posisi risiko inheren dan posisi risiko residual dalam pemetaan warna skala hasil kalibrasi antara skala probabilitas dengan skala dampak yang mengacu pada *heatmap* sebagaimana tercantum pada APS.

- e) Penyusunan atas rencana audit intern Manajemen Risiko di Perum LKBN Antara disusun berdasarkan ketentuan pada APS, sebagai berikut:
- 1) Perencanaan audit disusun berdasarkan risiko (*risk based audit*) yang dilakukan secara terintegrasi dalam tata kelola tiga lini (*three lines model*) dan telah melalui pengumpulan serta analisis input yang berasal dari: (i) Direksi dan Dewan Pengawas, (ii) sasaran dan strategi dalam rancangan RKAP, (iii) regulasi dan ketentuan sektoral, (iv) temuan audit tahun sebelumnya, (v) profil risiko BUMN dan anak perusahaan, (vi) catatan kejadian kerugian (*loss event database*), (vii) data lain yang relevan.
 - 2) Perencanaan audit memuat informasi paling sedikit: (i) jenis penugasan (audit, umum, audit tematik, audit *mandatory* oleh regulator, audit anak perusahaan, *consulting*, atau jenis audit lainnya), (ii) subjek audit, (iii) objek audit, (iv) ruang lingkup audit, (v) strategi audit, (vi) sumber daya yang digunakan, (vii) jadwal audit.
 - 3) Perencanaan audit mencakup penyelarasan dengan perencanaan audit anak perusahaan secara terintegrasi yang tidak terbatas pada penentuan strategi pelaksanaan audit dan perumusan prinsip audit serta metodologi langkah pelaksanaan pengendalian mutu audit.
 - 4) Laporan audit intern disampaikan kepada Kementerian BUMN dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Laporan audit intern yang menjadi bagian dari laporan manajemen hanya memuat ringkasan informasi berupa statistik temuan, tindak lanjut, dan status penyelesaiannya.
 - b) Laporan Audit Intern yang disampaikan secara tersendiri atau terpisah dari laporan manajemen memuat seluruh informasi yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis mengenai Pelaporan Manajemen Risiko dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama, Hal ini dimaksudkan agar informasi yang bersifat rahasia atau informasi yang hanya diperuntukkan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak tertentu tidak disalahgunakan oleh pembaca laporan manajemen.
- f) Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, BPKP dan KAP ditindaklanjuti serta laporan atas perkembangan tindak lanjut rekomendasi disampaikan kepada Kementerian BUMN c.q Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko yang merupakan bagian dari Laporan Audit Intern sebagaimana tercantum pada APS.

2. KPI Fungsi Manajemen Risiko Dalam RKAP 2024

- a. Perum LKBN Antara sudah memasukkan penguatan penerapan manajemen risiko ke dalam KPI Direksi kolegiat dan indikator.
- b. Indikator KPI sebagaimana diatas, yaitu Rasio Pemenuhan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko dan Implementasi Roadmap Perbaikan Penerapan Manajemen Risiko sudah dimasukkan ke dalam KPI 2024 sesuai dengan ketentuan dan arahan pada APS 2024.

3. Penilaian Indeks Kematangan Risiko (Risk Maturity Index) dan Pelaporan

- a. Penilaian indeks kematangan risiko (*Risk Maturity Index/”RMI”*) tahun 2024 atas tahun buku 2023 dilakukan setelah angka audit tahun buku 2023 diterbitkan oleh KAP, Hasil penilaian RMI disampaikan kepada Kementerian BUMN paling lambat pada triwulan III tahun 2024 dan pelaksanaan rekomendasi hasil penilaian RMI tahun 2024 tersebut dijadikan sebagai bagian dari roadmap perbaikan penerapan manajemen risiko yang dijalankan pada RKAP tahun berikutnya sesuai arahan pada

APS 2024.

- b. Pelaporan manajemen risiko, audit intern dan tata kelola terintegrasi disampaikan kepada Kementerian BUMN secara berkala mengikuti ketentuan dalam Petunjuk Teknis mengenai Pelaporan Manajemen Risiko.

4. Pemenuhan Kelengkapan Data Manajemen Risiko Dalam Pengesahan RKAP 2024

- a. Seluruh informasi pada bagian “C, Kebijakan Strategi Risiko Kementerian BUMN” dan bagian “H, Aspirasi Pemegang Saham Fungsi Manajemen Risiko” di atas dimuat di dalam Bab Manajemen Risiko pada dokumen RKAP Perum LKBN Antara tahun 2024.
- b. Data softfile (dalam format Excel) atas metrik strategi risiko, pilihan sasaran dan strategi, profil risiko, perhitungan risiko, rencana perlakuan risiko, dan peta risiko disampaikan kepada Kementerian BUMN sesuai ketentuan pada APS.

1.3 Fungsi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

- a. Berdasarkan arahan pada APS 2024, pelaksanaan program TJSL Perum LKBN Antara sejalan dengan *fiduciary duty* Direksi dalam memenuhi harapan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu dalam perencanaan program TJSL, Antara berupaya menelaraskan beberapa hal berikut sesuai dengan ketentuan pada APS:
 - a. Pelaksanaan TJSL 2024 memperhatikan identifikasi risiko perusahaan dan mengakomodir risiko yang dapat diatasi dengan strategi TJSL.
 - b. Ruang lingkup Program TJSL terdiri dari 7 (tujuh) Subjek Inti (ref: SNI ISO 26000:2010) yaitu Tata Kelola Organisasi, Hak Asasi Manusia, Praktik Perburuhan, Lingkungan, Praktik Operasi Yang Adil, Isu Konsumen, Pelibatan dan Pengembangan Komunitas.
 - c. Antara secara konsisten melaksanakan transformasi TJSL meliputi fokus pada dampak, peningkatan tata kelola, pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kolaborasi dan *engagement* karyawan.
 - d. Antara belum memiliki program terkait penyaluran dana Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) berdasarkan penunjukan oleh KBUMN, namun program terkait pembinaan terhadap UMK sudah dilakukan, Disamping itu, tetap mengupayakan pelaksanaan penagihan dan penyelesaian Piutang Bermasalah Pendanaan UMK jika ada.
- b. Pelaksanaan Program TJSL telah ditambahkan pada KPI Direksi individual sebagaimana arahan pada APS dengan mengacu pada 7 (tujuh) Subjek Inti, Berikut uraian atas KPI Pelaksanaan Program TJSL:

No	Indikator	Target	Bobot
1	Melakukan pengukuran dampak terhadap program TJSL dengan menggunakan metode <i>Social Return On Investment</i> (SROI).	Minimal 3 (tiga) program yang diukur dampaknya dengan metode SROI dimana salah satu dari program yang diukur adalah Program <i>Creating Shared Value</i> (CSV).	20%

2	Kebijakan <i>levelling</i> fungsi yang membidangi <i>Sustainability/ESG</i> setingkat BOD-1.	Adanya Fungsi <i>Sustainability/ESG</i> pada pejabat setingkat BOD-1.	20%
3	Pemenuhan pengisian data dalam sistem informasi TJSL Kementerian BUMN.	Terpenuhinya data pelaporan program TJSL yang valid, lengkap dan tepat waktu.	20%
4	Meningkatkan kolaborasi antar BUMN maupun dengan pihak lain yang sesuai kompetensinya dalam pelaksanaan program TJSL, dengan tujuan untuk meningkatkan dampak positif.	Masing-masing minimal 1 (satu) program kolaborasi pada setiap bidang prioritas (Pendidikan, Lingkungan, dan Pengembangan UMK).	20%
5	Melibatkan peran serta karyawan secara aktif dalam program TJSL.	Setiap karyawan terlibat dalam minimal 1 kegiatan sosial kemasyarakatan baik yang berasal dari BUMN maupun dari luar BUMN.	20%

PER-01/MBU/03/2023 menyatakan bahwa Program TJSL BUMN adalah kegiatan yang merupakan komitmen dan bakti BUMN terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis Perusahaan.

1.4 Fungsi Sumber Daya Manusia

- a. Perum LKBN Antara berupaya meningkatkan produktivitas tenaga kerja secara berkelanjutan, dimana aspek ini menjadi salah satu KPI Direktur yang membidangi fungsi SDM untuk tahun kinerja 2024.
- b. Perum LKBN Antara secara konsisten mengimplementasikan program *Talent Management* di Induk dan Anak-Anak Perusahaan (*holding* dan *subholding*), antara lain sebagai berikut:
 - a. *Talent Development*
 - b. *Career Path*
 - c. *Job Grading*
 - d. *Performance Management*
- c. Implementasi program Perputaran Talenta (*Talent Mobility*) dengan ketentuan yang berlaku, baik di lingkungan internal BUMN Grup atau lintas BUMN/Klaster telah dimasukkan ke dalam program kerja 2024.
- d. Sesuai dengan aspirasi pemegang saham untuk rencana kerja 2024, Perum LKBN Antara telah mempunyai blueprint pemenuhan amanat undang-undang tentang penyandang disabilitas yang telah disampaikan dalam RJPP 2020-2024, Hingga 2023, Perusahaan telah mempekerjakan talenta disabilitas sebanyak 9 orang.
- e. Perum LKBN Antara terus berkomitmen dalam melaksanakan pemenuhan kuantitas dan kualitas data berikut:
 - a. Pembaharuan data sesuai yang tercantum pada APS melalui Portal HC Kementerian BUMN.
 - b. Pembaharuan data pada Dashboard HCIS FHCI.

Pemenuhan kuantitas dan kualitas data diatas dimasukkan dalam program kerja 2024.

- f. Indikator Pengembangan Talenta dalam KPI Direksi Kolegial dihitung berdasarkan arahan pada APS KBUMN sebagai berikut:

No	Indikator	Formul	Target
1	Rasio talenta perempuan* dalam Nominated Talent BIUMN	$\frac{\text{Jumlah Nominated Talent Perempuan}}{\text{Jumlah Nominated Talent}} \times 100\%$	Target yang ditetapkan untuk masing-masing rasio di atas minimal lebih tinggi dari realisasi tahun sebelumnya dengan tetap memperhatikan karakteristik kluster,
2	Rasio talenta muda** dalam Nominated Talent BUMN	$\frac{\text{Jumlah Nominated Talent Muda}}{\text{Jumlah Nominated Talent}} \times 100\%$	

Talenta perempuan yang dimaksud adalah BOD-1 perempuan dalam *Nominated Talent* BUMN yang diusulkan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN kepada *Cluster Talent Committee*

** Talenta muda yang dimaksud adalah BOD-1 usia ≤ 42 tahun dalam *Nominated Talent* BUMN yang diusulkan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN kepada *Cluster Talent Committee*

- g. Usulan Penghasilan/ Remunerasi Tahun 2024 bagi Direksi dan Dewan Pengawas Tahun 2024 sesuai dengan arahan pada APS, sebagai berikut:
- Disampaikan oleh Dewan Pengawas kepada Menteri BUMN selambat-lambatnya sebelum RUPS pengesahan Laporan Tahunan 2023, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Diutamakan menggunakan hasil kajian internal Perusahaan, atau kolaborasi antar BUMN/kluster.
 - Prinsip Penganggaran Tantiem/Inisiatif Kinerja:
 - Dapat dilakukan jika BUMN tersebut menargetkan *eligible* atau memenuhi persyaratan untuk mendapatkan tantiem/insentif kinerja sebagaimana ketentuan Pasal 102 angka (1) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023.
 - Harus dilakukan secara wajar yaitu selaras dengan *financial direction* (kenaikan/penurunannya terhadap *actual/prognosa* tantiem tahun berjalan maksimal sebesar kenaikan/penurunan target *net income* (untuk BUMN *financial services*) atau kenaikan/penurunan target EBITDA (untuk BUMN *non financial services*).
 - Harus tercantum secara eksplisit di dalam RKAP BUMN dan tidak tergabung/*blended* ke dalam mata anggaran yang lain.
 - Respectful Workplace Policy* (RWP) telah diimplementasikan Perusahaan sejak tahun 2022 secara konsisten dan konsekuen sesuai ketentuan yang berlaku.
 - Human Capital Maturity Assesmet* telah dilaksanakan pada TWIII tahun 2023 dan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil assessment direncanakan pada tahun 2024.
 - Perusahaan terus berupaya melakukan pengelolaan praktik bisnis yang berkelanjutan, menyeimbangkan antara kepentingan perusahaan dengan kesejahteraan karyawan, serta membangun hubungan industrial yang harmonis, termasuk di antaranya penyelarasan Perjanjian Kerja Bersama antar Anak Perusahaan.
 - Perusahaan telah mengimplementasikan AKHLAK *Culture Journey* sejak tahun 2020 dan masih terus berlanjut. Penerapan implementasi AKHLAK *Culture Journey* di Perusahaan dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-115/MBU/05/2022 tentang Pedoman Implementasi Nilai-Nilai Utama Sumber Daya Manusia BUMN AKHLAK *Culture Journey*).

1.5 Fungsi TI

- a. Perum LKBN Antara menetapkan Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) selaras dengan kebutuhan Perusahaan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dan peraturan lain yang berlaku serta menyampaikan progres pelaksanaan program dalam Laporan Manajemen Triwulanan dan Tahunan.
- b. Evaluasi atas efektivitas penyelenggaraan Teknologi Informasi (TI) disampaikan pada Laporan Manajemen Triwulanan dan Tahunan, termasuk progres tindak lanjut (rekomendasi/*area of improvement*) atas penilaian maturitas TI (*IT Maturity Level*) dan/atau hasil audit atas penyelenggaraan TI.
- c. Perusahaan telah merencanakan keikutsertaan Program *Digital Talent* BUMN dengan target peserta minimal sebesar 20% pada tahun 2024 yang merupakan akumulasi target dari tahun 2022-2024 dari jumlah keseluruhan SDM perusahaan (organik dan non organik) termasuk anak dan cucu Perusahaan. Selanjutnya, Perusahaan berencana menyusun rencana implementasi digital talent berdasarkan kebutuhan pengembangan kompetensi digital SDM yang sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.
- d. Perusahaan terus mengembangkan budaya inovasi dan sudah memulai kolaborasi riset dan inovasi dengan Perguruan Tinggi pada tahun 2023 berdasarkan aspek kemanfaatan terhadap dukungan atas core business Perusahaan.
- e. Pelaksanaan profiling keamanan siber di Perum LKBN Antara terus ditingkakan dengan memastikan kesiapan SDM, proses, dan infrastruktur teknologi pendukung keamanan siber, Dalam penyelenggaraan teknologi informasi dan pemrosesan informasi. BUMN wajib memperhatikan keamanan siber sesuai dengan prinsip utama keamanan informasi, meliputi kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*) serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keamanan siber sebagaimana arahan pada APS dan dituangkan di dalam IT Master Plan.
- f. Hasil asesmen INDI 4.0 ditindaklanjuti sebagaimana ketentuan pada APS. Laporan hasil implementasi atau rencana dan pemenuhan gap sebagaimana dimaksud disampaikan ke KBUMN melalui Laporan Manajemen Triwulanan dan Tahunan.

1.6 Fungsi Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

- a. Perum LKBN Antara melakukan penyusunan atas rencana upaya tindak lanjut terhadap rekomendasi audit kepatuhan baik yang masih merupakan temuan berulang maupun temuan baru yang memerlukan langkah-langkah penyelesaian.
- b. Perum LKBN Antara berupaya melakukan penanganan permasalahan hukum antar/terkait BUMN/anak perusahaan BUMN/perusahaan yang terafiliasi dengan mengedepankan proses mediasi sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/03/MBU/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. Gugatan hukum pada tahun 2022 mengenai gugatan terhadap berita dan pengajuan mediasi dari Serikat Pekerja untuk permasalahan HI sudah diselesaikan dengan mengedepankan proses mediasi sebagaimana dimaksud. Selama tahun 2023, Perum LKBN Antara tidak memiliki gugatan hukum apapun.
- c. Sesuai dengan arahan pada APS, Perusahaan menentukan sendiri parameter pencapaian atas penyelesaian permasalahan hukum antar/terkait BUMN/anak perusahaan BUMN/perusahaan yang terafiliasi baik yang masih berproses di tahun berjalan maupun yang ditargetkan penyelesaiannya di tahun berikutnya. Dalam hal penyelesaiannya tidak

- sesuai dengan target yang ditetapkan, Perusahaan akan melaporkan perkembangannya kepada pemegang saham beserta target baru penyelesaian permasalahan tersebut.
- d. Perum LKBN Antara berpartisipasi dan mendukung proses pengembangan Portal Aset BUMN yang sedang dikembangkan oleh Kementerian BUMN baik melalui penginputan maupun *updating* data sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang ditetapkan dan sesuai dengan keadaan di lapangan, serta memberikan dukungan lain yang diperlukan dalam pengembangan Portal Aset BUMN sebagaimana tercantum pada APS.
 - e. Perum LKBN Antara terus berupaya melakukan percepatan program sertifikasi hak atas tanah dan bangunan yang belum bersertifikat serta melakukan pengamanan aset milik Perusahaan. Selama proses tersebut berlangsung, Perum LKBN Antara berkoordinasi dengan instansi terkait yang memiliki kewenangan terhadap aset tersebut.
 - f. Perum LKBN Antara berupaya agar segera menyelesaikan penyusunan/ penyempurnaan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang diwajibkan oleh Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023 dan PER-2/MBU/03/2023.

1.7 Pengelolaan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)

Untuk tahun 2024, Perum LKBN Antara sudah menyusun program terkait Implementasi tindak lanjut roadmap Dana Pensiun sebagaimana arahan pada APS KBUMN dan rencana tersebut dimasukkan ke dalam KPI tahun 2024. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka penerapan tata kelola yang baik, penerapan manajemen risiko yang efektif, upaya perbaikan dan optimalisasi pengelolaan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dengan program manfaat pasti di lingkungan Perusahaan, serta menjaga tingkat Kesehatan sebagaimana harapan pemegang saham pada APS.

1.8 Arahan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Perum LKBN Antara terus berupaya memaksimalkan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Proses Pengadaan Barang/ Jasa pada proses bisnis perusahaan sesuai dengan Instruksi Presiden (INPRES) No. 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2. Key Performance Indicators (Indikator Kinerja Utama)

No	Indikator	ESG	Satuan	Target	Polaritas	Bobot
I	NILAI EKONOMI UNTUK INDONESIA					50
	Finansial					
1	EBITDA	C	Miliar	37,78	Maximize	7
2	ROIC >= WACC	C	Persentase	-4.11	Maximize	4
3	Interest Bearing Debt to EBITDA	G	Kali	1,57	Minimize	6
4	Interest Bearing Debt to Invested Capital	G	Persentase	13,82	Minimize	4
	Operasional					
5	Peningkatan Produksi Berita Cegah Hoax dalam tahun Pemilu	G	Jumlah Berita	400	Maximize	7
6	Tingkat Keterbacaan Portal antaranews.com	C	Jumlah Pageview	80.000.000	Maximize	7
	Sosial					
7	Peningkatan Kompetensi Jurnalistik	S	Jumlah Peserta	150	Maximize	5

No	Indikator	ESG	Satuan	Target	Polaritas	Bobot
8	Tingkat kelolosan produk berita PSO	S	Persentase	80	Maximize	10
II	INOVASI MODEL BISNIS					15
9	Pelaksanaan Monetasi Aset Perusahaan	C	Miliar	6M	Maximize	3
10	<i>Sustainability AETP</i> melalui penambahan jumlah transaksi	C	Persentase	15	Maximize	5
11	Sinergi Bisnis antar Anggota Klaster	G	Jumlah Sinergi	1	Maximize	3
12	Implementasi <i>Roadmap</i> Perbaikan Penerapan Manajemen Risiko	C	Persentase	100	Maximize	4
III	KEPEMIMPINAN TEKNOLOGI					13
13	Penyelesaian Gap INDI 4.0	G	Persentase	25	Maximize	6
14	Penerapan ERP di Perusahaan	G	Persentase	75	Maximize	7
IV	PENINGKATAN INVESTASI					7
15	Pengembangan Infrastruktur Aset Digital (Antara Media Sosial)	C	Persentase	15	Maximize	3
16	Persentase Penyerapan Investasi	C	Persentase	70	Maximize	4
V	PENGEMBANGAN TALENTA					15
17	Rasio Top Talent Muda (≤ 42 tahun) dalam <i>nominated talent</i>	S	Persentase	30	Maximize	3
18	Rasio perempuan dalam <i>nominated talent</i>	S	Persentase	30	Maximize	3
19	Rasio Pemenuhan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko (Rasio Kualifikasi)	S	Persentase	90	Maximize	5
20	Implementasi tindak lanjut roadmap Dana Pensiun	G	Persentase	50	Maximize	4
	TOTAL					100

Tabel 7.1 KPI Perum LKBN Antara Tahun 2024

Glossary KPI

Tabel 7.2 Glossary KPI Antara 2024

I. Perspektif Ekonomi Untuk Indonesia

1. EBITDA

Indikator I.1 (Finansial)	Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia
Nama KPI	EBITDA
Definisi KPI	Indikator yang menggambarkan kemampuan Perusahaan yang dilihat dari pendapatan diterima sebelum pengurangan bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi
Tujuan KPI	Untuk mengetahui laba Perusahaan sebelum ada pengurangan bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi
Satuan yang Digunakan	Milyar Rp
Formula Penilaian	EBITDA = Operating Income + Depreciation Expenses + Amortization Expenses + Gain (loss) on Forex + Income from Associated Entities and Joint Venture

Target Tahunan dan Triwulanan	Tahunan: 37.78 M TWI: 12.03M TWII: 21.41M TWIII: 35.49M TWIV: 37.78M
Polaritas	Maximize
Penanggungjawab KPI	Direksi
Pengelola Data KPI	Divisi Keuangan
Sumber Data	Laporan keuangan tahunan
Jenis Pengukuran	Realisasi nilai dari EBITDA tahun berjalan
Keterangan	<p>EBITDA (Optimis+Dapen) 2024: Rp 37,78M EBITDA (Optimis) 2024: 59,27M EBITDA 2023p: 47,78M</p> <p>1. Memenuhi kualifikasi lebih baik dari tahun sebelumnya, apabila disandingkan dengan RKAP tanpa adanya program pengalihan Dapen ke DPLK.</p> <p>2. EBITDA mengalami penurunan dari Rp 47,78 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp 37.78 miliar pada tahun 2024 atau turun sebesar 21% akibat aksi korporasi yaitu, peralihan peserta Dapen Perum LKBN Antara ke DPLK yang memerlukan biaya sekitar Rp 34 miliar. Aksi korporasi ini merupakan tindak lanjut implementasi roadmap Dapen Antara berdasarkan hasil kajian uji tuntas sesuai arahan KBUMN. Jika program Dana Pensiun dilanjutkan, maka Perusahaan akan terbebani iuran tambahan dan iuran pemberi kerja sebesar Rp 19 miliar pada tahun 2024 dan akan terus naik menjadi Rp 36 miliar pada tahun 2030. Aksi korporasi ini menyebabkan beban Perusahaan meningkat menjadi Rp 34 miliar pada tahun 2024, akan tetapi pada periode selanjutnya, beban Perusahaan hanya akan menjadi sekitar Rp 4 miliar per tahun, sebab Perusahaan hanya akan membayar iuran normal tanpa iuran tambahan. Berdasarkan aksi korporasi yang akan dilakukan dari tahun 2024 hingga 2030, Perusahaan dapat berhemat lebih dari Rp 100 miliar.</p>

2. ROIC dengan tingkat jangka panjang (ROIC > WACC)

Indikator I.2 (Finansial)	Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia
Nama KPI	ROIC dengan tingkat jangka panjang (ROIC > WACC)
Definisi KPI	Economic Value Creation tercipta ketika ROIC > WACC
Tujuan KPI	Untuk mengetahui Nilai Ekonomis (Economic Value Creation) yang diukur dengan parameter tingkat kembalian investasi (Return on Invested Capital atau ROIC) di atas biaya modal tertimbang (Weighed Average Cost of Capital atau WACC) atas modal (atau Invested Capital)
Satuan yang Digunakan	% GAP = ROIC -WACC

Formula Penilaian	<p>Economic value creation (nilai tambah ekonomi) dihitung berdasarkan ekstra kembalian investasi (<i>Return on Invested Capital</i> atau ROIC) di atas biaya modal yang digunakan untuk mendapatkan kembalian investasi tersebut (<i>Weighted Average Cost of Capital</i> atau WACC).</p> <p>ROIC dihitung berdasarkan formula:</p> $ROIC = \frac{\text{Laba Bersih Tahun Berjalan} + \text{Biaya Bunga}}{\text{Invested Capital}}$ <p>WACC dihitung berdasarkan formula:</p> $WACC = \left[\frac{\text{Hutang Pendanaan}}{\text{Invested Capital}} \times \text{Effective Cost of Debt} \right] + \left[\frac{\text{Modal}}{\text{Invested Capital}} \times \text{Cost of Equity} \right]$ <p>Definisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Hutang pendanaan/debt: Total saldo terutang rata-rata Tahun Y-1 dan Tahun Y. Invested Capital = (Hutang Pendanaan Y-1 + Hutang Pendanaan Y)/2 + (Modal Y-1 + Modal Y)/2. Effective Cost of Debt = Weighted Average Cost of Debt x (1-Effective Tax Rate); merupakan rata-rata tertimbang biaya bunga masing-masing BUMN dan komponen ini menunjukkan borrowing capacity masing-masing BUMN. <p>Cost of Debt dihitung dengan mengukur rasio beban bunga terhadap rata-rata utang pendanaan. Cost of Equity dihitung dengan menambahkan 0%-3% di atas Cost of Debt.</p>
Target Tahunan dan Triwulanan	<p>Tahunan: -4.11% TWI: -6.73% TWII: -4.41% TWIII: -1.22% TWIV: -4.11%</p>
Polaritas	Maximize
Penanggungjawab KPI	Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko
Pengelola Data KPI	Divisi Keuangan
Sumber Data	Laporan keuangan tahunan
Jenis Pengukuran	Realisasi nilai dari ROIC tahun berjalan

3. Interest Bearing Debt to EBITDA

Indikator I.3 (Finansial)	Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia
Nama KPI	Interest Bearing Debt to EBITDA
Definisi KPI	Indikator yang menggambarkan kemampuan laba dari aktivitas operasional perusahaan berikut dengan memperhitungkan beban depresiasi/amortisasi/depleksi
Tujuan KPI	Untuk mengukur profitabilitas dari perusahaan dari aktivitas operasional perusahaan
Satuan yang Digunakan	Kali
Formula Penilaian	Total Debt / EBITDA (EBITDA = Operating Income + Depreciation Expenses + Amortization Expenses + Gain (loss) on Forex + Income from Associated Entities and Joint Venture)
Target Tahunan dan Triwulanan	<p>Tahunan: 1.57 Kali TWI: 3.07 Kali TWII: 1.97 Kali TWIII: 1.41 Kali TWIV: 1.57 Kali</p>
Polaritas	Minimize
Penanggungjawab KPI	Direksi

Pengelola Data KPI	Divisi Keuangan
Sumber Data	Laporan keuangan tahunan
Jenis Pengukuran	Realisasi nilai dari EBITDA tahun berjalan

4. Interest Bearing Debt to Invested Capital

Indikator I.4 (Finansial)	Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia
Nama KPI	Interest Bearing Debt to Invested Capital
Definisi KPI	Indikator yang menggambarkan struktur finansial terkait kemampuan modal perusahaan untuk melunasi hutang berbunga
Tujuan KPI	Untuk mengukur kelayakan perusahaan melakukan Investasi menggunakan hutang (berbunga)
Satuan yang Digunakan	Persentase
Formula Penilaian	$\text{Total Debt}/(\text{Total Debt} + \text{Total Equity})$
Target Tahunan dan Triwulanan	Tahunan: 13.82% TWI: 12.8% TWII: 14.1% TWIII: 15.9% TWIV: 13.82%
Polaritas	Minimize
Penanggungjawab KPI	Direksi
Pengelola Data KPI	Divisi Keuangan
Sumber Data	Laporan keuangan tahunan
Jenis Pengukuran	Realisasi nilai dari EBITDA tahun berjalan

5. Peningkatan Produksi Berita Cegah Hoax dalam tahun Pemilu

Indikator I.5 (Finansial)	Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia
Nama KPI	Peningkatan Produksi Berita Cegah Hoax dalam tahun Pemilu
Definisi KPI	Ketercapaian produksi berita untuk memberikan informasi yang mencerahkan baik terkait Pemilu pada khususnya dimana masyarakat mendapatkan berita/informasi yang benar, terverifikasi dan bertanggungjawab
Tujuan KPI	Menciptakan iklim demokrasi yang sehat dengan berita yang objektif dan imparial serta menjadikan Kantor Berita Antara sebagai media penjernih informasi.
Satuan yang Digunakan	Jumlah Berita
Formula Penilaian	Jumlah produksi berita cegah hoax dalam setahun
Target Tahunan dan Triwulanan	Tahunan: 400 berita TWI: 100 berita TWII: 200 berita TWIII: 300 berita TWIV: 400 berita

Polaritas	Maximize
Penanggungjawab KPI	Direktorat Pemberitaan
Pengelola Data KPI	Sekretariat Redaksi
Sumber Data	SP2MT
Jenis Pengukuran	Jumlah produksi berita cegah hoax

6. Tingkat Keterbacaan Portal antaranews.com

Indikator I.6 (Finansial)	Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia
Nama KPI	Tingkat Keterbacaan Portal antaranews.com
Definisi KPI	Jumlah halaman yang dibaca penuh oleh pengunjung pada portal antaranews.com
Tujuan KPI	Untuk melihat daya tarik, daya saing dan relevansi pemberitaan Antara di mata masyarakat
Satuan yang Digunakan	Jumlah Pageview
Formula Penilaian	Jumlah pageview berita Antara dalam 1 tahun
Target Tahunan dan Triwulanan	Tahunan: 80.000.000/tahun TWI: 20.000.000 TWII: 40.000.000 TWIII: 60.000.000 TWIV: 80.000.000
Polaritas	Maximize
Penanggungjawab KPI	Direktorat Pemberitaan
Pengelola Data KPI	Sekretariat Redaksi
Sumber Data	SP2MT
Jenis Pengukuran	Jumlah pageview di antaranews.com

7. Peningkatan Kompetensi Jurnalistik

Indikator 1.7 (Sosial)	Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia
Nama KPI	Peningkatan Kompetensi Jurnalistik
Definisi KPI	Penyelenggaraan pelatihan terkait kompetensi jurnalistik bagi jurnalis muda untuk menghasilkan jurnalis muda yang kompeten, dimana diyakini memiliki dampak sosial lebih besar melalui target peserta yang lebih banyak
Tujuan KPI	Menghasilkan jurnalis muda yang kompeten
Satuan yang Digunakan	Jumlah
Formula Penilaian	Jumlah jurnalis muda yang mengikuti pelatihan sesuai target yang telah ditentukan

Target Tahunan dan Triwulanan	Tahunan: 150 peserta/ tahun TWI: 37 peserta TWII: 74 peserta TWIII: 111 peserta TWIV: 150 peserta
Polaritas	Maximize
Penanggungjawab KPI	Direktorat Utama
Pengelola Data KPI	Sekretariat Perusahaan
Sumber Data	Laporan Manajemen
Jenis Pengukuran	Jumlah jurnalis muda yang mengikuti pelatihan jurnalistik
Keterangan	Pengajuan sebelumnya adalah jumlah wartawan non Antara yang mendapatkan sertifikat uji kompetensi (mengubah KPI sebelumnya, untuk mempersiapkan jurnalis muda/ regenerasi yang kompeten dalam menghadapi era disrupsi sosial media). Tahun 2023 SROI dari penyelenggaraan UKW: 1.83% Tahun 2024 SROI dari penyelenggaraan pelatihan bagi jurnalis muda: 2.0%

8. Tingkat kelolosan produk berita PSO

Indikator 1.8 (Sosial)	Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia
Nama KPI	Tingkat kelolosan produk berita PSO
Definisi KPI	Ketercapaian kelolosan dengan target 80% dari seluruh jenis produk berita PSO dibandingkan dengan target kuota atau jumlah produksi (tidak lebih dari 120% dari kuota PKS)
Tujuan KPI	Meningkatkan kualitas produksi berita terhadap penugasan Pemerintah
Satuan yang Digunakan	Persentase
Formula Penilaian	Jumlah berita PSO yang lolos verifikasi dibandingkan jumlah produksi berita PSO
Target Tahunan dan Triwulanan	Tahunan: 80% TWI: 80% TWII: 80% TWIII: 80% TWIV: 80%
Polaritas	Maximize
Penanggungjawab KPI	Direktorat Pemberitaan
Pengelola Data KPI	Koordinator Biro dan PSO
Sumber Data	SP2MT
Jenis Pengukuran	Ketercapaian kelolosan produksi berita PSO

II. Inovasi Model Bisnis

9. Pelaksanaan Monetasi Aset Perusahaan

Indikator II.9	Inovasi Model Bisnis
Nama KPI	Pelaksanaan Monetasi Aset Perusahaan
Definisi KPI	Pelaksanaan komersialisasi aset Perusahaan untuk meningkatkan pendapatan dan value Perusahaan
Tujuan KPI	Untuk meningkatkan pendapatan dan value Perusahaan
Satuan yang Digunakan	Rupiah
Formula Penilaian	Jumlah pendapatan dari komersialisasi aset Perusahaan
Target Tahunan dan Triwulanan	Tahunan: 6M TWI: Rp 900.000.000 (15%) TWII: Rp 2.100.000.000 (35%) TWIII: Rp 3.900.000.000 (65%) TWIV: Rp 6.000.000.000 (100%)
Polaritas	Maximize
Penanggungjawab KPI	Direksi
Pengelola Data KPI	Divisi Layanan Media&Komunikasi
Sumber Data	Laporan Keuangan
Jenis Pengukuran	Realisasi pendapatan dari komersialisasi aset
Keterangan	Indikator sebelumnya adalah monetasi Nusantara Repository (Antara Eye), namun inovasi Antara Eya masih mengalami kendala terkait aspek Intelektual Properti (IP), yang mana saat ini <i>tracking system</i> untuk IP Antara Eye belum tersedia. Hal ini akan sangat berisiko dengan risiko hilangnya/ tidak termonetasinya jutaan foto karya jurnalistik Antara.

10. Sustainability AETP melalui penambahan jumlah transaksi

Indikator II-10	Inovasi Model Bisnis
Nama KPI	<i>Sustainability AETP</i> melalui penambahan jumlah transaksi
Definisi KPI	Indikator yang menunjukkan penambahan jumlah transaksi di Platfrom Antara ETP
Tujuan KPI	Untuk mengukur tingkat pertumbuhan atau perkembangan bisnis dari Platform Antara ETP
Satuan yang Digunakan	Persentase
Formula Penilaian	$\left(\frac{\text{Jumlah Transaksi tahun 2024} - \text{Jumlah Transaksi Tahun 2023}}{\text{Jumlah Transaksi Tahun 2023}} \right) \times 100\%$
Target Tahunan dan Triwulanan	Tahunan: 15% TWI: 3.75% TWII: 5% TWIII: 10% TWIV: 15%
Polaritas	Maximize

Penanggungjawab KPI	Direktorat Utama
Pengelola Data KPI	Anak Perusahaan Bisnis ETP
Sumber Data	Laporan keuangan tahunan
Jenis Pengukuran	% Kenaikan pertumbuhan transaksional dalam bisnis ETP

11. Sinergi Bisnis antar Anggota Klaster

Indikator II.11	Inovasi Model Bisnis
Nama KPI	Sinergi Bisnis antar Anggota Klaster
Definisi KPI	Sinergi bersama antar anggota klaster dalam bentuk kolaborasi srategis (investasi, produksi, distribusi dan pemasaran).
Tujuan KPI	Memberikan nilai tambah bagi sesama anggota klaster
Satuan yang Digunakan	Jumlah
Formula Penilaian	Jumlah Kerjasama antar klaster
Target Tahunan dan Triwulanan	Tahunan: 1 sinergi dalam setahun TWI:0 sinergi TWII:0 sinergi TWIII:0 sinergi TWIV: 1 sinergi
Polaritas	Maximize
Penanggungjawab KPI	Direksi
Pengelola Data KPI	Divisi TI dan Divisi Layanan Media&Komunikasi
Sumber Data	Daftar Kerjasama
Jenis Pengukuran	Realisasi sinergi antar anggota klaster
Keterangan	Target hanya satu sinergi, dikarenakan <i>landscape</i> bisnis yang berada dalam klaster Danareksa berbeda (berlawanan), bahkan dapat menjadi kompetitor untuk Perum LKBN Antara sendiri.

12. Implementasi Roadmap Perbaikan Penerapan Manajemen Risiko

Indikator II.12	Inovasi Model Bisnis
Nama KPI	Implementasi Roadmap Perbaikan Penerapan Manajemen Risiko
Definisi KPI	Pelaksanaan tindak lanjut dari perbaikan Manajemen Risiko di Perusahaan berdasarkan roadmap yang telah disetujui
Tujuan KPI	Meningkatkan maturitas praktik Manajemen Risiko Perusahaan
Satuan yang Digunakan	Persentase

Formula Penilaian	<p>Terselesaikannya Implementasi Roadmap Perbaikan Penerapan Manajemen Risiko dengan tahapan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi risiko pada Unit Kerja Perusahaan 2. Pengkinian Pedoman dan SOP MR 3. Penyusunan Risk Appetite 4. Sertifikasi Wave 5. Pembentukan Risk Champion 6. Digitalisasi Sistem Informasi MR Terpadu 7. Pelatihan Lanjutan 8. Monitoring KRI 9. Integrasi MR dengan Perencanaan (RKAP dan RJPP) 10. Penerapan Audit Risiko 11. Pengembangan Database Loss Event 12. Evaluasi Maturitas Risiko
Target Tahunan dan Triwulanan	<p>Tahunan: 100% TWI: 25% TWII: 50% TWIII: 75% TWIV: 100%</p>
Polaritas	Maximize
Penanggungjawab KPI	Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko
Pengelola Data KPI	Departemen Manajemen Risiko
Sumber Data	Laporan Manajemen Risiko
Jenis Pengukuran	Pelaksanaan roadmap sesuai target

III. Kepemimpinan Teknologi

13. Penyelesaian Gap INDI 4.0

Indikator III.13	Kepimpinan Teknologi
Nama KPI	Penyelesaian Gap INDI 4.0
Definisi KPI	Pelaksanaan tindak lanjut atas hasil asesmen INDI 4.0 menuju fase "Penerapan yang Matang" sesuai dengan Surat Aspirasi Pemegang Saham (S-949/MBU/10/2020)
Tujuan KPI	Mempersiapkan Perusahaan Menuju Fase Ke-3: Tingkat Kesiapan Matang sesuai dengan roadmap yang telah dibuat berdasarkan temuan Gap INDI 4.0 tahun sebelumnya
Satuan yang Digunakan	Persentase
Formula Penilaian	Persentase penyelesaian atau pemenuhan gap sesuai rekomendasi/ <i>Area of Improvement</i> (Aoi) tahun sebelumnya
Target Tahunan dan Triwulanan	<p>Tahunan: 25% TWI: 5% TWII: 10% TWIII: 15% TWIV: 25%</p>
Polaritas	Maximize
Penanggungjawab KPI	Direksi
Pengelola Data KPI	Divisi Teknologi Informasi dan Divisi Manajemen Strategis

Sumber Data	Laporan Tim INDI 4.0
Jenis Pengukuran	Laporan Pelaksanaan Penyelesaian Gap INDI 4.0

14. Penerapan ERP di Perusahaan

Indikator III.14	Kepimpinan Teknologi
Nama KPI	Penerapan ERP di Perusahaan
Definisi KPI	Pelaksanaan integrasi dari aplikasi perusahaan yang bersifat fungsional dan teknis dengan memadukan aspek sumber daya manusia di dalamnya.
Tujuan KPI	Menyediakan informasi real-time tentang aktivitas Perusahaan untuk kemudahan pengambilan keputusan bagi top manajemen
Satuan yang Digunakan	Persentase
Formula Penilaian	75% terlaksananya komponen utama dan pendukung sistem ERP berikut: 4 komponen ERP Utama: 1.Sistem Keuangan 2.Sistem Sumber Daya Manusia 3.Sistem Produksi 4.Sistem Rantai Pasokan Selain 4 (empat) komponen utama ERP, ada sistem-sistem pendukung untuk efektifitas operasional perusahaan seperti: 1.Sistem Digitalisasi Tata Persuratan 2.Sistem Penilaian Kinerja 3.Sistem CRM & Salesforce 4.Sistem Pengelolaan Asset 5.Sistem Pengadaan dan Vendor 6.Sistem Dashboard
Target Tahunan dan Triwulanan	Tahunan: 75% TWI: 15% TWII: 25% TWIII: 50% TWIV: 75%
Polaritas	Maximize
Penanggungjawab KPI	Direksi
Pengelola Data KPI	Divisi Teknologi Informasi
Sumber Data	Laporan Triwulan
Jenis Pengukuran	Ketercapaian pelaksanaan integrasi ERP

IV. Peningkatan Investasi

15. Pengembangan Infrastruktur Aset Digital (Antara Media Sosial)

Indikator IV.15	Peningkatan Investasi
Nama KPI	Pengembangan Infrastruktur Aset Digital (Antara Media Sosial)
Definisi KPI	Penyediaan dukungan terhadap pengembangan infrastruktur Media Sosial Antara baik dari aspek teknologi, konten maupun tata kelola untuk meningkatkan <i>followers</i> melalui media sosial.
Tujuan KPI	Meningkatkan aset digital media sosial Perum LKBN Antara dalam bentuk penambahan <i>followers</i>

Satuan yang Digunakan	Persentase
Formula Penilaian	Persentase kenaikan <i>followers</i> media sosial Antara News dibanding tahun lalu
Target Tahunan dan Triwulanan	Tahunan: 15% TWI: 3% TWII: 5% TWIII: 10% TWIV: 15%
Polaritas	Maximize
Penanggungjawab KPI	Direktorat Pemberitaan dan Direktorat Komersil, Pengembangan Bisnis dan Teknologi Informasi
Pengelola Data KPI	Redaksi Pelaksana dan Divisi Teknologi Informasi
Sumber Data	Laporan Triwulan
Jenis Pengukuran	Ketercapaian kenaikan <i>followers</i> media sosial Perum LKBN Antara
Keterangan	Kenaikan <i>followers</i> dari tahun 2021 s/d Sept 2023 berdasarkan data SP2MT sbb: Tahun 2021 =8,55% Tahun 2022 = 4,62% Tahun 2023 (bln Sept) = 3,27% Indikator sebelumnya adalah Infrastruktur penunjang "Jelajah Indonesia", kemudian diubah menjadi Pengembangan Infrastruktur Aset Digital dikarenakan Perusahaan ingin meningkatkan infrastruktur dan pengembangan aset digital pada media sosial yang ada pada tahun 2024 yang juga merupakan bagian dari "Jelajah Indonesia".

16. Persentase Penyerapan Investasi

Indikator IV.16	Peningkatan Investasi
Nama KPI	Persentase Penyerapan Investasi
Definisi KPI	Ketercapaian realisasi atas CAPEX dari target yang ditentukan sesuai dengan program kerja yang telah disepakati
Tujuan KPI	Mengetahui kesesuaian realisasi investasi yang dilakukan untuk mempercepat transformasi bisnis perusahaan
Satuan yang Digunakan	Persentase
Formula Penilaian	$(\text{Jumlah realisasi CAPEX dibandingkan target CAPEX}) \times 100\%$
Target Tahunan dan Triwulanan	Tahunan: 70% TWI: 15% TWII: 35% TWIII: 50% TWIV: 70%
Polaritas	Maximize
Penanggungjawab KPI	Direksi

Pengelola Data KPI	Divisi Keuangan
Sumber Data	Laporan Keuangan
Jenis Pengukuran	Ketercapaian realisasi CAPEX sesuai target

V. Pengembangan Talenta

17. Rasio Top Talent Muda (<42 tahun) dalam nominated talent

Indikator V.17	Pengembangan Talenta
Nama KPI	Rasio Top Talent Muda (<42 tahun) dalam <i>nominated talent</i>
Definisi KPI	Indikator yang menunjukkan jumlah pemimpin muda ≤ 42 tahun dalam manajemen (BoD-1)
Tujuan KPI	Untuk menciptakan inklusifitas dalam lingkungan kerja
Satuan yang Digunakan	Persentase
Formula Penilaian	30% dari nominated talent
Target Tahunan dan Triwulanan	Tahunan: 30% atau 1 orang Triwulanan: Target dihitung dalam setahun TWI:0 orang TWII:0 orang TWIII:0 orang TWIV: 1 orang
Polaritas	Maximize
Penanggungjawab KPI	Direktorat Utama
Pengelola Data KPI	Divisi Manajemen SDM (MSDM)
Sumber Data	Laporan Triwulan Divisi MSDM
Jenis Pengukuran	Ketercapaian rasio talent muda
Keterangan	Formula perhitungan Talenta Muda sudah selaras dengan APS KBUMN. Perum LKBN Antara mengajukan target sebesar 30% dari <i>nominated talent</i> atau 1 orang BOD-1.

18. Rasio perempuan dalam nominated talent

Indikator V.18	Pengembangan Talenta
Nama KPI	Rasio perempuan dalam <i>nominated talent</i>
Definisi KPI	Indikator yang menunjukkan jumlah pemimpin perempuan dalam manajemen (BoD-1)
Tujuan KPI	Untuk menciptakan inklusifitas dan diversitas
Satuan yang Digunakan	Persentase
Formula Penilaian	30% dari <i>nominated talent</i>
Target Tahunan dan Triwulanan	Tahunan: 30% atau 1 orang Triwulanan: Target dihitung dalam setahun TWI:0 orang TWII:0 orang TWIII:0 orang TWIV: 1 orang

Polaritas	Maximize
Penanggungjawab KPI	Direktorat Utama
Pengelola Data KPI	Divisi Manajemen SDM (MSDM)
Sumber Data	Laporan Triwulan Divisi MSDM
Jenis Pengukuran	Ketercapaian rasio perempuan
Jenis Pengukuran	Formula perhitungan Talenta Muda sudah selaras dengan APS KBUMN. Perum LKBN Antara mengajukan target sebesar 30% dari <i>nominated talent</i> atau 1 orang BOD-1.

19. Rasio Pemenuhan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko

Indikator V.19	Pengembangan Talenta
Nama KPI	Rasio Pemenuhan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko
Definisi KPI	Perbandingan antara jumlah personil di unit kerja yang mengelola risiko dengan jumlah orang di unit yang sama yang mempunyai sertifikat pengelolaan risiko sesuai dengan tingkat jabatannya
Tujuan KPI	Untuk memperkuat kualitas personil dalam organ pengelola risiko
Satuan yang Digunakan	Persentase
Formula Penilaian	$(\text{Jumlah personil organ pengelola risiko yang memenuhi kualifikasi} / \text{total jumlah personil organ pengelola risiko}) \times 100\%$
Target Tahunan dan Triwulanan	Tahunan: 90% TWI: 20% TWII: 40% TWIII: 60% TWIV: 90%
Polaritas	Maximize
Penanggungjawab KPI	Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko
Pengelola Data KPI	Departemen Manajemen Risiko
Sumber Data	Laporan Triwulan Divisi MSDM
Jenis Pengukuran	Ketercapaian pemenuhan organ pengelola risiko

20. Implementasi tindak lanjut roadmap Dana Pensiun

Indikator V.20	Pengembangan Talenta
Nama KPI	Implementasi tindak lanjut roadmap Dana Pensiun
Definisi KPI	Pelaksanaan tindak lanjut dari roadmap Dana Pensiun yang disusun berdasarkan hasil kajian uji tuntas
Tujuan KPI	1. Untuk memastikan peserta Dana Pensiun mendapatkan manfaat dari hak yang mereka miliki 2. Mengurangi iuran tambahan yang dibebankan kepada Pendiri (Perum LKBN Antara)
Satuan yang Digunakan	Persentase

Formula Penilaian	Terselesaikannya Implementasi tindak lanjut roadmap Dana Pensiun minimal 50% berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama dengan tahapan sbb: 1. Pembentukan Tim pengalihan Dapen 2. Penyelesaian proses internal 3. Penyelesaian proses eksternal
Target Tahunan dan Triwulanan	Tahunan: 50% TWI: 10% TWII: 20% TWIII: 35% TWIV: 50%
Polaritas	Maximize
Penanggungjawab KPI	Direksi
Pengelola Data KPI	Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko
Sumber Data	Laporan Tim Evaluasi Dana Pensiun
Jenis Pengukuran	Terselesaikannya pelaksanaan <i>roadmap</i> penyehatan Dana Pensiun

3. Target Rasio-Rasio Perusahaan

Rasio	Audited 2022	Prog 2023	RKAP 2024
Return On Equity (ROE)	148,14%	9,67%	3,94%
Return On Assets (ROA)	40,06%	5,41%	2,60%
Return On Investment (ROI)	49,92%	8,91%	5,63%
Rasio Kas / Cash Ratio	359,35%	208,28%	131,35%
Rasio Lancar / Current Ratio	588,99%	424,23%	295,20%
Perputaran Total Aset / Total Aset Turn Over (TATO)	111,02%	106,76%	102,92%
Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset (TMS terhadap TA)	14,23%	12,53%	11,55%
Collection Period (CP)	75 hari	80 hari	79 hari

Tabel 7. 9 Target Rasio Keuangan Perusahaan 2024

4. Matrix Kesesuaian RKAP dengan APS

Tabel 7. 4 Matrix Kesesuaian RKAP dengan APS

Fungsi Keuangan

No.	Uraian	APS untuk RKAP 2024	Sesuai/Tidak Sesuai dengan Arah	Alasan Sesuai/Tidak Sesuai
1.	Asumsi Makro Ekonomi			
a.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2	Sesuai	Mengikuti asumsi ekonomi makro pada APBN 2024
b.	Inflasi (%)	2,8	Sesuai	Mengikuti asumsi ekonomi makro pada APBN 2024
c.	Suku Bunga (%)	6,7	Sesuai	Mengikuti asumsi ekonomi makro pada APBN 2024

	d.	Nilai Tukar Kurs (Rp/USD)	15.000	Sesuai	Mengikuti asumsi ekonomi makro pada APBN 2024
	e.	Harga Minyak Mentah Indonesia (USD/Barel)	82	Sesuai	Mengikuti asumsi ekonomi makro pada APBN 2024
	f.	Lifting Minyak (ribu barel/hari)	635	Sesuai	Mengikuti asumsi ekonomi makro pada APBN 2024
	g.	Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)	1.033	Sesuai	Mengikuti asumsi ekonomi makro pada APBN 2024
2.	Fungsi Keuangan				
	a.	Audit Laporan Keuangan tahun 2023	a. Diselesaikan dan diunggah melalui Sistem Informasi Manajemen KBUMN selambat-lambatnya tanggal 15 April 2024	Sesuai	Audit lap keu direncanakan selesai pada TW1 2024
			b. melakukan Audit Upon Procedure (AUP) atas paket informasi laporan audit dan mengunggah laporan AUP melalui Sistem Informasi Manajemen KBUMN paling lambat tanggal 30 April 2024	Sesuai	Ditargetkan WTP
	b.	Ketentuan minimum opini Laporan Keuangan	WTP	Sesuai	Dilakukan di 2024
	c.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 9 Tahun 2023	BUMN tertutup diharapkan mengadopsi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 9 Tahun 2023 untuk poin-poin yang relevan yaitu tentang peran komite audit, pembatasan penggunaan jasa audit, ruang lingkup audit, dan independensi AP dan KAP terhadap Pihak	Sesuai	Dilakukan di 2024
	d.	Target Keuangan			
		1) Ekspansi Berkesinambungan	EBITDA lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya	Tidak Sesuai	EBITDA (Optimis+Dapen)2024: Rp 37,78M EBITDA 2023p: 47,78M EBITDA mengalami penurunan dari Rp 47,78 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp 37,78 miliar pada tahun 2024 atau turun sebesar 21% akibat aksi korporasi yaitu, pengalihan peserta Dapen Perum LKBN Antara dari Program Manfaat Pasti kepada Program Iuran Pasti DPLK yang memerlukan biaya sekitar Rp 34 miliar. Aksi korporasi ini merupakan tindak lanjut implementasi roadmap

					<p>Dapen Antara berdasarkan hasil kajian uji tuntas sesuai arahan KBUMN. Jika program Dana Pensiun Manfaat Pasti dilanjutkan, maka Perusahaan akan terbebani iuran pemberi kerja dan iuran tambahan sebesar Rp 19 miliar pada tahun 2024 dan akan terus naik menjadi Rp 36 miliar pada tahun 2030. Aksi korporasi ini menyebabkan beban Perusahaan meningkat menjadi Rp 34 miliar pada tahun 2024, akan tetapi pada periode selanjutnya, beban Perusahaan hanya akan menjadi sekitar Rp 4 miliar per tahun, sebab Perusahaan hanya akan membayar kewajiban iuran pasti DPLK. Berdasarkan aksi korporasi ini, maka Perusahaan dapat berhemat lebih dari Rp 100 miliar dari periode 2024-2030.</p>
		2) Penciptaan Nilai Ekonomis	ROIC (Return on Invested Capital) di atas WACC (Weighted Average Cost of Capital) atau selisih ROIC-WACC lebih baik dibanding tahun sebelumnya	Tidak Sesuai	<p>Target ROIC 2024 (optimis+Dapen): -4.11% ROIC 2023p:1.77%</p> <p>Ketidaksesuaian ini disebabkan oleh penurunan laba akibat pembebanan pengalihan Dapen seperti dijelaskan diatas pada poin d.1</p>
		3) Sustainable Financial Position	a. Financing debt to Invested Capital maksimal 45% atau lebih baik dibanding tahun sebelumnya	Sesuai	<p>Target Financing debt to Invested Capital 2024 (optimis+Dapen): 13.82% (Sesuai karena kurang dari 45%) Financing debt to Invested Capital 2023p:11.81%</p> <p>Target Financing debt to Invested Capital 2024 (optimis): 17.69%</p>

			b. <i>Financing debt to EBITDA</i> maksimal 2,3 kali atau lebih baik dibanding tahun sebelumnya	Sesuai	Target Financing debt to EBITDA 2024 (optimis+Dapen): 1.57 kali (Sesuai karena kurang dari 2.3 kali) Financing debt to EBITDA 2023p: 0.69 kali Target Financing debt to EBITDA 2024 (optimis): 1.00 kali
	e.	Penugasan pada BUMN	BUMN yang mendapatkan Penugasan Khusus, dalam Perencanaannya harus dikaji dan disepakati bersama oleh BUMN penerima tugas, Menteri, Menteri Keuangan, dan Menteri Teknis atau pemberi Penugasan Khusus dan dalam Pelaksanaannya dilaporkan oleh BUMN Penerima Penugasan kepada Menteri Keuangan, Menteri Teknis, Menteri BUMN dan pemberi Penugasan Khusus.	Sesuai	Perum LKBN Antara mendapat penugasan Pemerintah c.q Kementerian Komunikasi dan Informatika, untuk melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik/Public Service Obligation (PSO) untuk Informasi Publik Bidang Pers
	f.	BUMN yang mendapatkan tambahan PMN	Melakukan upaya-upaya untuk mendorong realisasi penyerapan PMN sesuai kajian dan menyampaikan laporan capaian Key Performance Indicators/Kontrak Manajemen serta realisasi penggunaan dana PMN secara berkala dalam Laporan Triwulanan dan/atau Laporan tahunan dengan format sesuai PER-2/MBU/03/2023.	Tidak Sesuai	Perum LKBN Antara tidak mempunyai tambahan PMN
	g.	Penugasan Proyek Strategis Nasional	BUMN yang sedang menjalankan penugasan Proyek Strategis Nasional diminta melakukan upaya-upaya untuk memastikan proyek dapat diselesaikan secara tepat waktu dan menyampaikan laporan progress penyelesaian PSN dalam laporan triwulanan dan Laporan Tahunan.	Tidak Sesuai	Perum LKBN Antara tidak mempunyai tambahan PSN
	h.	RKAP BUMN Terbuka	Untuk BUMN terbuka, Dewan Komisaris agar menyampaikan RKAP kepada pemegang saham Seri A Dwiwarna selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah disetujui/disahkan.	Tidak Sesuai	Perum LKBN Antara bukan BUMN terbuka
	i.	RDI/SLA, BPYBDS, dan PMN yang belum dimanfaatkan dituangkan dalam RKAP (jika ada)	RKAP harus menuangkan posisi/nilai, skema rencana penyelesaian dan informasi relevan lainnya	Tidak Sesuai	Perum LKBN Antara tidak mempunyai RDI / SLA / BPYBDS ataupun PMN
	j.	PMPP	BUMN yang memiliki BMN dari Kementerian terkait yang berpotensi dikonversi menjadi PMPP agar melaporkan dalam RKAP data yang meliputi: jenis barang, Kementerian terkait, nilai, status produktif / tidak,	Tidak Sesuai	Perum LKBN Antara tidak memiliki BMN

			rencana perkiraan waktu proses PMPP.		
	k.	Aksi Korporasi	BUMN diminta untuk mencantumkan daftar Aksi Korporasi yang membutuhkan persetujuan RUPS/Menteri dan Belanja Modal (CAPEX) dalam lampiran Kontrak Manajemen Tahunan.	Sesuai	Aksi korporasi pengalihan Dapen ke DPLK diputuskan pada akhir tahun 2023, sedangkan pelaksanaannya dilakukan pada tahun 2024.
	l.	Program restrukturisasi	<p>a. Bagi BUMN yang program restrukturisasinya telah ditetapkan sebelum penyusunan RKAP 2024, diminta menyusun RKAP dengan merujuk kepada program – program restrukturisasi tersebut dan melaporkan realisasinya dalam laporan Triwulanan dan laporan Tahunan.</p> <p>b. Bagi BUMN yang sedang menjalankan program restrukturisasi dan berencana mengajukan perubahan program restrukturisasi, diminta menyampaikan usulan perubahan program restrukturisasi tersebut kepada Kementerian BUMN untuk mendapatkan persetujuan. Selanjutnya, jika perubahan program ditetapkan setelah pengesahan RKAP 2024, maka agar dilakukan penyesuaian atas RKAP yang telah</p>	N/A	Perum LKBN Antara tidak memiliki program restrukturisasi yang memerlukan persetujuan KBUMN.

			<p>disusun sesuai dengan revisi program restrukturisasi yang telah ditetapkan.</p> <p>c. Bagi BUMN yang menghadapi permasalahan keuangan struktural diminta mengajukan usulan restrukturisasi yang dilengkapi dengan kajian sebagaimana diatur dalam PER-2/MBU/03/2023 kepada Menteri/RUPS untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya melakukan penyesuaian atas RKAP yang telah disusun sesuai dengan program restrukturisasi yang telah ditetapkan.</p>		
3.	APS untuk KPI				
	a.	KPI PMN dalam Kontrak Manajemen	<p>BUMN – BUMN berikut diminta untuk menambahkan KPI PMN dalam Kontrak Manajemen pada perspektif ‘Peningkatan Investasi’ dan mendetailkan komponennya pada kamus KPI:</p> <p>a. BUMN yang mendapatkan tambahan PMN mulai tahun 2021 dan belum dinyatakan selesai oleh DJKN;</p> <p>b. BUMN yang mendapatkan tambahan PMN sebelum tahun 2021 yang progress fisik dan realisasi penyerapan dananya belum selesai.</p>	Tidak Sesuai	Perum LKBN Antara tidak memiliki PMN

	b.	KPI Penyelesaian Audit Tahun Buku 2023 dalam Kontrak Manajemen	<p>Bagi BUMN berikut agar memasukkan penyelesaian audit Tahun Buku 2023 sebagai KPI dalam Kontrak Manajemen Tahun 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) - PT Pertamina (Persero) - PT Kereta Api Indonesia (Persero) - PT PELNI (Persero) - PT Pupuk Indonesia (Persero) - PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) - PT Krakatau Steel (Persero) Tbk - PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk - PT Danareksa (Persero) termasuk BUMN Titip Kelola ke PT Danareksa (Persero) - PT Perusahaan Pengelola Aset untuk Tahun Buku 2020 – 2023. 	Tidak Sesuai	Perum LKBN Antara bukan termasuk BUMN yang dititip kelola ke Danareksa dan tidak bermasalah dalam penyelesaian audit
	c.	KPI tentang Dana Pensiun	<p>BUMN sebagai pendiri DPPK yang telah melakukan due diligence dengan kondisi kekurangan kekayaan untuk pendanaan dari nilai kini aktuarial dan hasil rasio pendanaan/kualitas pendanaan di bawah ketentuan (Rasio Kecukupan Dana < 100%) agar mengimplementasikan Roadmap/rencana inisiatif perbaikan/penyelesaian serta dituangkan dalam bagian KPI perspektif pengembangan talenta.</p>	Sesuai	<p>Pengalihan DPPK Manfaat Pasti menjadi DPLK Iuran Pasti sudah diprogramkan pada tahun 2024.</p> <p>Dicantumkan pada aspirasi pemegang saham (hal.81) dan KPI Korporat 2024 (hal.82).</p>

Fungsi Non Keuangan

No.	Uraian	APS untuk RKAP 2024	Sesuai/Tidak Sesuai dengan Arahan	Alasan Sesuai/Tidak Sesuai
1.	Fungsi Manajemen Risiko dan Kepatuhan			
a.	Kebijakan Strategi Risiko Kementerian BUMN	<p>1) BUMN dan Anak Perusahaan BUMN wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dengan melengkapi pemenuhan organ pengelola risiko sesuai dengan kategori dan klasifikasi risiko BUMN dan Anak Perusahaan BUMN sebagaimana ketentuan pada Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 dalam PER-2/MBU/03/2023. Kelengkapan organ pengelola risiko BUMN dan Anak Perusahaan BUMN wajib dipenuhi paling lambat tanggal 24 Maret 2024. Status pemenuhan organ pengelola</p>	N/A	Dewan Pengawas sudah mengirimkan Surat ke Kementerian BUMN yang menjelaskan bahwa Perum LKBN Antara belum membutuhkan Direktur MR yang terpisah dari Direktur Keuangan

			risiko BUMN saat ini dapat dilihat pada lampiran II.		
			2) Bagi BUMN Sistemik A di luar dari BUMN HIMBARA, wajib menyusun rencana darurat (contingency plan) yang merupakan dokumen terpisah dari RKAP. BUMN non Sistemik A, tidak diwajibkan namun dianjurkan menyusun rencana darurat (contingency plan) dengan ketentuan yang sama.	N/A	Perum LKBN Antara bukan Sistemik A
			3) Direksi BUMN wajib menyusun strategi risiko yang terdiri dari: (i) pernyataan selera risiko (risk appetite statement) BUMN dengan memperhatikan selera risiko Kementerian BUMN, (ii) nilai ambang risiko di level enterprise/korporat yang memuat risk capacity, risk appetite, risk tolerance, dan risk limit, serta (iii) metrik strategi risiko.	Sesuai	Penyusunan strategi Risiko di Perum LKBN Antara sudah sesuai dengan APS KBUMN.
			4) Penyusunan metrik strategi risiko memuat paling sedikit: (i) kategori Risiko, (ii) sikap terhadap risiko, (iii) parameter dan satuan ukur, (iv) nilai batasan/limit. Metrik strategi risiko wajib digunakan sebagai dasar dalam menetapkan berbagai pilihan sasaran dan strategi yang akan menjadi usulan dalam rancangan RKAP dengan pilihan: (i) accept/terima, apabila imbal hasil (return) yang akan diperoleh sebanding dengan risiko (risk) yang dapat diterima oleh perusahaan, dan (ii) avoid/hindari, apabila risiko (risk) di luar ambang yang dapat diterima oleh perusahaan walaupun imbal hasil (return) tinggi.	Sesuai	Penyusunan metrik strategi Risiko di Perum LKBN Antara sudah sesuai dengan APS KBUMN.
			5) Strategi risiko wajib memperoleh persetujuan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan dimasukkan dalam rancangan RKAP.	Sesuai	Strategi risiko Perum LKBN Antara sudah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas.
			6) BUMN yang masuk dalam klasifikasi risiko sistemik A dan sistemik B menganggarkan secara memadai dalam RKAP 2024 kegiatan reviu atas pelaksanaan <i>Internal Control Over Financial Reporting</i> (ICOFR)	Sesuai	Anggaran kegiatan pelaksanaan ICOFR sudah dimasukkan ke dalam RKAP 2024.

	b.	Strategi dan Perencanaan Risiko	1) BUMN wajib menyusun RKAP 2024 berbasis manajemen risiko sesuai dengan strategi risiko yang disusun sebagaimana ketentuan pada bagian "C. Kebijakan Strategi Risiko Kementerian BUMN".	Sesuai	RKAP 2024 Perum LKBN Antara disusun berdasarkan manajemen risiko sesuai ketentuan pada bagian "C. Kebijakan Strategi Risiko Kementerian BUMN".
			2) Keputusan dalam menetapkan pilihan sasaran dan strategi yang diusulkan dalam rancangan RKAP dilengkapi dengan pertimbangan berdasarkan hasil perhitungan antara risiko yang dapat diterima dengan hasil yang ditargetkan dapat diperoleh oleh perusahaan sebagaimana kebijakan strategi risiko BUMN.	Sesuai	Penetapan sasaran dan strategi pada RKAP 2024 sudah disesuaikan dengan arahan kebijakan strategi pada APS KBUMN.
			3) Target yang diusulkan dalam rancangan RKAP wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:		
			a) Target disusun dengan nilai yang paling optimal sesuai dengan penerimaan risiko dalam strategi Risiko. b) Target yang diusulkan harus memberikan perlindungan dan penciptaan nilai bagi BUMN serta harus direalisasikan dengan melindungi dari risiko yang tidak dapat diterima oleh perusahaan. c) Target harus telah memperhitungkan risiko (<i>risk adjusted target</i>). Ketidaktercapaian target pada akhir tahun 2024 sepenuhnya merupakan tanggung jawab Direksi dalam melakukan pengurusan perusahaan dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dalam melakukan pengawasan, kecuali yang disebabkan oleh suatu risiko yang semua perusahaan dalam industri tersebut terdampak. d) Perlakuan dan pengendalian risiko yang akan dilaksanakan untuk menurunkan risiko yang dapat diterima telah dimasukkan sebagai program kegiatan dan anggaran dalam RKAP.	Sesuai	Usulan target pada RKAP 2024 sudah disesuaikan dengan ketentuan pada APS KBUMN.
			4) Berdasarkan sasaran, strategi dan target yang diusulkan dalam RKAP, BUMN wajib menyusun profil risiko, perhitungan risiko, rencana perlakuan risiko dan peta risiko dengan ketentuan sebagai berikut:		

			a) Profil risiko memuat informasi paling sedikit: (i) sasaran, (ii) strategi, (iii) taksonomi risiko, (iv) peristiwa risiko, (v) penyebab risiko, (vi) Key Risk Indicator (KRI), dan (vii) threshold KRI dalam 3 (tiga) kategori yaitu batas bahaya, batas hati-hati, dan batas aman sebagai early warning signal, (viii) kontrol saat ini (existing control) dan penilaian efektivitas kontrol, (ix) dampak risiko, dan (x) perkiraan waktu terjadinya eksposur risiko.	Sesuai	Profil risiko Perum LKBN Antara sudah memuat informasi yang ditentukan pada APS KBUMN.
			b) Perhitungan risiko terdiri dari risiko inheren dan risiko residual, memuat informasi paling sedikit: (i) peristiwa risiko, (ii) kuantifikasi risiko inheren, dan (iii) kuantifikasi risiko residual.	Sesuai	Perhitungan risiko Perum LKBN Antara terdiri dari risiko inheren dan residual, serta sudah memuat informasi yang ditentukan pada APS KBUMN.
			i) Nilai risiko inheren dan risiko residual terdiri dari: (i) eksposur risiko, (ii) skala risiko, dan (iii) level risiko.	Sesuai	Nilai risiko inheren dan residual di Perum LKBN Antara terdiri dari: (i) eksposur risiko, (ii) skala risiko, dan (iii) level risiko.
			ii) Perhitungan eksposur risiko terdiri dari: i. Eksposur risiko kuantitatif dihasilkan dari perkalian nilai dampak kuantitatif berupa nilai rupiah atau mata uang fungsional pembukuan atas Dampak langsung dan/atau tidak langsung secara finansial terhadap pencapaian target keuangan, dikali dengan nilai Probabilitas (%). ii. Eksposur risiko kualitatif dihasilkan dari perkalian skor Risiko (berupa penilaian skala dampak dikali dengan 1% dari batasan risiko/risk limit level enterprise/korporat yang ditetapkan dalam strategi Risiko), dikali dengan nilai Probabilitas (%).	Sesuai	Perhitungan risiko di Perum LKBN Antara disusun sesuai APS KBUMN.
			iii) Perhitungan skala risiko menggunakan kriteria skala dampak dan skala probabilitas sebagaimana ketentuan dalam Petunjuk Teknis mengenai Proses Manajemen Risiko dan Agregasi pada Taksonomi Risiko Portofolio BUMN. Untuk kepentingan internal perusahaan dalam rangka pemantauan dan evaluasi risiko yang lebih mendalam, BUMN dapat menetapkan kriteria Skala Dampak dan Skala Probabilitas yang	Sesuai	Sudah sesuai dengan APS KBUMN.

			berbeda dengan acuan pada Petunjuk Teknis tersebut.		
			iv) Perhitungan level risiko menggunakan hasil pemetaan dengan skala risiko (heatmap)	Sesuai	Sudah sesuai dengan APS KBUMN.
			v) Hasil kuantifikasi risiko inheren disajikan paling sedikit memuat: (i) asumsi perhitungan dampak, (ii) nilai dampak rupiah atau mata uang fungsional pembukuan untuk risiko kuantitatif atau nilai skor risiko untuk risiko kualitatif, (iii) skala dampak, (iv) skala probabilitas, (v) eksposur risiko, (vi) skala risiko, dan (vii) level risiko.	Sesuai	Sudah sesuai dengan APS KBUMN.
			vi) Hasil kuantifikasi risiko residual disajikan dalam target triwulan paling sedikit memuat: (i) target nilai dampak tiap triwulan, (ii) target skala dampak tiap triwulan, (iii) target nilai probabilitas tiap triwulan, (iv) target skala probabilitas tiap triwulan, (v) target eksposur risiko tiap triwulan, (vi) target skala risiko tiap triwulan, dan (vii) target level risiko tiap triwulan.	Sesuai	Sudah sesuai dengan APS KBUMN.
			vii) Penjabaran target risiko residual triwulan disesuaikan berdasarkan sifat dan karakter setiap risiko seperti ditinjau dari estimasi waktu terjadinya (one shot atau continuous)	Sesuai	Sudah sesuai dengan APS KBUMN.
			c) Rencana perlakuan risiko disusun untuk menurunkan tingkat risiko sesuai dengan target risiko residual, yang memuat informasi paling sedikit: (i) opsi perlakuan risiko dengan pilihan accept/monitor, reduce/mitigate, transfer/sharing, (ii) kegiatan rencana perlakuan risiko, (iii) jenis program kegiatan di dalam RKAP, (iv) output kegiatan perlakuan risiko, (v) anggaran biaya perlakuan risiko, (vi) pejabat yang bertanggung jawab, (vii) timeline pelaksanaan kegiatan perlakuan risiko.	Sesuai	Sudah sesuai dengan APS KBUMN.
			d) Peta risiko memuat informasi posisi risiko inheren dan posisi risiko residual dalam pemetaan warna skala hasil kalibrasi antara skala probabilitas dengan skala dampak yang mengacu pada heatmap	Sesuai	Sudah sesuai dengan APS KBUMN.

			5) BUMN wajib menyusun perencanaan audit intern paling kurang memenuhi ketentuan sebagai berikut:		
			<p>a) Perencanaan audit disusun berdasarkan risiko (<i>risk based audit</i>) yang dilakukan secara terintegrasi dalam tata kelola tiga lini (<i>three lines model</i>) dan telah melalui pengumpulan serta analisis input yang berasal dari: (i) Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, (ii) sasaran dan strategi dalam rancangan RKAP, (iii) regulasi dan ketentuan sektoral, (iv) temuan audit tahun sebelumnya, (v) profil risiko BUMN dan anak perusahaan, (vi) catatan kejadian kerugian (<i>loss event database</i>), (vii) data lain yang relevan.</p> <p>b) Perencanaan audit memuat informasi paling sedikit: (i) jenis penugasan (audit, umum, audit tematik, audit <i>mandatory</i> oleh regulator, audit anak perusahaan, <i>consulting</i>, atau jenis audit lainnya), (ii) subjek audit, (iii) objek audit, (iv) ruang lingkup audit, (v) strategi audit, (vi) sumber daya yang digunakan, (vii) jadwal audit.</p> <p>c) Perencanaan audit BUMN mencakup penyesuaian dengan perencanaan audit anak perusahaan secara terintegrasi yang tidak terbatas pada penentuan strategi pelaksanaan audit dan perumusan prinsip audit serta metodologi langkah pelaksanaan pengendalian mutu audit.</p> <p>d) Laporan audit intern disampaikan kepada Kementerian BUMN.</p>	Sesuai	Sesuai dengan APS KBUMN. Perencanaan audit sudah memasukkan pertimbangan risiko perusahaan dan sejak 2 tahun terakhir, audit scope dibatasi pada unit atau program yg memiliki risiko tinggi.
			6) BUMN wajib menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, BPKP dan KAP serta melaporkan perkembangan tindak lanjut rekomendasi kepada Kementerian BUMN c.q. Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko yang merupakan bagian dari Laporan Audit Intern.	Sesuai	Pelaksanaan dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.BPKP dan KAP dilaporkan ke KBUMN sesuai arahan pada APS KBUMN.
			7) BUMN Konglomerasi wajib menyusun perencanaan tata kelola terintegrasi paling kurang memenuhi ketentuan:	N/A	Perum LKBN Antara termasuk BUMN Individu yang tidak diwajibkan untuk membentuk Fungsi Tata Kelola Terintegrasi

			<p>a) Perencanaan penyusunan struktur tata kelola terintegrasi yang akan dijalankan oleh Direksi BUMN Induk, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN Induk (termasuk Komite Tata Kelola Terintegrasi sebagai organ Dewan Komisaris/Dewan Pengawas), Unit Kerja Manajemen Risiko, dan SPI.</p> <p>b) Perencanaan pelaksanaan proses tata kelola terintegrasi yang meliputi: (i) penyusunan kebijakan harmonisasi BUMN Induk dengan anak perusahaan, dan (ii) pelaksanaan proses tata kelola terintegrasi oleh Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (termasuk Komite Tata Kelola Terintegrasi sebagai organ Dewan Komisaris/Dewan Pengawas), Unit Kerja Manajemen Risiko, dan SPI.</p> <p>c) Perencanaan atas hasil tata kelola terintegrasi yang terdiri dari: (i) hasil pelaksanaan tata kelola terintegrasi pada tahun sebelumnya, (ii) rencana peningkatan hasil pelaksanaan tata kelola terintegrasi pada tahun RKAP dengan mencantumkan sejumlah perbaikan yang akan dilakukan, meliputi: (a) aspek penyempurnaan kebijakan tata kelola terintegrasi, (b) rencana tindak lanjut atas daftar temuan manajemen risiko terintegrasi, audit intern terintegrasi, dan kepatuhan terintegrasi, (c) rencana penataan portofolio dan perbaikan kinerja anak perusahaan, (d) rencana penguatan unit kerja manajemen risiko terintegrasi dan SPI terintegrasi, dan (e) area fokus rencana kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi.</p>	N/A	Perum LKBN Antara termasuk BUMN Individu yang tidak diwajibkan untuk membentuk Fungsi Tata Kelola Terintegrasi
	b.	KPI Fungsi Manajemen Risiko dalam RKAP 2024	1) BUMN wajib memasukkan dalam KPI Direksi kolejal indikator penguatan penerapan manajemen risiko.	Sesuai	KPI terkait risiko dimasukkan ke dalam KPI Direksi kolejal.
			2) Indikator KPI:		
			<p>a) Rasio Pemenuhan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko dengan target minimal 90%, Bagi BUMN yang telah mencapai rasio 90% pada tahun 2023, maka target 2024 lebih baik dari tahun lalu.</p> <p>b) Implementasi Roadmap Perbaikan Penerapan Manajemen Risiko dengan target 100%.</p>	Sesuai	<p>a) Rasio Pemenuhan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko di Perum LKBN Antara ditargetkan sebesar 90% sesuai dengan APS KBUMN.</p> <p>b) Implementasi Roadmap Perbaikan Penerapan Manajemen</p>

					Risiko di Perum LKBN Antara ditargetkan sebesar 100% sesuai APS KBUMN.
	c.	Penilaian Indeks Kematangan Risiko (Risk Maturity Index) dan Pelaporan	1) Penilaian indeks kematangan risiko (<i>Risk Maturity Index</i> /"RMI") tahun 2024 atas tahun buku 2023 dilakukan setelah angka audit tahun buku 2023 diterbitkan oleh KAP. Hasil penilaian RMI disampaikan kepada Kementerian BUMN paling lambat pada triwulan III tahun 2024 dan pelaksanaan rekomendasi hasil penilaian RMI tahun 2024 tersebut dijadikan sebagai bagian dari roadmap perbaikan penerapan manajemen risiko yang dijalankan pada RKAP tahun berikutnya.	Sesuai	Diprogramkan di tahun 2024 sesuai arahan pada APS KBUMN.
			2) Pelaporan manajemen risiko, audit intern dan tata kelola terintegrasi disampaikan kepada Kementerian BUMN secara berkala mengikuti ketentuan dalam Petunjuk Teknis mengenai Pelaporan Manajemen Risiko.	Sesuai	Sudah sesuai dengan APS KBUMN.
	d.	Pemenuhan Kelengkapan Data Manajemen Risiko Dalam Pengesahan RKAP 2024	1) Seluruh informasi pada bagian "C. Kebijakan Strategi Risiko Kementerian BUMN" dan bagian "H. Aspirasi Pemegang Saham Fungsi Manajemen Risiko" di atas dimuat di dalam Bab Manajemen Risiko pada dokumen RKAP.	Sesuai	Sudah sesuai dengan APS KBUMN.
			2) Data <i>softfile</i> (dalam format Excel) atas metrik strategi risiko, pilihan sasaran dan strategi, profil risiko, perhitungan risiko, rencana perlakuan risiko, dan peta risiko disampaikan kepada Kementerian BUMN	Sesuai	Sudah sesuai dengan APS KBUMN.
2.	Fungsi Sumber Daya Manusia				
	a.	Produktivitas tenaga kerja secara berkelanjutan	BUMN diminta untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja secara berkelanjutan, dengan target minimal lebih tinggi dibandingkan realisasi produktivitas tenaga kerja tahun sebelumnya.	Sesuai	Sesuai dengan APS KBUMN. Produktivitas tenaga kerja secara berkelanjutan diturunkan menjadi KPI di Direksi yang membidangi Fungsi SDM.

	b.	<i>Talent Management</i>	BUMN diminta untuk mengimplementasikan program <i>Talent Management</i> di Induk dan Anak-Anak Perusahaan (holding dan subholding), antara lain menyangkut hal sebagai berikut: a. <i>Talent Development</i> ; b. <i>Career Path</i> ; c. <i>Job Grading</i> ; d. <i>Performance Management</i> .	Sesuai	Sesuai dengan APS KBUMN. Implementasi program <i>Talent Management</i> tersebut sekaligus merupakan KPI di Direksi yang membidangi Fungsi SDM.
	c.	<i>Talent Mobility</i>	BUMN diminta untuk mengimplementasikan program Perputaran Talenta (<i>Talent Mobility</i>) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik di lingkungan internal BUMN Grup atau lintas BUMN/Klaster	Sesuai	Sesuai dengan APS KBUMN. Implementasi program Perputaran Talenta (<i>Talent Mobility</i>) menjadi KPI di Direksi yang membidangi Fungsi SDM.
	d.	<i>Blue print</i> pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas	BUMN diminta untuk mengimplementasikan <i>Blueprint</i> Pemenuhan Amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sesuai rencana aksi periode tahun 2024, terutama menyangkut 5 (lima) aspek sebagai berikut: 1) Penempatan tenaga kerja 2) Pengembangan karir 3) Kesejahteraan 4) Aksesibilitas 5) Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Sesuai	Sesuai dengan APS dan dimasukkan ke dalam program kerja 2024
	e.	Pemenuhan kuantitas dan kualitas data	BUMN diminta untuk memastikan pemenuhan kuantitas dan kualitas data: a. Dalam Portal HC Kementerian BUMN, berupa: 1) Pengurus BUMN; 2) Pengurus Anak Perusahaan BUMN; 3) Pengurus Perusahaan Afiliasi Terkonsolidasi BUMN; 4) Talenta (Direksi/BoD dan BoD-1) dalam Talent Pool K-BUMN; b. Dalam Dashboard HCIS FHCI, berupa: 1) Data pegawai BUMN; 2) Data pegawai Anak Perusahaan BUMN; 3) Data pegawai Perusahaan Afiliasi Terkonsolidasi BUMN.	Sesuai	Sesuai dengan APS KBUMN. Implementasi program <i>Talent Management</i> tersebut menjadi KPI di Direksi yang membidangi Fungsi SDM.
			Menjadikan pemenuhan kuantitas dan kualitas data dimaksud sebagai salah satu <i>Key Performance Indicator</i> bagi Direktur yang Membidangi <i>Human Capital</i> /Sumber Daya Manusia dalam RKAP Tahun 2024.	Sesuai	Sesuai dengan APS dan dimasukkan secara terpisah ke dalam KPI Direktur Utama yang membidangi Sumber Daya Manusia.

f.	Indikator Pengembangan Talenta	Rasio talenta perempuan dalam Nominated Talent BUMN dengan target minimal lebih tinggi dari realisasi tahun sebelumnya.	Sesuai	Tahun 2023: 19% Tahun 2024:7% Pada tahun 2023, Perum LKBN Antara masih menggunakan talenta pada level Manajemen (BoD-1 s/d BoD-3), sedangkan untuk tahun 2024 perhitungan nominated talent sudah berdasarkan APS (Pemimpin perempuan pada level BoD-1).
		Rasio talenta muda dalam Nominated Talent BUMN dengan target minimal lebih tinggi dari realisasi tahun sebelumnya.	Sesuai	Tahun 2023: 19% Tahun 2024:7% Pada tahun 2023, Perum LKBN Antara masih menggunakan talenta pada level Manajemen (BoD-1 s/d BoD-3), sedangkan untuk tahun 2024 perhitungan nominated talent sudah berdasarkan APS (Pemimpin perempuan pada level BoD-1).
g.	Usulan Penghasilan/Remunerasi Tahun 2024	Usulan Penghasilan/Remunerasi Tahun 2024 bagi Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Tahun 2024 harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:		
		<p>a. Disampaikan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas kepada Menteri BUMN selambat-lambatnya sebelum RUPS pengesahan Laporan Tahunan 2023, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>b. Diutamakan menggunakan hasil kajian internal Perusahaan, atau kolaborasi antar BUMN/klaster.</p> <p>c. Prinsip Penganggaran Tantiem/Inisiatif Kinerja dalam RKAP Tahun 2024:</p> <p>1) dapat dilakukan jika BUMN tersebut menargetkan <i>eligible</i> atau memenuhi persyaratan untuk mendapatkan tantiem/insentif kinerja sebagaimana ketentuan Pasal 102 angka (1) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023;</p> <p>2) harus dilakukan secara wajar yaitu selaras dengan <i>financial direction</i> (kenaikan/penurunannya terhadap <i>actual/prognosa tantiem</i></p>	Sesuai	Sesuai APS. Ditindaklanjuti sebelum RPB pengesahan Laporan Tahunan 2023

			tahun berjalan maksimal sebesar kenaikan/penurunan target net income (untuk BUMN <i>financial services</i>) atau kenaikan/penurunan target EBITDA (untuk BUMN <i>non financial services</i>); 3) harus tercantum secara eksplisit di dalam RKAP BUMN dan tidak tergabung/ <i>blended</i> ke dalam mata anggaran yang lain.		
	h.	<i>Respectful Workplace Policy (RWP)</i>	BUMN diminta untuk mengimplementasikan <i>Respectful Workplace Policy (RWP)</i> secara konsisten dan konsekuen sesuai ketentuan yang berlaku.	Sesuai	Perum LKBN Antara sudah menjalankan program RWP sejak 2022 dan masih konsisten diterapkan.
	i.	<i>Human Capital Maturity Assessment</i>	BUMN diminta untuk menindaklanjuti rekomendasi / mengimplementasikan <i>Human Capital Maturity Assessment</i> .	Sesuai	Human Capital Maturity Assesmet telah dilaksanakan pada TWIII tahun 2023 dan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil assessment direncanakan pada tahun 2024.
	j.	Pengelolaan praktik bisnis yang berkelanjutan	BUMN diminta untuk melakukan pengelolaan praktik bisnis yang berkelanjutan, menyeimbangkan antara kepentingan perusahaan dengan kesejahteraan karyawan, serta membangun hubungan industrial yang harmonis, termasuk di antaranya. penyesuaian Perjanjian Kerja Bersama antar Anak Perusahaan	Sesuai	Sudah sesuai dengan APS KBUMN, termasuk penyelenggaraan PKB yang ditargetkan akan disosialisasikan pada TW I 2024.
	k.	<i>AKHLAK Culture Journey</i>	BUMN diminta untuk mengimplementasikan <i>AKHLAK Culture Journey</i> sebagaimana Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-115/MBU/05/2022 tentang Pedoman Implementasi Nilai-Nilai Utama Sumber Daya Manusia BUMN (<i>AKHLAK Culture Journey</i>) sesuai dengan tahapan yang telah dicapai oleh masing-masing BUMN.	Sesuai	Survei AKHLAK sudah dilaksanakan pada TWII 2023 dan setiap tahun <i>AKHLAK Culture Journey</i> diprogramkan dan diimplementasikan dilingkungan Perusahaan.
3.	Fungsi Teknologi dan Teknologi Informasi				
	a.	Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI)	BUMN agar menetapkan Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) yang selaras dengan kebutuhan bisnis BUMN dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dan peraturan lain yang berlaku serta menyampaikan	Sesuai	Diprogramkan pada 2024 berdasarkan <i>roadmap TI</i> .

			progres pelaksanaan program dalam Laporan Manajemen Triwulanan dan Tahunan.		
	b	<i>IT Maturity Level</i>	BUMN wajib menyampaikan evaluasi atas efektivitas penyelenggaraan Teknologi Informasi (TI) pada Laporan Manajemen Triwulanan dan Tahunan, termasuk progres tindak lanjut (<i>rekomendasi/area of improvement</i>) atas penilaian maturitas TI (<i>IT Maturity Level</i>) dan/atau hasil audit atas penyelenggaraan TI.	Sesuai	Masuk ke program kerja pada RKAP 2024 dan sesuai dengan roadmap TI.
	c.	Program <i>Digital Talent</i> BUMN	BUMN wajib mengikuti Program <i>Digital Talent</i> BUMN dengan target peserta minimal sebesar 20% pada tahun 2024 yang merupakan akumulasi target dari tahun 2022-2024 dari jumlah keseluruhan SDM perusahaan (organik dan non organik) termasuk anak dan cucu perusahaan. Selanjutnya, BUMN agar menyusun rencana implementasi digital talent berdasarkan kebutuhan pengembangan kompetensi digital SDM yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.	Sesuai	Masuk ke program kerja pada RKAP 2024 dan sesuai dengan roadmap TI.
	d.	Riset dan Inovasi	BUMN agar mengembangkan budaya inovasi dan mendorong kolaborasi riset dan inovasi dengan Perguruan Tinggi dengan memperhatikan aspek kemanfaatan terhadap dukungan atas <i>core business</i> perusahaan.	Sesuai	Masuk ke program kerja pada RKAP 2024 dan sesuai dengan roadmap TI.
	e.	<i>Profiling</i> keamanan siber	BUMN agar melaksanakan <i>profiling</i> keamanan siber dan memastikan kesiapan SDM, proses, dan infrastruktur teknologi pendukung keamanan siber. Dalam penyelenggaraan teknologi informasi dan pemrosesan informasi, BUMN wajib memperhatikan keamanan siber sesuai dengan prinsip utama keamanan informasi, meliputi kerahasiaan (<i>confidentiality</i>), keutuhan (<i>integrity</i>), dan ketersediaan (<i>availability</i>) serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keamanan siber.	Sesuai	Diprogramkan pada 2024 berdasarkan <i>roadmap</i> TI.

	f.	INDI 4.0	BUMN agar menindaklanjuti hasil asesmen INDI 4.0, dengan ketentuan bagi BUMN yang telah menerapkan transformasi digital/ <i>industry</i> 4.0 agar melaporkan hasil implementasinya, sedangkan BUMN yang belum menerapkan transformasi digital/ <i>industry</i> 4.0 agar menyusun rencana dan pemenuhan gap sesuai rekomendasi/ <i>area of improvement</i> dengan memperhatikan tren industri global yang relevan. Laporan hasil implementasi atau rencana dan pemenuhan gap sebagaimana dimaksud agar disampaikan melalui Laporan Manajemen Triwulanan dan Tahunan.	Sesuai	Masuk ke program kerja pada RKAP 2024 dan sesuai dengan <i>roadmap</i> TI.
4. Fungsi TJSL					
	a	Program TJSL	Program TJSL BUMN harus sejalan dengan <i>fiduciary duty</i> Direksi dalam memenuhi harapan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu dalam perencanaan program TJSL BUMN agar:		
			a) memperhatikan identifikasi risiko perusahaan dan mengakomodir risiko yang dapat diatasi dengan strategi TJSL; b) mencakup ruang lingkup Program TJSL yang terdiri dari 7 (tujuh) Subjek Inti (ref: SNI ISO 26000:2010) yaitu Tata Kelola Organisasi, Hak Asasi Manusia, Praktik Perburuhan, Lingkungan, Praktik Operasi Yang Adil, Isu Konsumen, Pelibatan dan Pengembangan Komunitas; c) secara konsisten melaksanakan transformasi TJSL meliputi fokus pada dampak, peningkatan tata kelola, pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kolaborasi dan engagement karyawan; d) mengoptimalkan penyaluran dana Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) melalui BUMN yang telah ditunjuk serta memberikan pembinaan terhadap UMK. Disamping itu, BUMN tetap mengupayakan pelaksanaan penagihan dan penyelesaian Piutang Bermasalah Pendanaan UMK.	Sesuai	Diprogramkan pada 2024 sesuai arahan APS KBUMN.
	b.	KPI TJSL			

		1) Melakukan pengukuran dampak terhadap program TJSJ dengan menggunakan metode <i>Social Return On Investment</i> (SROI).	Minimal 3 (tiga) program yang diukur dampaknya dengan metode SROI dimana salah satu dari program yang diukur adalah Program <i>Creating Shared Value</i> (CSV).	Sesuai	Sesuai dengan APS. PerumLKBN Antara melakukan pengukuran TJSJ dengan metode SROI.
		2) Kebijakan levelling fungsi yang membidangi Sustainability/ESG setingkat BOD-1.	Adanya Fungsi Sustainability/ESG pada pejabat setingkat BOD-1	Tidak Sesuai	Perum LKBN Antara masih akan melakukan kajian terkait roadmap TJSJ untuk program levelling TJSJ.
		3) Pemenuhan pengisian data dalam sistem informasi TJSJ Kementerian BUMN.	Terpenuhinya data pelaporan program TJSJ yang valid, lengkap dan tepat waktu.	Sesuai	Pogram TJSJ dilaporkan ke KBUMN sesuai arahan pada APS secara valid, lengkap dan tepat waktu.
		4) Meningkatkan kolaborasi antar BUMN maupun dengan pihak lain yang sesuai kompetensinya dalam pelaksanaan program TJSJ, dengan tujuan untuk meningkatkan dampak positif program.	Masing-masing minimal 1 (satu) program kolaborasi pada setiap bidang prioritas (Pendidikan, Lingkungan, dan Pengembangan UMK).	Sesuai	Pelaksanaan program TJSJ di Perum LKBN Antara disusun berdasarkan APS KBUMN dengan program kolaborasi pada bidang prioritas yang sesuai dengan kompetensi.
		5) Melibatkan peran serta karyawan secara aktif dalam program TJSJ.	Setiap karyawan terlibat dalam minimal 1 kegiatan sosial kemasyarakatan baik yang berasal dari BUMN maupun dari luar BUMN.	Sesuai	Sesuai dengan APS. Kegiatan sosial kemasyarakatan ini sudah disosialisasikan kepada karyawan Perum LKBN Antara melalui Nota Dinas Plt. Sekretaris Perusahaan No. 211/ND/SETPER/X/2023 dimana karyawan diminta untuk mengisi data partisipasi pada kegiatan sosial kemasyarakatan yang disampaikan melalui <i>Antara Virtual Office System</i> (AVOS).
5.	Fungsi Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan				
	a.	Tindak lanjut atas rekomendasi audit kepatuhan	BUMN wajib memuat rencana upaya tindak lanjut atas rekomendasi audit kepatuhan yang masih merupakan temuan berulang maupun temuan baru yang memerlukan langkah-langkah penyelesaian	Sesuai	Masuk ke program kerja RKAP 2024
	b.	Upaya penanganan permasalahan hukum	BUMN wajib melakukan upaya penanganan permasalahan hukum antar/terkait BUMN/anak perusahaan BUMN/perusahaan yang terafiliasi dengan mengedepankan proses mediasi sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/03/MBU/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi	Sesuai	Perum LKBN Antara terus mengedepankan upaya mediasi jika terjadi permasalahan hukum.

			Signifikan Badan Usaha Milik Negara		
	c.	Parameter pencapaian penyelesaian permasalahan hukum	BUMN dapat menentukan sendiri parameter pencapaian atas penyelesaian permasalahan hukum antar/terkait BUMN/anak perusahaan BUMN/perusahaan yang terafiliasi baik yang masih berproses di tahun berjalan maupun yang ditargetkan penyelesaiannya di tahun berikutnya. Dalam hal penyelesaiannya tidak sesuai dengan target yang ditetapkan, BUMN dapat melaporkan perkembangannya kepada pemegang saham beserta target baru penyelesaian permasalahan tersebut	Sesuai	Jika terdapat permasalahan hukum yang belum selesai sesuai target yang ditetapkan, maka Perum LKBN Antara akan melaporkan perkembangannya kepada pemegang saham. Saat ini Perum LKBN Antara tidak memiliki kasus hukum yang tidak terselesaikan.
	d.	Pengembangan Portal Aset BUMN	BUMN/anak perusahaan BUMN/perusahaan yang terafiliasi diwajibkan untuk berpartisipasi dan mendukung proses pengembangan Portal Aset BUMN yang sedang dikembangkan oleh Kementerian BUMN baik melalui penginputan maupun updating data sesuai dengan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) yang ditetapkan dan sesuai dengan keadaan di lapangan, serta memberikan dukungan lain yang diperlukan dalam pengembangan Portal Aset BUMN.	Sesuai	Perum LKBN Antara secara periodik mengirimkan laporan ke KBUMN via aplikasi ANAPLAN sesuai arahan KBUMN (Platform baru yang digunakan BUMN dalam melakukan collect data seperti: keuangan, risiko, termasuk KPI, dsb).
	e.	Percepatan program sertifikasi hak atas tanah	BUMN agar melakukan percepatan program sertifikasi hak atas tanah dan bangunan yang belum bersertifikat serta melakukan pengamanan aset milik BUMN dan dalam pelaksanaannya agar berkoordinasi dengan instansi terkait yang memiliki kewenangan terhadap aset milik BUMN.	Sesuai	Sudah dilaksanakan dan masih terus berlanjut di tahun 2024.
	f.	Penyusunan/penyempurnaan SOP	BUMN agar segera menyelesaikan penyusunan/ <i>penyempurnaan Standard Operating Procedure</i> (SOP) yang diwajibkan oleh Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023 dan PER-2/MBU/03/2023.	Sesuai	Sudah sesuai dengan APS KBUMN. Setiap SOP berdasarkan referensi KBUMN dan dilakukan pembaharuan berkala sesuai arahan KBUMN.
6.	Pengelolaan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)				
	a.	Implementasi Roadmap/rencana inisiatif perbaikan/penyelesaian DPPK	BUMN agar mengimplementasikan Roadmap/rencana inisiatif perbaikan/penyelesaian yang telah disusun sesuai dengan ketentuan	Sesuai	Implementasi roadmap tindak lanjut Dapen dilaksanakan pada 2024 sesuai arahan pada APS

			dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		dan dimasukkan ke dalam KPI 2024.
7.	Arahan Penggunaan Produk Dalam Negeri				
	a.	Arahan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022	BUMN wajib memaksimalkan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa pada proses bisnis perusahaan sesuai dengan Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2022 perihal Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	Sesuai	Sesuai dengan APS KBUMN. 1. Perum LKBN Antara sudah membentuk tim P3DN. 2. Pelatihan terkait P3DN sudah dilaksanakan di tahun 2023. 3. Roadmap P3DN sudah tersedia di tahun 2023. 4. Implementasi roadmap P3DN diprogramkan di 2024.

BAB VIII

RENCANA KERJA DEWAN PENGAWAS

Dewan Pengawas adalah dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan Perusahaan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Nasional Antara.

Dewan Pengawas memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan, terutama dalam rangka pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG), Dewan Pengawas merupakan inti dari *Corporate Governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam pengelolaan perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas.

Program kerja Dewan Pengawas Perum LKBN Antara tahun 2024 merupakan pedoman bagi Dewan Pengawas untuk mewujudkan terciptanya penerapan GCG di perusahaan, Hal ini sejalan dengan diberlakukannya kewajiban bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menerapkan GCG sebagai landasan kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran, Kesadaran penuh untuk menjalankan GCG dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara.

Demikian program kerja Dewan Pengawas ini disusun, agar kiranya dapat dijadikan sebagai dasar acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengawas untuk mencapai tujuan sesuai visi dan misi Perusahaan.

1. Pendahuluan

Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Perum LKBN Antara sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2007, perlu disusun Program Kerja Dewan Pengawas sebagai panduan dalam melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan Perum LKBN Antara selama tahun 2024.

Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia No, 19 Tahun 2003 tanggal 3 Agustus 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Nasional Antara.
- c. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara.
- d. Keputusan Menteri BUMN Selaku Wakil Pemerintah Sebagai Pemilik Modal Perum LKBN Antara No, SK-205/MBU/06/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Pengawas Perum LKBN Antara dan SK-

215/MBU/07/2023 tanggal 28 Juli 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Dewan Pengawas Perum LKBN Antara.

Maksud dan Tujuan

Pembuatan Program Kerja Dewan Pengawas dimaksudkan untuk dijadikan sebagai dasar dan pedoman dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas untuk mencapai tujuan, yaitu:

- a. Mendapatkan keseragaman dan keterpaduan dalam penyelenggaraan kegiatan Dewan Pengawas.
- b. Mewujudkan hasil kerja yang optimal berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik *Good Corporate Governance* (GCG).
- c. Menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, baik di lingkungan internal maupun eksternal Perusahaan.

Susunan Dewan Pengawas dan Komite-Komite

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Selaku Wakil Pemerintah Sebagai Pemilik Modal Perum LKBN Antara No, SK-205/MBU/06/2020 tanggal 15 Juni 2020 dan SK-215/MBU/07/2023 tanggal 25 Juli 2023 telah diangkat nama-nama anggota Dewan Pengawas Perum LKBN Antara, dengan susunan sebagai berikut :

- 1) Kemal Effendi Gani, sebagai Ketua Dewan Pengawas
- 2) Widiarsi Agustina, sebagai Anggota Dewan Pengawas
- 3) Mayong Suryo Laksono, sebagai Anggota Dewan Pengawas Independen
- 4) Monang Sinaga, sebagai Anggota Dewan Pengawas Independen

Berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas Perum LKBN Antara Nomor : SKEP-02/DEWAS/12/2021 tanggal 3 Desember 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit Perum LKBN Antara, maka susunan Komite Audit sebagai berikut :

- 1) Monang Sinaga, sebagai Ketua Komite
- 2) Eddy Endro Gyamirto, sebagai Anggota Komite

Berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas Perum LKBN Antara Nomor : SKEP-02/DEWAS/VII/2023 tanggal 01 Juli 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Manajemen Risiko Perum LKBN Antara, maka susunan Komite Manajemen Risiko Perum LKBN sebagai berikut :

- 1) Widiarsi Agustina, sebagai Ketua Komite Manajemen Risiko;
- 2) Singgih Budihartono, sebagai Anggota Komite Manajemen Risiko

Berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas Perum LKBN Antara Nomor: SKEP-03/DEWAS/07/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perum LKBN Antara, sebagai berikut:

- 1) Kemal Effendi Gani, sebagai Ketua Komite
- 2) Mayong Suryo Laksono, sebagai Anggota Komite

Pembagian Tugas Dewan Pengawas

Berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas Perum LKBN Antara Nomor : SKEP-04/DEWAS/06/2020 tanggal 25 Juni 2020 tentang Pembagian Tugas Anggota Dewan Pengawas Perum LKBN Antara, dengan pembagian tugas Dewan Pengawas sebagai berikut:

No,	Nama	Jabatan	Tugas
1,	Kemal Effendi Gani	Ketua Dewan Pengawas	Mengkoordinir tugas-tugas Anggota Dewan Pengawas
2,	Widiarsi Agustina	Anggota Dewan Pengawas	Menangani bidang Pemberitaan dan Tim dan Manajemen Risiko
3,	Mayong Suryo Laksono	Anggota Dewan Pengawas	Menangani bidang Komersil dan Pengembangan Bisnis dan Remunerasi
4	Monang Sinaga	Anggota Dewan Pengawas	Menangani bidang Keuangan, Audit, MSDM dan Umum,

Tabel 8. 1 Pembagian Tugas Dewan Pengawas Antara

2. Tanggung Jawab, Tugas, Kewajiban, dan Wewenang Dewan Pengawas

1.1 Tanggung Jawab Dewan Pengawas

Dewan Pengawas adalah Organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/khusus sesuai Peraturan Pemerintah serta memberikan nasihat kepada Direksi, Pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Pengawas dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Pengawas akan selalu mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pengawasan dilakukan oleh Dewan Pengawas terhadap pengelolaan Perusahaan oleh Direksi;
- c. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Pengawas bertindak sebagai majelis dan tidak dapat bertindak sendiri-sendiri mewakili Dewan Pengawas.
- d. Pengawasan tidak boleh berubah menjadi pelaksanaan tugas-tugas eksekutif, kecuali dalam hal Perusahaan tidak mempunyai Direksi, dengan kewajiban dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tidak ada Direksi.
- e. Pengawasan dilakukan tidak hanya dengan sekedar menyetujui atau tidak menyetujui terhadap tindakan-tindakan yang memerlukan persetujuan Komisaris, tetapi pengawasan dilakukan secara pro-aktif, mencakup semua aspek bisnis Perusahaan.
- f. Dewan Pengawas dapat menggunakan jasa profesional yang mandiri dan/atau membentuk Komite untuk membantu tugas Dewan Pengawas.

1.2 Tugas dan Kewajiban Dewan Pengawas

- a. Umum
 - a) Mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta keputusan Pemegang Saham.
 - b) Beritikad baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
 - c) Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Perusahaan yang dilakukan Direksi serta memberi nasihat kepada Direksi termasuk mengenai rencana pengembangan Perusahaan, Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, pelaksanaan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d) Melakukan tindakan pengurusan perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
 - e) Memantau efektivitas praktik *Good Corporate Governance* yang diterapkan Perusahaan antara lain dengan mengadakan pertemuan berkala antara Dewan Pengawas dengan Direksi untuk membahas implementasi *Good Corporate Governance* (GCG).
 - f) Menyusun rencana kerja Dewan Pengawas untuk periode tahun berikutnya.
 - g) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham.

- b. Pengawasan
Pengawasan oleh Dewan Pengawas dilakukan antara lain dengan cara:
- a) Meminta keterangan secara tertulis kepada Direksi tentang suatu permasalahan di Perusahaan.
 - b) Melakukan kunjungan kerja, baik dengan (atau tanpa) pemberitahuan kepada Direksi sebelumnya.
 - c) Memberikan tanggapan atas laporan berkala dari Direksi.
 - d) Menugaskan Komite-Komite untuk membantu melakukan tugas-tugas pengawasan.
- c. Pelaksanaan Tugas yang berkaitan dengan Pemegang Saham, Dewan Pengawas bertugas dan berkewajiban untuk:
- a) Memberikan pendapat dan saran kepada Menteri mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan RKAP yang diusulkan Direksi.
 - b) mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada Menteri mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perusahaan.
 - c) melaporkan dengan segera kepada Menteri apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan.
 - d) meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan.
- d. Pengelolaan Manajemen Risiko
Dewan Pegawai mempunyai kewajiban untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi secara berkala mengenai efektivitas penerapan manajemen risiko.
- e. Sistem Pengendalian Internal
Dewan Pengawas mempunyai kewajiban untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi agar menetapkan sistem pengendalian internal yang efektif.
- f. Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi
- a) Dewan Pengawas mengawasi agar Direksi mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan kepada Pemegang Saham, dan Instansi Pemerintah yang terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas dan secara obyektif.
 - b) Dewan Pengawas mengawasi agar Direksi mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan namun juga informasi penting yang diperlukan oleh *Stakeholder*.
 - c) Dewan Pengawas mengawasi agar Direksi aktif mengungkapkan pelaksanaan prinsip *good corporate governance* dan masalah material yang dihadapi.
 - d) Dewan Pengawas bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan dan mengawasi agar informasi yang bersifat rahasia tidak diungkapkan sampai pengumuman mengenai hal tersebut diumumkan kepada masyarakat.
 - e) Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas harus tetap dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Etika Berusaha dan Anti Korupsi
Anggota Dewan Pengawas tidak diperkenankan meminta atau menerima hadiah dan sejenisnya dari setiap pihak yang berkepentingan, bagi dirinya sendiri, keluarga atau rekan dimana hal tersebut dapat mempengaruhi objektivitasnya mewakili kepentingan Perusahaan.

1.3 Wewenang Dewan Pengawas

- a. Anggota Dewan Pengawas baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu berhak memasuki bangunan-bangunan dan halaman-halaman atau tempat-tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perusahaan dan berhak memeriksa buku-buku, surat-surat bukti, persediaan barang-barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas untuk keperluan verifikasi, surat berharga dan lain-lain serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- b. Anggota Dewan Pengawas berhak menanyakan dan meminta penjelasan tentang segala hal kepada Direksi dan Direksi wajib memberikan penjelasan.

3. Rencana Kerja Dewan Pengawas

Rencana Kerja Dewan Pengawas tahun 2024 diarahkan untuk mencapai 3 (tiga) aspek strategis, yaitu aspek pengawasan & pengarahan, aspek pelaporan, dan aspek dinamis, Di dalam masing-masing aspek tersebut dirumuskan aktivitas/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dewan Pengawas dalam tahun 2024.

Seluruh aspek dan masing-masing aktivitas/kegiatan di dalamnya dirumuskan dengan pendekatan pemenuhan tugas dan kewajiban Dewan Pengawas yang sudah ditetapkan dalam peraturan dan ketentuan perundangan-undangan lainnya yang berlaku.

1.1 Aspek Pengawasan dan Pengarahan

Sebagaimana diuraikan di atas, tugas Dewan Pengawas adalah melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat, Adapun Aspek Pengawasan dan Pengarahan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2023 terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu:

- a. Rapat Internal Dewan Pengawas
Rapat internal Dewan Pengawas minimal dilakukan satu kali dalam setiap bulan, Rapat internal Dewan Pengawas dapat dihadiri oleh Komite-komite dengan agenda utamanya adalah pembahasan kinerja perusahaan baik kinerja keuangan maupun kinerja operasional, Selain itu, dalam rapat internal Dewan Komisaris dapat juga membahas dan memutuskan hal-hal terkait dengan kewenangan Dewan Komisaris seperti yang diatur dalam anggaran dasar.
- b. Rapat Dewan Pengawas dan Direksi
Rapat ini pada dasarnya adalah rapat Dewan Pengawas yang mengundang Direksi untuk membahas masalah kinerja perusahaan dan hal-hal lain yang dianggap penting, Dilakukan minimal satu kali setiap bulan sebagaimana surat Menteri Negara BUMN Nomor S-375/MBU,Wk/2011 tanggal 5 Desember 2011 perihal Kebijakan Menteri Negara BUMN dalam pengurusan dan Pengawasan BUMN.
- c. Rapat Pembahasan Rancangan RKAP Tahun 2024,
Rapat pembahasan Rancangan RKAP Tahun 2024 dilakukan dalam beberapa kali kegiatan dengan mengikutsertakan Komite-komite, Pembahasan RKAP dilakukan secara intensif mengingat Dewan Pengawas harus memberikan pendapat mengenai RKAP yang disiapkan Direksi sebelum ditandatangani bersama.
- d. Rapat Pembahasan Kinerja Perusahaan Tahun 2024
Rapat pembahasan kinerja dilakukan dalam beberapa kali rapat dengan Direksi dan Pemilik Modal sebelum disahkan oleh Menteri BUMN selaku Pemilik Modal.
- e. Pemberian saran dan masukan kepada Direksi dalam pengurusan Perusahaan, Pemberian saran atau masukan kepada Direksi disampaikan dalam Rapat Dewan Komisaris dengan

Direksi, Pemberian saran dan masukan tersebut didokumentasikan dalam risalah rapat dan/atau surat tersendiri yang memuat hal-hal terkait dengan permasalahan-permasalahan diantaranya :

- Pencapaian kinerja keuangan
 - Pencapaian kinerja operasional
 - Pengelolaan manajemen risiko
 - Penerapan GCG
 - Pengelolaan informasi dan teknologi
 - Pengelolaan investasi
 - Pemenuhan kepatuhan (*compliance*)
 - Masalah-masalah strategik lainnya
- f. Evaluasi Kinerja Audit yang Dilakukan oleh Auditor Eksternal
Evaluasi dilakukan dengan mengadakan rapat-rapat yang terkait dengan proses seleksi untuk KAP, pengusulan KAP, dan evaluasi pelaksanaan audit yang dilakukan oleh auditor eksternal, Dalam pelaksanaan tugas ini Dewan Pengawas secara khusus melakukan evaluasi dengan bantuan Komite Audit.
- g. Evaluasi Terhadap Sistem Pengendalian Intern
Dewan Pengawas melakukan evaluasi terhadap efektivitas sistem pengendalian internal berdasarkan *review* yang dilakukan oleh Komite Audit, Berdasarkan masukan Komite Audit, Dewan Pengawas memberikan pendapat terhadap kecukupan sistem pengendalian internal kepada Direksi.

1.2 Aspek Pelaporan

Aspek pelaporan terkait dengan kewajiban Dewan Pengawas untuk melaporkan aktivitas/kegiatan Dewan Pengawas dalam tahun 2024 sebagaimana diatur dalam ketentuan dan perundang-undangan lainnya yang berlaku, yaitu:

- a. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Pengawas Tahun 2024.
- b. Menyusun dan mengusulkan Indikator Pencapaian Kinerja (IPK) Dewan Komisaris Tahun 2024.
- c. Menyusun Laporan Triwulanan Perkembangan Realisasi KPI tahun 2024.
- d. Menyusun Laporan Tugas Pengawasan tahun 2024.
- e. Memberikan tanggapan/pendapat terhadap hal-hal yang memerlukan persetujuan dan/atau rekomendasi Dewan Pengawas seperti yang diatur dalam peraturan atau peraturan lainnya namun tidak terbatas pada :
 - Pengesahan RKAP Perusahaan
 - Pendapat tentang Laporan Manajemen
 - Pengusulan auditor eksternal untuk penugasan audit atas Laporan Keuangan Tahun 2023

1.3 Aspek Dinamis

Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dewan Pengawas dalam tahun 2024 adalah:

- a. Kunjungan kerja ke Biro-Biro daerah dalam rangka monitoring dan pengawasan.
- b. Seminar/workshop dalam rangka peningkatan kompetensi anggota Dewan Pengawas dan Komite-komite di bawah Dewan Pengawas.

1.4 Jadwal Kegiatan Dewan Pengawas

Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dewan Pengawas sebagai berikut:

No	Program Kerja	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	ASPEK PENGAWASAN DAN PENGARAHAN												
1	Rapat Internal Dewan Pengawas	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2	Rapat Gabungan Dewan Pengawas dan Direksi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	Rapat Pembahasan Penyusunan RKAP Tahun 2025										√	√	
4	Rapat Pembahasan Kinerja Perusahaan Tahun 2024				√			√			√		
5	Pemberian Saran dan Masukan Kepada Direksi dalam Pengurusan Perusahaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6	Evaluasi Kinerja Audit yang Dilakukan oleh Auditor Eksternal		√								√		
7	Evaluasi Terhadap Sistem Pengendalian Internal						√						√
II	ASPEK PELAPORAN												
1	Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Pengawas Tahun 2025									√	√		
2	Menyusun dan Mengusulkan Indikator Pencapaian Kinerja Dewan Pengawas Tahun 2025									√	√		
3	Menyusun Laporan Triwulanan Perkembangan Realisasi KPI tahun 2024				√			√			√		
4	Menyusun Laporan Tugas Pengawasan Tahun 2023	√	√										
5	Memberikan tanggapan / pendapat terhadap hal-hal yang memerlukan persetujuan dan / atau rekomendasi Dewan Pengawas sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan dan ketentuan lainnya				√			√			√		
III	ASPEK DINAMIS												
1	Kunjungan Kerja ke Biro-Biro Daerah	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	
2	Seminar / Workshop dalam rangka peningkatan kompetensi Anggota Dewan Pengawas dan organ-organ pendukung Dewan Pengawas				√			√				√	

Tabel 8. 2 Jadwal Kerja Dewan Pengawas 2024

4. Key Performance Indicator (KPI) Dewan Pengawas

Masing-masing kegiatan/aktivitas dalam Program Kerja Dewan Pengawas tersebut di atas dirumuskan kuantitasnya, Kuantitas inilah yang menjadi tolok ukur capaian kinerja Dewan Pengawas.

Untuk keperluan penilaian kinerja Dewan Pengawas secara keseluruhan dalam satu periode penugasan, masing-masing aktivitas/kegiatan diberikan bobot, Dengan adanya bobot tersebut, penilaian atas capaian masing-masing aktivitas/kegiatan dapat dihitung secara proporsional dan apabila dijumlahkan akan diperoleh penilaian atas capaian kinerja Dewan Pengawas secara keseluruhan.

No	Program Kerja	KPI		Bobot
		Jumlah	Satuan	
I	ASPEK PENGAWASAN DAN PENGARAHAN			60
1	Rapat Internal Dewan Pengawas	12	Rapat	12
2	Rapat Gabungan Dewan Pengawas dan Direksi	12	Rapat	12
3	Rapat Pembahasan RKAP Tahun 2025	1	Rapat	4
4	Rapat Pembahasan Kinerja Perusahaan Tahun 2024	3	Rapat	4
5	Pemberian Saran dan Masukan Kepada Direksi Dalam Pengurusan Perusahaan	12	Dokumen	24
6	Evaluasi Kinerja Audit Yang Dilakukan oleh Auditor Eksternal	2	Rapat	2
7	Evaluasi Terhadap Sistem Pengendalian Internal	2	Rapat	2
	<i>Sub Jumlah I</i>			60
II	ASPEK PELAPORAN			30
1	Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Pengawas Tahun 2025	1	Dokumen	5
2	Menyusun dan Mengusulkan Indikator Pencapaian Kinerja Dewan Pengawas Tahun 2025	1	Dokumen	4
3	Menyusun Laporan Triwulanan Perkembangan Realisasi KPI tahun 2024	4	Dokumen	8
4	Menyusun Laporan Tugas Pengawasan Tahun 2023	1	Dokumen	5
5	Memberikan tanggapan/ pendapat terhadap hal-hal yang memerlukan persetujuan dan/ atau rekomendasi Dewan Pengawas sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan dan ketentuan lainnya	3	Dokumen	8
	<i>Sub Jumlah II</i>			30
III	ASPEK DINAMIS			10
1	Kunjungan Kerja ke Biro-Biro Daerah	10	Kegiatan	5
2	Seminar / Workshop dalam rangka peningkatan kompetensi Anggota Dewan Pengawas dan organ-organ pendukung Dewan Pengawas	5	Kegiatan	5
	<i>Sub Jumlah III</i>			10
	<i>Jumlah</i>			100

Tabel 8. 3 KPI Dewan Pengawas 2024

Hasil penilaian kinerja Dewan Pengawas dikategorikan dalam 5 (lima) kriteria, yaitu:

No,	Realisasi Skor	Kriteria
1,	≥ 95 (maksimal 100)	Sangat Baik
2,	> 80 s,d, 94	Baik
3,	> 65 s,d, 80	Cukup
4,	> 50 s,d, 65	Kurang
5,	≤ 50	Sangat Kurang

Tabel 8.4 Kriteria Penilaian Dewan Pengawas Antara

5. Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Pengawas

Anggaran Dewan Pengawas Tahun 2024 disusun berdasarkan program kerja/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 sebesar Rp, 1,062,430,000,00 (satu milyar enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh ribu) dengan rincian kegiatan dan anggaran sebagai berikut:

NO	NAMA PROGRAM & KEGIATAN
1	Rapat Kerja Pengawasan - 2024 untuk Rencana Kerja Dewan Pengawas 2024
2	Fungsi Perencanaan - Penyusunan RKAP 2025, RJPP 2025-2029 dan Pengawasan atas Kesesuaian RKAP 2023-2024 dengan RJPP 2020-2024
	a Pengawasan kesesuaian RKAP 2024 terhadap RJPP dan Roadmap 2020-2024
	b, Pembahasan RJPP, RKAP dan Roadmap 2025-2029
	c, Pembahasan RJPP, RKAP dan Roadmap 2025 -2029
	d Penandatanganan Kontrak Manajemen Tahunan 2025
3	Melakukan review atas realisasi RKAP per Bulan dan Triwulan
	a Bulanan (Realisasi Kegiatan dan Serapan Anggaran)
	b, Triwulanan (Realisasi Kegiatan dan Serapan Anggaran)
4	Pemantauan atas Pelaksanaan Aspek Environment, Social, Governance (ESG)
	a Pengecekan lapangan atas program ESG yang dijalankan perusahaan
	b, Pengawasan terhadap Kebijakan dan Pelaksanaan Mutu dan Pelayanan
	c, Pemantauan dan Pemberian Saran atas isu-isu yang secara Signifikan yang berdampak pada Perusahaan
5	Memastikan Visi dan Misi Masterplan 2020-2024 dan Arah Taktis
6	Pengawasan atas Aspirasi Pemegang Saham Fungsi Keuangan
	a Pengawasan terhadap Kebijakan Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan (4 kali setahun)
	b, Mengajukan Calon Auditor Eksternal dan Pemantauan atas pelaksanaan Audit
	c, Pemantauan atas Tindak lanjut Rekomendasi Audit Internal, Eksternal, Fungsi Manajemen Risiko & Kepatuhan, Nasihat & hasil pengawasan Dewan Pengawas)
7	Pemantauan atas upaya Direksi dalam penguatan Sistem Pengendalian Intern
	a Pemantauan terhadap Efektivitas Audit Internal (SPI)
	b, Pengawasan terhadap Kebijakan dan Pelaksanaan Manajemen Risiko
	c, Sistem Penanganan Pengaduan (WBS)
8	Pemantauan atas Pelaksanaan Fungsi Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (TJSL)
9	Pengawasan terhadap Kebijakan Sumber Daya Manusia, Sistem, dan Organisasi - Merupakan kelanjutan dari Surat DEWAS merespon Usulan Struktur Organisasi ANTARA pada tahun 2023
10	Pengawasan terhadap Kebijakan dan Pelaksanaan Sistem Teknologi Informasi (TI) dengan mengundang pakar di bidang IT
11	Pengawasan terhadap Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan
12	Pengawasan atas Inisiatif Strategis dan KPI Klaster Danareksa dan Sub Klaster Media
13	Pengawasan terhadap Kebijakan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (peninjauan kelengkapan dan evaluasi dengan bagian pengadaan)
14	Persetujuan atas Transaksi atau Tindakan dalam wewenang Dewan Pengawas
15	Pengawasan terhadap Arah dan Kebijakan Pengelolaan Anak Perusahaan
16	Pemantauan Pemilihan Calon Pengurus (Direksi dan Komisaris) Anak Perusahaan

NO	NAMA PROGRAM & KEGIATAN
17	Evaluasi Kinerja Semester I
18	Pemberian Tanggapan atas Usulan Remunerasi Direksi (usulan di bulan Maret setelah audit 2023 selesai)
19	Pemantauan dan Pengawasan atas Implementasi (GCG) Biro Daerah, Luar Negeri dan Benchmarking Kantor Berita Luar Negeri (Internasional)
	a, Pengawasan Ke Biro- Biro Daerah
	b, Pengawasan Biro LN dan Benchmarking ke Kantor Berita di Tiongkok
	c, Asessment GCG oleh BPKP tahun 2024
20	Pengukuran Penilaian Kinerja Dewan Pengawas
21	Menyusun Laporan Tahun Dewan Pengawas
22	Mengikuti Pelatihan (Master Class) dan forum lainnya sesuai kebutuhan Perusahaan
23	Menghadiri Acara (Pertemuan-Pertemuan) internal dan Eksternal
24	Rapat Internal Dewan Pengawas

Tabel 8. 5 Rencana Anggaran Belanja Dewan Pengawas

BAB IX

PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

I. Kondisi Umum

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN (Program TJSJL BUMN) adalah kegiatan yang merupakan komitmen perusahaan terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis perusahaan.

Pelaksanaan Program TJSJL Perum LKBN Antara berorientasi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) serta berpedoman kepada Strategi dan Visi Misi Perusahaan sebagai panduan pelaksanaan program, dengan harapan pelaksanaan Program TJSJL yang lebih terukur, berdampak dan berkelanjutan.

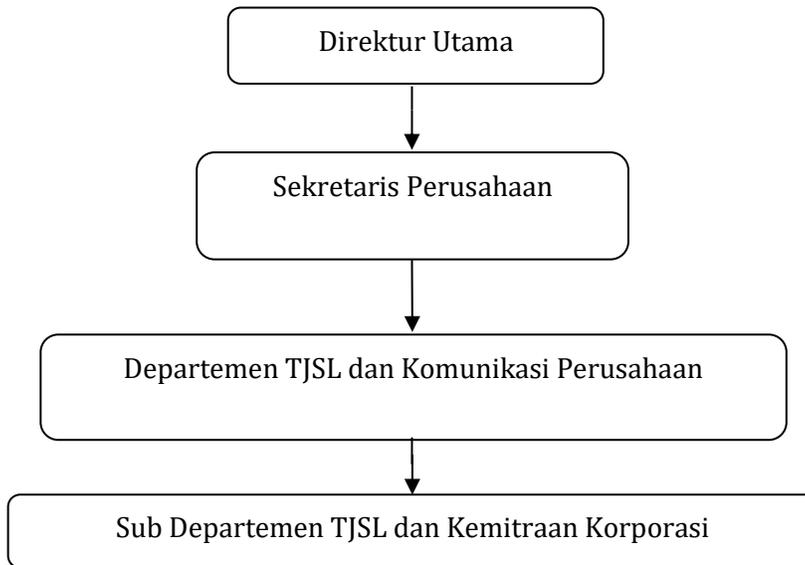
Program TJSJL Perum LKBN Antara bertujuan untuk:

1. Memberikan kemanfaatan bagi pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan lingkungan serta pembangunan hukum dan tata kelola bagi perusahaan.
2. Berkontribusi pada penciptaan nilai tambah bagi perusahaan dengan prinsip yang terintegrasi, terarah dan terukur dampaknya serta akuntabel.
3. Membina usaha mikro dan usaha kecil agar lebih tangguh dan mandiri serta masyarakat sekitar perusahaan.

Perum LKBN Antara sebagai BUMN memiliki kewajiban kepada Kementerian BUMN sebagai stakeholder dalam pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, adapun tujuan Perum LKBN Antara mengembangkan kegiatan TJSJL adalah sebagai berikut.

1. Pada tingkat internal, terjadi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Perum LKBN Antara agar mampu mengelola kegiatan yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan perusahaan;
2. Meningkatkan kualitas pemahaman dan persepsi yang sama antara Perum LKBN Antara dengan mitra agar terciptanya saling pengertian yang positif dan kondusif guna membantu meningkatkan daya dorong dan posisi tawar Perum LKBN ANTARA selaku salah satu elemen dalam masyarakat Indonesia;
3. Melaksanakan program/kegiatan yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi lingkungan di sekitar BUMN untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal; dan
4. Menumbuhkan sinergitas dengan BUMN, pelaku usaha, instansi pemerintah atau instansi terkait lainnya dalam mengelola suatu program yang sepenuhnya bermanfaat bagi masyarakat luas, di dalam maupun di luar negeri.

Adapun struktur organisasi TJSL Perum LKBN ANTARA adalah sebagai berikut:



Sebelum merumuskan program-program TJSL, ANTARA telah melakukan identifikasi risiko-risiko sebagai landasan rancangan program TJSL yang akan dilakukan yang dapat mempengaruhi sasaran strategis perusahaan, baik terkait aspek ekonomi, lingkungan dan sosial dan menentukan upaya mitigasi yang tepat melalui pelaksanaan kegiatan TJSL, dengan uraian sebagai berikut:

Sasaran/Target	Risiko	Upaya Mitigasi (Program TJSL)
Literasi Media	Pemberitaan tidak sesuai dengan Fakta (Hoaks)	Peningkatan Kompetensi Jurnalistik, dengan memberikan pelatihan kepada Jurnalis Muda
Reputasi perusahaan	Penurunan citra/reputasi perusahaan	Bantuan bencana alam, penghijauan, Pembinaan UMK
Pembaca (<i>Viewers</i>)	Berita ANTARA dianggap tidak relevan dengan masa kini	Pelatihan untuk mahasiswa/i dan komunitas muda
Bisnis Perusahaan	Penurunan pelanggan/jumlah mitra	Beberapa program TJSL dirancang untuk membuka kesempatan kerjasama komersil, yaitu Peningkatan Kompetensi Jurnalistik dan Kepedulian Lingkungan

Tabel 10. 1 Upaya mitigasi melalui kegiatan TJSL

Untuk mendukung pelaksanaan program TJSL, Perum LKBN Antara mengacu pada 4 pilar utama yang merupakan penggolongan dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), yaitu:

1. Pilar Sosial, untuk tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat;
2. Pilar Lingkungan, untuk pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan;
3. Pilar Ekonomi, untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusi, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan;

4. Pilar Hukum dan Tata Kelola, untuk terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum.

II. Gambaran Singkat Kinerja Program TJSL sampai dengan Prognosa 2023

Kegiatan program TJSL tahun 2023 diprioritaskan pada Pilar Sosial dan Pilar Lingkungan menyesuaikan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), yang mencakup sebagai berikut:

1. Program Prioritas

a) Program Bidang Pendidikan

No	Program di Bidang Pendidikan	RKA 2023	Prognosa 2023	% Prognosa thd RKA
1	Uji Kompetensi Wartawan	Rp160.000.000,-	Rp185.911.247,-	116%
2	Pelatihan Wartawan	Rp70.000.000,-	Rp60.478.800,-	86%
3	Literasi Media	Rp60.000.000,-	RP15.346.650,-	26%
4	Kolaborasi Bantuan Pendidikan	Rp50.000.000,-	Rp50.000.000,-	100%
Total		Rp340.000.000,-	Rp311.736.697,-	92%

Tabel 10. 2 Program Bidang Pendidikan

Adapun uraian kegiatan dari program Bidang Pendidikan, sebagai berikut:

1) Uji Kompetensi Wartawan

Uji Kompetensi Wartawan (UKW) diselenggarakan menysasar para wartawan yang belum tersertifikasi kompetensi wartawan. Adapun sertifikasi wartawan memiliki jenjang yaitu, Sertifikasi Wartawan Mudan, Sertifikasi Wartawan Madya dan Sertifikasi Wartawan Utama, yang masing-masing sertifikasi di uji 2 tahun sekali per jenjang.

ANTARA sebagai Kantor Berita Negara merasa memiliki tanggung jawab untuk mensertifikasi kompetensi wartawan khususnya internal dan eksternal pada umumnya.

Pada tahun 2023 ANTARA menargetkan sertifikasi 30 wartawan baik internal maupun eksternal berkolaborasi dengan 2 biro perwakilan di daerah untuk menyelenggarakan UKW dengan total peserta lulus sertifikasi sebanyak 31 wartawan dan dilaksanakan pada:

- 10-11 Februari 2023 di Medan, Sumatera Utara dengan total peserta lulus sertifikasi kompetensi wartawan sebanyak 24 wartawan.
- 8-9 Agustus 2023 di Kendari, Sulawesi Tenggara dengan total peserta lulus sertifikasi wartawan sebanyak 7 wartawan.

Dari hasil sertifikasi kompetensi kepada 31 wartawan tersebut, ANTARA selain dipercaya sebagai penyedia jasa informasi dan media yang akurat dan terpercaya juga dipercaya sebagai salah satu lembaga sertifikasi wartawan oleh para stakeholder.

2) Pelatihan Wartawan

Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet di Indonesia mencapai 215,63 juta orang pada 2022-2023, dimana jumlah tersebut berisiko tinggi dapat menjadi objek penyebaran informasi hoaks yang berpotensi menimbulkan keresahan umum. Menurut data Kementerian

Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia peredaran informasi atau isu Hoaks sepanjang tahun 2022-2023 adalah sebanyak 1.944 isu.

Fakta tersebut membuat media, terutama media *online* sangat dibutuhkan untuk menjadi penyeimbang dengan memberikan informasi yang akurat dan dapat mengedukasi publik untuk dapat membedakan antara informasi hoaks dengan informasi yang akurat serta berimbang.

Namun, yang harus tetap diketahui dan diingat adalah, dalam melakukan tugasnya, seorang jurnalis dituntut untuk mematuhi kode etik jurnalistik sesuai undang-undang pers nomor 40 tahun 1999 dan memastikan praktik jurnalisisme yang dilakukan berkualitas dan etis.

Kode etik adalah suatu sistem norma, nilai dan juga aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar, baik serta apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional.

Fungsi dan manfaat kode etik jurnalistik bagi seorang jurnalis:

- Meningkatkan kepercayaan Masyarakat.
- Membuat berita dengan sudut yang objektif
- Perlindungan terhadap profesi jurnalis
- Kualitas berita tetap terjaga
- Menjaga hukum dan etika
- Menjaga integritas profesi.

Dengan latar belakang tersebut, Perum LKBN Antara memandang perlunya membuat sebuah pelatihan yang dapat mengingatkan kembali para rekan jurnalis untuk menjaga kode etik jurnalistik dan menyampaikan informasi yang faktual juga berimbang, serta menguatkan tekad untuk tetap memegang teguh prinsip dasar dalam menjalankan tugas sebagai seorang jurnalis.

Pada tahun 2023 Perum LKBN Antara menyelenggarakan pelatihan kepada total 120 wartawan baik internal maupun eksternal dengan data sebagai berikut:

- Menyelenggarakan pelatihan kepada wartawan dengan tajuk “Peran Jurnalis di Tengah Informasi Hoax di Masyarakat” yang diselenggarakan secara offline kepada 40 wartawan dari berbagai media daring, elektronik maupun cetak di Batam, Kepulauan Riau pada tanggal 22 Februari 2023;
- Menyelenggarakan pelatihan kepada wartawan dengan tajuk “Menjaga Kode Etik Jurnalistik Dalam Mengantisipasi Potensi Hoaks Menghadapi Tahun Politik” yang diselenggarakan secara hybrid kepada 80 wartawan dari berbagai media daring, elektronik maupun cetak di Surabaya, Jawa Timur pada 24 Oktober 2023.

Pelatihan jurnalis memiliki berbagai dampak positif, baik pada individu yang menjalani pelatihan maupun pada industri jurnalisisme dan masyarakat secara umum. Beberapa dampak penting dari pelatihan jurnalis ini meliputi:

- Peningkatan Kualitas Berita
- Meningkatkan kepatuhan akan Etika Jurnalistik
- Peningkatan Kesadaran terhadap Isu-isu Penting
- Meningkatkan jumlah pembaca/*viewer* karen meningkatnya kepercayaan publik
- Pengembangan Karier
- Mendorong Kepemimpinan Media.

Outcome:

- Semakin luas jangkauan pemberitaan terkait Perum LKBN Antara sebagai *brand* dan korporasi diukur dari media monitoring.
- Terbuka kesempatan mendapatkan pelanggan baru dilihat dari peninjauan kerjasama.

3) Literasi Media

Program Literasi Informasi berupa *ANTARA Goes to Campus (AGC)* merupakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) tahunan perusahaan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2016 ke berbagai Sekolah dan Universitas di beberapa wilayah di Indonesia. Namun sejak Pandemi program AGC sempat terhenti disebabkan situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan.

Pada tahun 2023 Perum LKBN Antara kembali menyelenggarakan kegiatan AGC untuk mengenalkan produk-produk serta keberadaan Perum LKBN Antara sebagai Kantor Berita Indonesia.

Adapun beberapa tujuan dari kegiatan tersebut salah satunya adalah sebagai berikut:

- Memperkenalkan Perum LKBN Antara sebagai Kantor Berita Indonesia yang tersebar di seluruh Provinsi di Indonesia dan berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara;
- Memperkenalkan produk-produk digital Perum LKBN Antara seperti portal berita, media sosial, dan sebagainya;
- Memberikan edukasi dan meningkatkan pemahaman mengenai perkembangan jurnalistik di Era Digital;
- Meningkatkan pemahaman mengenai perkembangan beredarnya berita bohong (hoaks) di masyarakat;
- Meningkatkan kesadaran dalam menangkal berita hoaks yang beredar di masyarakat;
- Memperkenalkan alat bantu (*tools*) yang dapat digunakan untuk mengenali dan membuktikan berita hoaks;
- Memperkenalkan keberadaan Desk Radar, Viral dan JACX dari Kantor Berita Antara

Pada tahun 2023 Perum LKBN Antara berkesempatan menyelenggarakan AGC kepada lima puluh mahasiswa/i dari berbagai Fakultas di Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat dengan tajuk “Yuk Bareng ANTARA Tangkal Hoaks” pada tanggal 23 Juni 2023.

Outcome:

- Reputasi Perum LKBN Antara meningkat dilihat dari survei dan media monitoring
- Terbentuknya komunitas muda bagi Perum LKBN Antara
- Penguatan *positioning* Perum LKBN Antara sebagai Kantor Berita Indonesia

4) Kolaborasi Bantuan Pendidikan

Setelah melaksanakan kolaborasi bantuan Pendidikan Kewirausahaan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022, pada tahun 2023 Perum LKBN Antara kembali berkolaborasi dengan Yayasan BUMN sesuai PKS yang ditandatangani Perum

LKBN ANTARA dengan Yayasan BUMN Nomor: HK.08.000/045/SETPER.ANT/PKS/2023 dan Nomor: 022/PKSP/YB-0/V/2023 tentang Dukungan Pelaksanaan Program Pendidikan Kewirausahaan.

b) Program Bidang Lingkungan

No	Program di Bidang Lingkungan	RKA 2023	Prognosa 2023	% Prognosa thd RKA
1	Bantuan Bencana Alam	Rp20.000.000,-	Rp20.000.000	100%
2	Transplantasi Terumbu Karang	Rp20.000.000,-	Rp28.388.100,-	142%
3	Penghijauan (Penanaman Pohon NonMangrove)	Rp20.000.000,-	Rp20.001.900,-	100%
Total		Rp50.000.000,-	Rp50.481.800,-	101%

Tabel 10.3 Program Bidang Lingkungan

Adapun uraian kegiatan dari program Bidang Lingkungan, sebagai berikut:

1) Bantuan Bencana Alam

Memberikan bantuan berupa air bersih sebanyak 350.000 liter kepada masyarakat di 3 kecamatan di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta tanggal 7 November 2023.

2) Transplantasi Terumbu Karang

Perum LKBN Antara bekerja sama dengan Penggiat konservasi laut “Rubiah Tirta Diver” dengan menyelenggarakan kegiatan transplantasi terumbu karang di kawasan Iboih dan Pulau Rubiah, Kota Sabang pada 15 Agustus 2023. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menggelorakan semangat merawat lingkungan bawah laut agar tetap asri dan indah yang dimulai dari kawasan Nol Indonesia. Total bibit terumbu karang yang ditanam sekitar seratus enam puluh bibit dari delapan modul. Pemilihan kawasan Pulau Rubiah, Iboih, Kota Sabang sebagai lokasi transplantasi terumbu karang berdasarkan pada fakta bahwa kawasan laut tersebut juga sangat terdampak saat peristiwa tsunami Aceh pada tahun 2004.

Outcome:

- Terbukanya kesempatan kerjasama dengan mitra baru
- Reputasi Perum LKBN Antara meningkat dilihat dari survei dan *media monitoring*

3) Penghijauan (Penanaman Pohon NonMangrove)

Perum LKBN Antara melalui kantor Biro di Kepulauan Riau menyelenggarakan kegiatan Bersih-Bersih Pulau dan Penanaman Bibit Pohon Kelapa pada tanggal 1 Agustus 2023 di Pulau Berhanti, yang merupakan pulau terluar di provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan tersebut mengajak TNI, POLRI, Nelayan dan masyarakat sekitar untuk melakukan bersih-bersih dan menanam bibit pohon kelapa di pulau Berhanti.

Outccome:

- Terbukanya kesempatan kerjasama dengan mitra baru
- Reputasi Perum LKBN Antara meningkat dilihat dari survei dan *media monitoring*

c) Program Bidang Ekonomi

No	Program di Bidang Ekonomi	RKA 2023	Prognosa 2023	% Prognosa thd RKA
1	Pelatihan Pengembangan UMK di NTB	Rp40.000.000,-	Rp22.775.500,-	57%
2	Program Mudik Gratis	-	Rp40.493.150,-	-
3	Fasilitas PRasarana UMK	Rp60.000.000,-	Rp56.605.153,-	94%
Total		Rp100.000.000,-	Rp119.873.303,-	120%

Tabel 10. 4 Program Bidang Ekonomi

Adapun uraian kegiatan dari program Bidang Pengembangan UMK, sebagai berikut:

1) Pelatihan Pengembangan UMK di NTB

Pelatihan UMK dilaksanakan yang ke-4 kalinya di Sembalun, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat dengan tajuk "Strategi Komunikasi Bisnis dan Standar Penyajian Produk UMK". Narasumber berasal dari NTB MALL dan Wakil Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Cabang NTB, dimana penyelenggaraan acara tersebut dibantu oleh Tim Biro NTB dengan jumlah peserta sebanyak 20 UMK.

Outcome:

- Terbukanya kesempatan kerjasama dengan mitra baru.
- Reputasi Perum LKBN Antara meningkat dilihat dari survei dan *media monitoring*.
- *Positioning* Perum LKBN Antara sebagai perusahaan BUMN yang memiliki berbagai macam lini bisnis.

2) Program Mudik Gratis

Memberikan fasilitas mudik kepada karyawan internal perusahaan khususnya keberangkatan dari Jakarta dengan tujuan Surabaya yang dilaksanakan berkolaborasi dengan BUMN lain dan berangkat pada tanggal 18 April 2023.

Outcome:

- Terbukanya kesempatan kerjasama dengan mitra baru
- Reputasi Perum LKBN Antara meningkat dilihat dari survei dan *media monitoring*

3) Fasilitas Prasarana UMK

Rencana pelaksanaan pada bulan Desember 2023 pada acara HUT perusahaan dengan memberikan prasarana berupa tenda dan kursi kepada UMK di lingkungan sekitar kantor

Outcome:

- Terbukanya kesempatan kerjasama dengan mitra baru.
- Reputasi Perum LKBN Antara meningkat dilihat dari survei dan *media monitoring*.
- *Positioning* Perum LKBN Antara sebagai perusahaan BUMN yang memiliki berbagai macam lini bisnis.

III. Proyeksi Kinerja Program TJSJ Tahun 2024

Program TJSJ pada Perum LKBN Antara disusun dengan melakukan identifikasi risiko-risiko seperti yang sudah diuraikan sebelumnya pada tabel 10.1 sebagai landasan rancangan program TJSJ yang akan dilakukan, dimana dapat mempengaruhi sasaran strategis perusahaan, baik terkait aspek ekonomi, lingkungan dan sosial, serta menentukan upaya mitigasi yang tepat melalui pelaksanaan kegiatan TJSJ.

Untuk mendukung pelaksanaan program TJSJ, Perum LKBN Antara mengacu pada 4 pilar utama yang merupakan penggolongan dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), yaitu:

1. Pilar Sosial, untuk tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh Masyarakat.
2. Pilar Lingkungan, untuk pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan.
3. Pilar Ekonomi, untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusi, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan.
4. Pilar Hukum dan Tata Kelola, untuk terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas, berikut anggaran untuk setiap pilar:

No	TPB	RKA 2023 (Rp)	Prognosa 2023 (Rp)	RKA 2024 (Rp)	Presentase (%)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = 4:2	(6) = 4:3
A	PILAR SOSIAL	340.000.000	311.736.697	370.000.000	109	119
B	PILAR EKONOMI	100.000.000	119.873.303	70.000.000	70	58
C	PILAR LINGKUNGAN	60.000.000	68.390.000	60.000.000	89	100
D	PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA	275.000.000	303.803.837	303.803.837	110	100
TOTAL		775.000.000	803.803.837	803.803.837	110	100

Tabel 10. 5 Anggaran Keseluruhan Program TJSJ Perusahaan

NO	TPB	RKA 2023 (Rp)	Prognosa 2023 (Rp)	RKA 2024 (Rp)	Presentase (%)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = 4:2	(6) = 4:3
A	PILAR SOSIAL	340.000.000	311.736.697	370.000.000	109	119
B	PILAR EKONOMI	100.000.000	119.873.303	70.000.000	70	58
C	PILAR LINGKUNGAN	60.000.000	68.390.000	60.000.000	89	100
D	PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA	0	0	0	0	0
TOTAL		500.000.000	500.000.000	500.000.000	100	100

Tabel 10. 6 Anggaran Program – CID non PUMK

No	TPB	RKA 2023 (Rp)	Prognosa 2023 (Rp)	RKA 2024 (Rp)	Presentase (%)	
					(5) = 4:2	(6) = 4:3
	(1)	(2)	(3)	(4)		
A	PILAR SOSIAL	0	0	0	0	0
B	PILAR EKONOMI	0	0	0	0	0
C	PILAR LINGKUNGAN	0	0	0	0	0
D	PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA	275.000.000	303.803.837	303.803.837	110	100
TOTAL		275.000.000	303.803.837	303.803.837	110	100

Tabel 10. 7 Anggaran Program – non CID

Program TJSJL Perum LKBN Antara pada tahun 2024 terdiri atas:

a) Program Bidang Pendidikan

No	Program di Bidang Pendidikan	RKA 2024 (Rp)	Target Output
1	Peningkatan Kompetensi Jurnalistik	190.000.000	150 Wartawan
2	Pelatihan Mahasiswa dan Komunitas	70.000.000	100 Mahasiswa
3.	Literasi Media	60.000.000	100 Mahasiswa
4.	Kolaborasi Bantuan Pendidikan	50.000.000	Tersampaikan

Tabel 10. 8 Program Prioritas Pendidikan

Adapun uraian kegiatan dari program Bidang Pendidikan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kompetensi Jurnalistik

Penyelenggaraan pelatihan terkait kompetensi jurnalistik bagi generasi jurnalis muda untuk menghasilkan jurnalis muda yang kompeten dengan target peserta pada tahun 2024 sebanyak 150 peserta dimana rencana biaya kegiatan tersebut sebesar Rp190.000.000,-

Outcome:

- Semakin luas jangkauan pemberitaan terkait Perum LKBN Antara sebagai *brand* dan korporasi diukur dari *media monitoring*.
- Terbukanya kesempatan mendapatkan pelanggan baru dilihat dari penajakan kerjasama
- *Positioning* Perum LKBN Antara sebagai satu-satunya Kantor Berita Negara

2. Pelatihan Mahasiswa dan Komunitas

Memberikan workshop kepada mahasiswa dan komunitas disela-sela pelaksanaan pameran foto yang diselenggarakan oleh Perum LKBN Antara dengan rencana biaya kegiatan sebesar Rp70.000.000,-

Outcome:

- Reputasi Perum LKBN Antara meningkat dilihat dari survei dan *media monitoring*.
- Terbentuknya komunitas muda bagi ANTARA.
- *Positioning* Perum LKBN Antara sebagai satu-satunya Kantor Berita Negara.

3. Literasi Media

Literasi media dalam rangka edukasi jurnalistik kepada mahasiswa Jabodetabek (*Antara Youth Community*) secara tatap muka dengan rencana biaya kegiatan tersebut sebesar Rp60.000.000,-

Outcome:

- Reputasi Perum LKBN Antara meningkat dilihat dari survei dan *media monitoring*
- Terbentuknya komunitas muda bagi Perum LKBN Antara
- *Positioning* Perum LKBN Antara sebagai media yang relevan dengan perkembangan zaman

4. Kolaborasi Bantuan Pendidikan

Memberikan sumbangan kolaborasi bantuan pendidikan melalui Yayasan BUMN sebesar Rp50.000.000,-

b) Program Bidang Lingkungan

No	Program di Bidang Lingkungan	RKA 2024 (Rp)	Target Output
1.	Bantuan Bencana Alam	20.000.000	Tersampaikan
2.	Fasilitas Umum	20.000.000	Tersampaikan
3.	Penanaman Pohon	20.000.000	Tersampaikan

Tabel 10. 9 Program Prioritas Lingkungan

Adapun uraian kegiatan dari program diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bantuan Bencana Alam

Bantuan bencana alam berupa dana/natura di daerah-daerah yang terdampak bencana alam dengan anggaran sebesar Rp20.000.000,-

2. Fasilitas Umum

Membangun fasilitas umum di lingkungan kantor Pusat dengan membangun taman dan menyediakan tempat sampah di area tertentu dengan anggaran sebesar Rp20.000.000,-

3. Penanaman Pohon

Kampanye penghijauan dengan memberikan bibit tanaman kepada pengunjung yang hadir pada penyelenggaraan pameran foto yang diselenggarakan oleh Perum LKBN Antara dengan anggaran sebesar Rp20.000.000,-

c) Program Ekonomi

No	Program di Bidang Pengembangan UMK	RKA 2024 (Rp)	Target Output
1	Pembinaan UMK	70.000.000	50 UMK

Tabel 10. 10 Program Prioritas Pengembangan UMK

Tujuan program diatas yaitu, agar para UMK mampu untuk memasarkan produk mereka disekitar area pameran foto yang diselenggarakan oleh Perum LKBN Antara. Dengan adanya program tersebut, diharapkan perekonomian dan pangsa pasar para UMK tersebut dapat lebih meningkat dibandingkan sebelumnya.

IV. Dokumentasi Kegiatan Program Prioritas Program TJSL Prognosa 2023

1. Uji Kompetensi Wartawan

Dilaksanakan di 2 Kota yaitu, Kota Medan, Sumatera Utara dan Kota Kendari, Sulawesi Selatan.

- Kota Medan, Sumatera Utara



- Kota Kendari, Sulawesi Tenggara



2. Pelatihan Wartawan

Dilaksanakan di 2 Kota yaitu, Kota Batam dan Kota Surabaya

- Kota Batam



- Kota Surabaya



3. Program Mudik Gratis Bersama BUMN
Berkolaborasi dengan BUMN Lain yaitu Perum DAMRI



4. Literasi Media
Dilaksanakan di Kota Padang, Sumatera Barat



5. Pelatihan Pengembangan UMK
Dilaksanakan di Kabupaten Sembalun, Nusa Tenggara



6. Fasilitas Pra Sarana UMK Dilaksanakan di Pendopo Candi Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah



7. Bantuan Bencana Alam Dilaksanakan di Gunung Kidul, D.I.Y



8. Bantuan Bencana Alam Dilaksanakan di Gunung Kidul, D.I.Y



9. Penanaman pohon di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur



10. Bersih-bersih pantai dan penanaman bibit pohon kelapa di Pulau Berhanti, Kepulauan Riau



V. Kinerja Program PUMK

Perum LKBN ANTARA tidak melaksanakan program PUMK pada tahun 2023 dan berencana tidak melaksanakan program PUMK pada tahun 2024, karena Perusahaan belum memiliki anggaran khusus untuk program PUMK.

VI. Uraian terkait UMK Binaan ANTARA

ANTARA melakukan pembinaan kepada UMK melalui pelatihan dan penyediaan fasilitas prasarana, namun belum dapat diukur karena pelatihan tersebut baru dilaksanakan pertama kali. Berikut rincian tentang pelatihan dan penyediaan fasilitas prasarana UMK:

1. Pelatihan UMK

Pelaksanaan Pelatihan UMK dilaksanakan yang ke-4 kalinya di Sembalun, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat dengan tajuk "Strategi Komunikasi Bisnis dan Standar Penyajian Produk UMK" dengan narasumber dari NTB Mall dan Wakil Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Cabang NTB yang penyelenggaraannya dibantu oleh tim Biro NTB dengan jumlah peserta sebanyak 20 UMK.

Peserta Pelatihan UMK Sembalun 2023		
No.	Nama Lengkap	Jenis UMK
UMKM Jajanan Khas Sembalun		
1	Sukranep	Industri Penggilingan Kacang Mete
2	Hayanti	Industri Penggilingan Kacang Mete
3	Mantara	Kopi
4	Hanaman	Keripik Pisang
5	Yogi Siswanto	Madu Hutan
6	Rusniati	Jajanan Khas Sembalun
7	Jannatul Leskia	Sambal Khas Sembalun
8	Julis Effendi	Jambu Mete
UMKM Kopi		
9	Ustadz Undiandi	Kopi
10	Amiluddin	Kopi
11	Mardibi	Kopi
12	Megi Satria	Kopi
13	Choirul Fikri	Kopi
14	Riskan Fikri	Kopi
15	Hajrul Azmi	Kopi
16	Saiman	Kopi dan Cake
17	Syarif H	Kopi
18	Feri Cahyadi	Kopi
19	Armasih	Kopi
UMKM Tenun		
20	Inak Eni	Tenun
UMKM Jasa Wisata		
21	Zaenal Abidin	Jasa Trekking/Jasa Wisata

Tabel 10. 11 Peserta Pelatihan UMK Sembalun 2023

2. Fasilitas Prasarana UMK

Pelaksanaan program fasilitas Prasarana UMK dilakukan oleh LKBN Antara melalui Kegiatan Pelatihan UMK dengan memberikan prasarana berupa alat peraga foto produk untuk 40 Pelaku UMK yang berasal dari Yogyakarta dan Jawa Tengah dengan lokasi acara di sekitar area Candi Prambanan. Kegiatan ini berkolaborasi dengan Pihak BUMN lain yaitu, PT. TWC serta pihak swasta, yaitu PT. Huawei Indonesia.

No.	Nama Lengkap	Nama Bisnis / Usaha / UMKM
1	Abdul Mufied Nurudin	MFD Creative Design
2	Ike rohmaningrum	Mario snack
3	Fitri Widiyaningsih	Onolicious
4	Anang Riyadi	Wantara
5	Siti yulaechah	Dapur jiddan cake & cookies
6	Purwaningsih	Neng kitchen
7	Windu Astuti	Es lumut rafa ceta
9	Elyas rintiani	Sugie rasa
10	Isna Dwi Rosinta Sari	Maulana Food
11	Surasa Anggara	Ning'S Roti dan Snack / Forkom Kalasan
12	Dyah Kusumandari	MY DYDY : www.instagram.com/mydydy_official
13	Yoga Purwati	Nazifa Bedding
14	Ayu Novita Sari	Kanin.id(aneka fashion)
15	Legowo Sumarno	Batik dan Jumputan "BONKID
16	Winarti	Mubarak
17	Rizki Dwi Ardianto	Dapoer kania / food & bakery
18	Sri hastuti	MHM Snack
19	Sri windi astuti	Kalnetamode
20	Chindyarini Luvitasari	UMK Perintis
21	Tyas Ayu Nugraheni	UMK Perintis
22	erni irdewanti	UMK Perintis
23	Rezalia Nourmala V	UMK Perintis
24	Retnayu Molya	UMK Perintis
25	Catherine Olivia Mantik	UMK Perintis
26	Agastya ade gunawan	UMK Perintis
27	C. Upik Arum Sari	UMK Perintis
28	Swanida Noriswari	Candi Prambanan
29	iwan himawan	Candi prambanan
30	Erlin aprilia nur khasanah	Candi prambanan
31	Vita asmirasari	Candi Prambanan
32	Ambar sriningsih	Batik ambar
33	Sekar Sri Anjani	Candi Prambanan
34	Candra fajar raharja	Candi prambanan
35	Saeful Ghofur	Batik Tulis Prambanan
36	Tulakir	Tulakir Fiber Glass
37	Yustina Tri Wulandari	TI-A-S Snack
38	Elmawati	Cilok bang jack
39	Kristina Surami	D'vora fashion
40	Bimanti vatria pramudiarti	Candi prambanan
41	Dwi Emi Wahyuningsih	Toko Em -Ye/kelontong,home made kering kentang dan empon2 instan
42	Maryati	Icha fashion
43	yoga cahyo nugroho	warung soto sumilir
44	Setra Novian Tora	Jogsmeade
45	Desta ardi pratama	Candi Prambanan
46	Lovely Pinaria	Prambanan Ratu Boko
47	Rizki Fajarini	Candi Prambanan
48	Melati Soedjarwo	Ayune by Melati Soedjarwo
49	Arif Bogi Wibowo	Prambanan
50	Desi Purwati	Dapur dua Dewi
51	Eri Sundari	Teras Makan 3R
52	Syamsul Arifin	Industri Kue Basah
53	Natalia Purwanti	Dapur Wiliarda/Natalia Purwanti
54	Surasa Anggara	Ning'S Roti dan Snack
55	Samiyati	S'fia snack

Tabel 10. 12 Daftar Peserta Program Fasilitas Prasarana UMK

VII. Capaian KPI TJSL Tahun 2023 (Prognosa)

No	Indikator	Target	Bobot	Target	Realisasi	Nilai	Keterangan
1	Melakukan pengukuran dampak atas program TJSL dengan Metode Social Return on Investment (SROI)	3 program	20%	3	3	20%	Terealisasi 3 program yang dihitung menggunakan SROI
2	Ketersediaan kajian leveling unit kerja TJSL	Triwulan 2	20%	2	2	20%	Surat penyampaian atas leveling TJSL terbaru sudah disampaikan melalui email Keasdepan TJSL KBUMN. Surat KLA Dirut Nomor: 1141/KLA/DIR-AP/VI/2023 perihal Kajian Levelling Unit Kerja TJSL tanggal 27 Juni 2023
3	Pemenuhan pengisian sistem informasi berbasis TI Kementerian BUMN	4	20%	4	4	20%	Data disampaikan langsung dan melalui email Keasdepan TJSL KBUMN karena portal TJSL BUMN sedang dalam maintenance
4	Ketercapaian kerjasama antar BUMN atau pihak lain dalam program TJSL	3 program	20%	3	4	27%	ANTARA berkolaborasi dengan beberapa BUMN/Instansi lainnya dalam pelaksanaan program TJSL, sbb: 1. Kegiatan Mudik Bersama BUMN berkolaborasi dengan Jasa Raharja, Damri dan Sarinah 2. Kegiatan Transplantasi Terumbu Karang berkolaborasi dengan Pemkot Sabang dan Rubiah Tirta Diver 3. Pembinaan UMK berkolaborasi dengan TWC dan Huawei Indonesia 4. Penanaman Pohon di lokasi IKN Kalimantan Timur berkolaborasi dengan, BI Kaltim, PT Kideco Jaya Agung dan Telkomse
5	Keterlibatan karyawan berpartisipasi aktif dalam 1 kegiatan sosial kemasyarakatan baik yang berasal dari program TJSL perusahaan maupun dari luar perusahaan	Seluruh Karyawan Tetap (556 Karyawan)	20%	556	198	7%	Sejak April 2023 Dept Humas dan Kemitraan telah mensosialisasikan program Sosial dan Kemasyarakatan melalui presensi, dan menyediakan fasilitas pengisian
Total						94%	

Tabel 10. 13 Capaian KPI TJSL Tahun 2023 (Prognosa)

VIII. Key Performance Indicators (KPI) TJSL Tahun 2024

Pelaksanaan Program TJSL Perum LKBN Antara di tahun 2024 menyesuaikan dengan Arahan Pemegang Saham (APS) Fungsi TJSL pada S-491/MBU/09/2023, dengan rincian sebagai berikut:

No	Indikator	Target	Bobot
1	Melakukan pengukuran dampak terhadap program TJSL dengan menggunakan metode <i>Social Return On Investment</i> (SROI).	3 program (salah satunya program CSV)	20%
2	Kebijakan <i>levelling</i> fungsi yang membidangi <i>Sustainability/ESG</i> setingkat BOD-1.	BOD-1	20%
3	Pemenuhan pengisian data dalam sistem informasi TJSL Kementerian BUMN.	4 (empat) laporan yang lengkap dan tepat waktu	20%
4	Meningkatkan kolaborasi antar BUMN maupun dengan pihak lain yang sesuai kompetensinya dalam pelaksanaan program TJSL, dengan tujuan untuk meningkatkan dampak positif program.	3 program	20%
5	Melibatkan peran serta karyawan secara aktif dalam program TJSL.	Seluruh Karyawan tetap	20%

Tabel 10. 14 KPI TJSL Tahun 2024

BAB X LAIN-LAIN

1. Kesimpulan

Target-target finansial RKAP Perum LKBN Antara Tahun 2024 secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut:

(dalam juta Rupiah)

Aspek	2023 (prognosa)	Target 2024	%
Pendapatan usaha	448,932	481,324	7.22%
Beban pokok usaha	312,586	331,415	6.02%
Beban umum	106,720	132,783	24.42%
Laba bersih	22,734	12,134	-46,62%
Arus kas operasi	32,707	24,539	-24.97%
Arus kas	111,732	95,548	-15,99%
EBITDA	47,780	37,784	-20.92%

Tabel 10. 15 Target Kunci Perum LKBN Antara

Dalam rangka mencapai target finansial sebagaimana disebutkan di atas, maka program kerja yang ditetapkan perusahaan pada tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

- a. Membangun literasi politik untuk menyukseskan PEMILU
- b. Efisiensi Perusahaan di segala lini:
 1. Pengalihan program Dapen menjadi DPLK manfaat pasti
 2. Pembatasan produksi berita PSO sebesar 120%
- c. Pemantapan usaha eksisting
- d. Ekspansi teknologi dan aset tetap penunjang kinerja:
 1. Pembuatan studio Antara TV
 2. Pengadaan teknologi penunjang "Jelajah Indonesia"
 3. Akuisisi aset tetap tidak bergerak
- e. Pengembangan talenta inklusif dan perbaikan tata kelola

2. Hal-hal yang memerlukan persetujuan:

- a. Persetujuan dan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2024, termasuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dewan Pengawas 2024.
- b. Pengesahan RKA Program TJSI tahun 2024.
- c. Penetapan *Key Performance Indicators* (KPI) yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2024 antara Direksi, Dewan Pengawas, dengan Pemilik Modal.
- d. Penetapan *Key Performance Indicators* (KPI) yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2024 Dewan Pengawas dengan Pemilik Modal.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Penerimaan Risiko pada Level Korporat

Nilai Kapasitas Risiko Perusahaan	Nilai Selera Risiko Perusahaan	Nilai Toleransi Risiko Perusahaan	Nilai Batasan Risiko
141,689,891,675.49	28,277,978,335.10	35,397,472,918.87	12,262,250,908.18

Lampiran 2 Metrik Strategi Risiko

Kategori Risiko BUMN	Kategori Risiko T2 & T3 KBUMN	Risk Appetite Statement	Sikap Terhadap Risiko	Parameter	Satuan Ukuran	Nilai Batasan/Limit
Bisnis dan Strategi	9. Risiko Industri Umum - Formulasi Strategis	Manajemen menyadari bahwa tahun 2024 merupakan fondasi yang penting untuk mencapai target jangka panjang perusahaan, dan dengan demikian akan melakukan tindakan strategis berisiko signifikan dengan melakukan investasi di bidang teknologi yang menunjang kinerja jangka panjang.	Strategis	Deviasi terhadap penyelesaian investasi strategis perusahaan	Bulan	3
Operasional	16. Risiko Industri Umum - Operasional	Tahun 2024 yang berteepatan dengan tahun pemilihan umum presiden dan legislatif merupakan peluang bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerja pemberitaan (dengan indikator tingkat keterbacaan) dan siap mengambil tindakan berisiko tinggi untuk kategori ini,	Strategis	deviasi terhadap jumlah pembaca dari target	jumlah	10 juta
Keuangan	11. Risiko Industri Umum - Keuangan	Perusahaan akan memenuhi kewajiban keuangan dan mempertahankan struktur keuangan yang sehat dan menjaga keberlangsungan usaha secara berkesinambungan.	Moderat	jumlah kas setara kas minimal	rupiah	50 milyar
Keselamatan Kerja	4. Risiko Kebijakan - SDM	Untuk mendapatkan berita-berita eksklusif yang hanya bisa didapatkan dari Kantor Berita Antara dan meningkatkan reputasi perusahaan di bidang pers, perusahaan akan mengirim wartawan untuk melakukan peliputan ke daerah konflik, daerah rawan bencana, dan liputan berbahaya lainnya. Meskipun demikian, perusahaan akan menjaga keselamatan wartawan dengan maksimal dengan maksimal. Untuk kategori ini, selera perusahaan adalah tidak toleran.	Tidak toleran	Jumlah kecelakaan kerja yang mengakibatkan kehilangan nyawa	Jumlah	0

Kategori Risiko BUMN	Kategori Risiko T2 & T3 KBUMN	Risk Appetite Statement	Sikap Terhadap Risiko	Parameter	Satuan Ukuran	Nilai Batasan/Limit
Hukum dan Kepatuhan	12. Risiko Industri Umum - Reputasi & Kepatuhan	Perusahaan akan selalu patuh terhadap semua regulasi yang berlaku, baik untuk induk maupun untuk anak perusahaan, dan tidak akan mentoleransi pelanggaran-pelanggaran hukum yang berdampak besar pada keuangan maupun reputasi perusahaan,	Tidak toleran	Jumlah tuntutan hukum yang masuk di meja persidangan oleh pihak eksternal maupun internal	Jumlah	3
Reputasi	12. Risiko Industri Umum - Reputasi & Kepatuhan	Perusahaan akan melakukan sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan reputasi perusahaan sebagai kantor berita pada tahun pemilihan umum dan menerima risiko dalam batas moderat,	Strategis	Jumlah peristiwa terkait perusahaan yang mendapatkan publikasi negatif di media nasional	Jumlah	3
Informasi Teknologi	14. Risiko Industri Umum - Teknologi & Keamanan Siber	Perusahaan menyadari bahwa kelancaran operasi untuk mencapai target pada tahun 2024 sangat bergantung pada keamanan sistem teknologi informasi, dan tidak akan toleran terhadap risiko-risiko keamanan siber yang mengancam berjalannya operasional perusahaan.	Tidak toleran	Jumlah gangguan yang menyebabkan sistem krusial mati total selama lebih dari enam jam	jumlah	0

Lampiran 3 Sasaran dan Strategi Bisnis Perusahaan

Pilihan Sasaran dan Strategi	Hasil yang diharapkan dapat diterima perusahaan	Nilai Risiko Yang Akan Timbul	Nilai limit risiko sesuai dengan parameter risiko dalam Metrik Strategi Risiko	Keputusan Penetapan
<p>Target Ebitda sebesar 33,89 miliar rupiah:</p> <p>Strategi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - monetasi aset baru di Pasar Baru, Cisarua, dan Ambon yang dibeli atau direnovasi pada 2023 - Ekspansi produk IMCS ke biro-biro daerah - Peningkatan pendapatan AETP 	Pendapatan tambahan sebesar Rp10 milyar	Keterlambatan penyelesaian proyek investasi strategis selama 1 bulan	3 bulan	Accept
<p>Tingkat keterbacaan antaranews sampai dengan 33% atau 80 juta setahun</p> <p>Strategi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan jumlah berita non PSO - pengelolaan ulang sosial media Antara di kantor pusat maupun biro 	Pendapatan Departemen Kerjasama dan Konten mencapai lebih dari Rp40 miliar atau naik Rp10 miliar dari prognosa 2023	Deviasi tingkat keterbacaan antaranews sebesar lima juta	10 juta	Accept
<p>Tingkat kelolosan berita PSO sebesar 80% dengan limit overproduksi sebesar 120%</p> <p>Strategi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - membatasi produksi berita PSO maksimal 120% dari kuota Kominfo - fokus pada kualitas berita yang diharapkan oleh Kominfo 	Terjaganya beban pokok produksi berita PSO sesuai dengan target RKAP	Kas setara kas turun Rp 17 milyar menjadi Rp 78 milyar dari target (Rp 95 milyar)	Rp 50 milyar	Accept
<p>Implementasi roadmap perbaikan Dana Pensiun</p> <p>Strategi:</p> <p>Mengalihkan pengelolaan DPPK Manfaat Pasti menjadi DPLK Iuran Pasti</p>	Efisiensi pengelolaan dana pensiun sebesar lebih dari Rp 100 miliar dalam lima tahun dari 2025	Penurunan kas setara kas sebesar Rp 20 milyar menjadi Rp 65 milyar dari target (Rp 95 milyar)	Rp 50 milyar	Accept

Lampiran 4 Profil Risiko Utama Perusahaan

No. Risiko	Peristiwa Risiko	Penyebab risiko	Key Risk Indicators	Kategori Threshold KRI			Existing Control	Deskripsi Dampak	Perkiraan Waktu Terpapar Risiko
				Aman	Hati-Hati	Bahaya			
RU-1	Membengkaknya defisit solvabilitas Dapen saat pembubaran	Sebagian asset Dana Pensiun sudah tidak dapat dicairkan karena sebagian reksadana dan emiten saham yang diinvestasikan bubar	Prosentase pembengkakan defisit (defisit solvabilitas tercatat dengan hasil likuidasi aset)	30	40	50	Dapen selalu melakukan valuasi aktuarial, termasuk di antaranya nilai solvabilitas liabilitas dan kekayaan pendanaan setiap tahun	Perusahaan harus menanggung tambahan defisit	Juni 2024
RU-2	Meningkatnya serangan siber pada masa pemilihan umum	Sistem pertahanan IT belum kuat menghadapi peningkatan serangan eksternal yang massif	Jumlah serangan siber yang menembus sistem per triwulan	3	7	10	Melakukan tes-tes dari internal untuk menguji ketahanan server dan Melakukan penguatan di sisi server portal	Operasional perusahaan terhenti jika serangan menembus sistem	Februari - September 2024
		Peningkatan serangan siber secara signifikan							
RU-3	Kegagalan perundingan PKB baru	Kurang baiknya hubungan antara manajemen dengan salah satu serikat pekerja	Bulan penyelesaian PKB terhitung dari awal tahun 2024	Januari	Februari	Maret	Tidak ada	Melemahnya hubungan baik perusahaan dengan serikat pekerja	Sepanjang tahun
RU-4	Tingkat penyerapan anggaran PSO hanya 90%	Mekanisme insentif kinerja lebih dominan tergantung pada faktor produksi, bukan hasil kelolosan atau ukuran kualitas lainnya	Jumlah berita lolos dibanding kuota per periode	100	95	90	Coaching clinic untuk meningkatkan kualitas berita pewarta	Perusahaan kehilangan potensi pendapatan PSO sebesar Rp17 milyar	Desember 2024
		Berita PSO dan Non PSO masih tercampur karena sistem ticketing							
RU-5	Memburuknya hubungan dengan pemerintah baru	Pemenang pemilihan umum merasa dirugikan oleh pemberitaan Antara	Persen berita salah dibanding produksi	1	2	5	Redaktur berfungsi untuk mengedit dan mengawasi berita pewarta sebelum diterbitkan	Reputasi perusahaan menurun	Februari - September 2024
RU-6	Terjadinya pelanggaran terhadap perjanjian kerjasama dengan Bloomberg	Ketidakmampuan/Kesalahan/Terlewatnya kepatuhan Antara ETP kepada perjanjian kerjasama dengan Bloomberg	Jumlah teguran tertulis, sanksi atau tuntutan	0	1	3	Perusahaan telah mendirikan fungsi Manajemen Risiko dan Kepatuhan yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemantauan serta	Keluarnya Bloomberg dari hubungan strategic partnership dengan ANTARA ETP.	Sepanjang Tahun

No. Risiko	Peristiwa Risiko	Penyebab risiko	Key Risk Indicators	Kategori Threshold KRI			Existing Control	Deskripsi Dampak	Perkiraan Waktu Terpapar Risiko
				Aman	Hati-Hati	Bahaya			
							menyusun alat pemantauan dan evaluasi terkait kepatuhan terhadap perjanjian Kerjasama.		
RU-7	Penolakan pemindahan DPPK ke DPLK	Penerima manfaat merasa tidak aman dan khawatir akan merugi ketika peralihan dana pensiun	persentase penerima manfaat yang menolak pemindahan	10	30	50	-	Penolakan terliput oleh media nasional yang menyebabkan reputasi perusahaan menurun	Sepanjang Tahun
RU-8	Terhambatnya perkembangan Antara ETP	Kurangnya pertumbuhan dalam jumlah transaksi bisa disebabkan oleh kondisi pasar keuangan yang tidak menguntungkan atau penurunan permintaan dari pelanggan	penambahan transaksi pada TW 1 2024	3	2	1	Perusahaan mengembangkan produknya untuk menghadirkan platform kepada khalayak yang lebih luas dan melakukan kampanye sosialisasi kepada para pelaku pasar.	tidak tercapainya peningkatan jumlah transaksi berdampak pada eksposur platform ETP kepada pelaku pasar uang dan pasar valuta asing yang mengalami pertumbuhan yang terbatas	Sepanjang tahun
RU-9	Tidak tertagihnya piutang usaha	Belum efektifnya sistem penagihan perusahaan	Overdue piutang berusia 6 bulan ke atas	3	5	10	Mengirim surat penagihan secara rutin kepada pelanggan	CKPN perusahaan meningkat Rp. 5 miliar	Sepanjang tahun
RU-10	Terjadi kesalahan dalam menyusun strategi perencanaan dan manajemen monetasi aset.	Perusahaan belum memiliki pengalaman dalam mengelola aset residensial.	Realisasi pendapatan LPA dibandingkan dengan target pada triwulan 3 2024	75	60	50	Tidak ada	Potensi pendapatan tidak terserap dengan optimal	Sepanjang tahun

No. Risiko	Peristiwa Risiko	Penyebab risiko	Key Risk Indicators	Kategori Threshold KRI			Existing Control	Deskripsi Dampak	Perkiraan Waktu Terpapar Risiko
				Aman	Hati-Hati	Bahaya			
RU-11	Keterlambatan penyelesaian proyek renovasi Pasar Baru dan Cisarua	Keramaian lokasi di kantor Antara Pasar Baru dan akses jalan yang sulit dapat menghambat penyelesaian proyek renovasi terlambat dari target Maret 2024	Progres penyelesaian proyek sebulan sebelum tenggat waktu yang telah ditetapkan	90	80	70	Pengawasan oleh konsultan independen	Target investasi tidak tercapai	Desember 2024
		kesalahan teknis yang tidak terduga akibat kesalahan vendor atau cuaca memburuk yang menyebabkan terhambatnya pekerjaan proyek konstruksi							
RU-12	proses ekspansi produk IMCS ke biro daerah tidak maksimal	Belum adanya resources yang mumpuni dari segi SDM untuk bagian analis strategi komunikasi, produksi, serta pemasaran atau penjualan.	Jumlah kerjasama produk IMCS pada sampel biro daerah di setiap pulau	6	3	0	Direktorat Komersil sudah memiliki analis IMCS yang berkompeten dan berpengalaman	Target pendapatan tidak tercapai dan investasi untuk ekspansi produk IMCS ke biro tidak optimal	Sepanjang tahun
		Perbedaan kondisi ekonomi yang berbeda-beda dari tiap daerah yang membuat anggaran pelanggan untuk jasa komunikasi berbeda-beda							
		ketersediaan sumberdaya pihak ketiga yang ada di daerah belum teridentifikasi baik dari segi kelimpahan pihak ketiga dan kualitas untuk memenuhi standar produk yang akan diujikan kepada pelanggan							

Lampiran 5 Risiko Inheren Kuantitatif dalam Juta

No. Risiko	Risiko Inheren							
	Asumsi Perhitungan Dampak	Nilai Dampak	Skala Dampak	Nilai Probabilitas	Skala Probabilitas	Eksposur Risiko	Skala Risiko	Level Risiko
RU-1	Jumlah aset tidak sehat Dapen	10,000	5	95%	5	9,500	25	Sangat Tinggi
RU-4	30% dari proyeksi pendapatan PSO dikalikan GPM PSO tahun sebelumnya	7,698	4	85%	5	6,544	20	Sangat Tinggi
RU-5	Penurunan pendapatan LMK sebesar 30%	7,861	4	80%	4	6,289	16	Tinggi

RU-9	Kenaikan beban penyisihan piutang sebesar 50%	3,199	2	90%	5	2,879	10	Sedang
RU-10	Potensi pendapatan jika tingkat okupansi aset tersebut 100%	2,977	2	90%	5	2,679	10	Sedang
RU-11	Kenaikan biaya renovasi sebesar 5% dari anggaran	3,750	2	70%	4	2,625	8	Rendah
RU-12	30% dari target pendapatan Biro secara keseluruhan, dikalikan GPM Komersil	912	1	72%	4	657	4	Rendah

Lampiran 6 Risiko Inheren Kualitatif

No. Risiko	Risiko Inheren						
	Penjelasan Dampak Kualitatif	Skala Dampak	Nilai Probabilitas	Skala Probabilitas	Nilai Eksposur Risiko	Skala Risiko	Level Nilai Risiko
RU-2	Berhentinya aplikasi pemberitaan dan keuangan selama lebih dari 6 jam	5	80%	4	490,490,036	20	Sangat Tinggi
RU-3	Demonstrasi serikat pekerja yang diberitakan media nasional	5	75%	4	459,834,409	20	Sangat Tinggi
RU-6	Keluarnya Bloomberg dari hubungan strategic partnership dengan ANTARA ETP.	4	75%	4	367,867,527	16	Tinggi
RU-7	Penolakan terliput oleh media nasional yang menyebabkan reputasi perusahaan menurun	4	75%	4	367,867,527	16	Tinggi
RU-8	tidak tercapainya peningkatan jumlah transaksi berdampak pada eksposur platform ETP kepada pelaku pasar uang dan pasar valuta	3	75%	4	275,900,645	12	Tinggi

	asing yang mengalami pertumbuhan yang terbatas						
--	--	--	--	--	--	--	--

Lampiran 7 Risiko Residual Kuantitatif dalam Juta

No. Risiko	Target Risiko Residual																							
	Nilai Dampak				Skala Dampak				Nilai Probabilitas				Skala Probabilitas				Eksposur Risiko				Skala Risiko			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
RU-1	10,000	7,500	5,000	3,000	5	4	3	2	95%	76%	61%	49%	5	4	4	3	9,500	5,700	3,040	1,459	25	16	12	6
RU-4	7,698	7,698	5,388	3,849	4	4	3	2	85%	51%	41%	41%	5	3	3	3	6,543	3,926	2,199	1,570	20	12	9	6
RU-5	7,861	5,502	4,127	2,063	4	3	2	1	80%	70%	70%	70%	4	4	4	4	6,289	3,852	2,889	1,444	16	12	8	4
RU-9	3,199	2,239	2,239	2,239	2	1	1	1	90%	72%	58%	46%	5	4	3	3	2,879	1,612	1,289	1,032	10	4	3	3
RU-10	2,977	2,976	2,976	2,977	2	2	2	2	90%	60%	40%	20%	5	4	3	2	2,679	1,786	1,191	595	10	8	6	4
RU-11	3,750	2,239	1,599	960	2	1	1	1	70%	56%	45%	36%	4	3	3	2	2,625	1,254	716	344	8	3	3	2
RU-12	912	912	912	912	1	1	1	1	72%	43%	43%	43%	4	3	3	3	657	394	394	394	4	3	3	3

Lampiran 8 Risiko Residual Kualitatif

No. Risiko	Target Risiko Residual																			
	Skala Dampak				Nilai Probabilitas				Skala Probabilitas				Eksposur Risiko				Skala Risiko			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
RU-2	5	4	3	2	80%	80%	80%	80%	4	4	4	4	490,490,036	392,392,029	294,294,022	196,196,015	20	16	12	8
RU-3	5	4	3	3	75%	50%	25%	10%	4	3	2	1	459,834,409	245,245,018	91,966,882	36,786,753	20	12	6	3
RU-6	4	4	4	4	75%	50%	50%	50%	4	3	3	3	367,867,527	245,245,018	245,245,018	245,245,018	16	12	12	12
RU-7	4	4	2	2	75%	50%	25%	25%	4	3	2	2	367,867,527	245,245,018	61,311,255	61,311,255	16	12	4	4
RU-8	3	3	3	1	75%	50%	25%	25%	4	3	2	2	275,900,645	183,933,764	91,966,882	30,655,627	12	9	9	2

Lampiran 9 Rencana Perlakuan Risiko

No. Risiko	Penyebab risiko	Rencana Perlakuan Risiko	Biaya Perlakuan Risiko (Rp/Mata Uang Lain)	Timeline (Bulan)												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
RU-1	Sebagian asset Dana Pensiun sudah tidak dapat dicairkan karena sebagian reksadana dan emiten saham yang diinvestasikan bubar	Pencadangan free cashflow untuk membeli aset Dana Pensiun yang tidak terjual	Rp. 4,700,000,000													
RU-2	Sistem pertahanan IT belum kuat menghadapi peningkatan serangan eksternal yang massif	Membuat Disaster Recovery Center	-													
	Peningkatan serangan siber secara signifikan	Meningkatkan keamanan sistem dari segi firewall	Rp. 25,000,000													
RU-3	Kurang baiknya hubungan antara manajemen dengan salah satu serikat pekerja	Melibatkan konsultan independen untuk membantu penyelesaian perundingan PKB	-													
RU-4	Mekanisme insentif kinerja lebih dominan tergantung pada faktor produksi, bukan hasil kelolosan atau ukuran kualitas lainnya	Perubahan sistem IKR dengan mempertimbangkan tingkat kelolosan PSO dan jumlah keterbacaan di antaranews	-													
	Berita PSO dan Non PSO masih tercampur karena sistem ticketing	Perbaiki sistem ticketing yang memisahkan berita PSO dan Non PSO	-													
RU-5	Pemenang pemilihan umum merasa dirugikan oleh pemberitaan Antara	Kontrol tingkat keberpihakan berita yang berkaitan dengan Pemilu oleh Redaktur	-													
RU-6	Ketidakmampuan/Kesalahan/Terlewatnya kepatuhan Antara ETP kepada perjanjian kerjasama dengan Bloomberg	Perusahaan menjalankan koordinasi secara berkala dengan Bloomberg	-													

No. Risiko	Penyebab risiko	Rencana Perlakuan Risiko	Biaya Perlakuan Risiko (Rp/Mata Uang Lain)	Timeline (Bulan)												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
RU-7	Penerima manfaat merasa tidak aman dan khawatir akan merugi ketika peralihan dana pensiun	Sosialisasi komprehensif terkait jaminan manfaat yang diterima oleh penerima manfaat	-													
RU-8	Kurangnya pertumbuhan dalam jumlah transaksi bisa disebabkan oleh kondisi pasar keuangan yang tidak menguntungkan atau penurunan permintaan dari pelanggan	Diskusi mengenai pengembangan produk akan dijadwalkan secara berkala dengan regulator dan mitra untuk memastikan kelancaran proses pengembangan.	-													
RU-9	Belum efektifnya sistem penagihan perusahaan	Pembentukan tim penagihan lintas direktorat	Rp. 300,000,000													
RU-10	Perusahaan belum memiliki pengalaman dalam mengelola aset residensial.	memakai jasa Manajemen Residensial yang memiliki pengalaman baik dalam mengelola aset residensial	Rp. 535,770,298													
RU-11	Keramaian lokasi di kantor Antara Pasar Baru dan akses jalan yang sulit dapat menghambat penyelesaian proyek renovasi terlambat dari target Maret 2024	Memonitor progress pelaksanaan proyek renovasi Pasar Baru, Cisarua, dan IKN	Rp. 100,000,000													
	kesalahan teknis yang tidak terduga akibat kesalahan vendor atau cuaca memburuk yang menyebabkan terhambatnya pekerjaan proyek konstruksi	Monitoring pekerjaan proyek	-													
RU-12	Belum adanya resources yang mumpuni dari segi SDM untuk bagian analis strategi komunikasi, produksi, serta pemasaran atau penjualan.	membuat perencanaan mengenai peningkatan sdm di biro untuk usaha bisnis perusahaan	Rp. 50,000,000													
	Perbedaan kondisi ekonomi yang berbeda-beda dari tiap daerah yang membuat anggaran pelanggan untuk jasa komunikasi berbeda-beda	membuat feasibility study tiap daerah yang ada di biro agar menasar pada target	-													

No. Risiko	Penyebab risiko	Rencana Perlakuan Risiko	Biaya Perlakuan Risiko (Rp/Mata Uang Lain)	Timeline (Bulan)											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ketersediaan sumberdaya pihak ketiga yang ada di daerah belum teridentifikasi baik dari segi kelimpahan pihak ketiga dan kualitas untuk memenuhi standar produk yang akan diujakan kepada pelanggan	pengkajian sumberdaya yang dibutuhkan di daerah yang telah menjadi wilayah ekspansi bisnis	Rp -									1			

Pernyataan Selera Risiko

Perum LKBN Antara

2024

Untuk penyelarasan inisiatif strategis dengan penganggaran berbasis risiko, maka perusahaan menyatakan bahwa selera risiko dan parameternya pada tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Kategori	Selera	Pernyataan
Bisnis dan Strategi	Strategis (Tinggi)	Manajemen menyadari bahwa tahun 2024 merupakan fondasi yang penting untuk mencapai target jangka panjang perusahaan, dan dengan demikian akan melakukan tindakan strategis berisiko signifikan dengan melakukan investasi di bidang teknologi yang menunjang kinerja jangka panjang.
Operasional	Strategis (Tinggi)	Tahun 2024 yang bertepatan dengan tahun pemilihan umum presiden dan legislatif merupakan peluang bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerja pemberitaan (dengan indikator tingkat keterbacaan) dan siap mengambil tindakan berisiko tinggi untuk kategori ini.
Keuangan	Moderat	Perusahaan mentoleransi eksposur risiko keuangan sampai level moderat – karena perusahaan akan melakukan investasi yang cukup besar di bidang teknologi di tengah ketidakpastian ekonomi akibat retraksi pasca pandemi dan pemilihan umum.
Keselamatan Kerja	Tidak Toleran	Untuk mendapatkan berita-berita eksklusif yang hanya bisa didapatkan dari Kantor Berita Antara dan meningkatkan reputasi perusahaan di bidang pers, perusahaan akan mengirim wartawan untuk melakukan peliputan ke daerah konflik, daerah rawan bencana, dan liputan berbahaya lainnya. Dalam menjalankan tugas ini, Perusahaan menerapkan kehati-hatian yang sangat tinggi dengan membekali teknik peliputan dan asuransi perlindungan wartawan, dan tidak toleran terhadap risiko keselamatan pegawai. Perusahaan tetap menjaga stabilitas dan konsistensi dalam operasional redaksi.
Hukum dan Kepatuhan	Tidak Toleran	Perusahaan akan selalu patuh terhadap semua regulasi yang berlaku, baik untuk induk maupun untuk anak perusahaan, dan tidak akan mentoleransi pelanggaran-pelanggaran hukum yang berdampak besar pada keuangan maupun reputasi perusahaan.
Reputasi	Strategis (Tinggi)	Perusahaan akan melakukan sejumlah inisiatif untuk meningkatkan reputasi perusahaan sebagai kantor berita pada tahun pemilihan umum dan menerima risiko dalam batas strategis.
Teknologi Informasi	Tidak Toleran	Perusahaan menyadari bahwa kelancaran operasi untuk mencapai target pada tahun 2024 sangat bergantung pada keamanan sistem teknologi informasi, dan tidak akan toleran terhadap risiko-risiko keamanan siber yang mengancam berjalannya operasional perusahaan.

Parameter Risiko

Kategori	Selera	Parameter
Bisnis dan Strategi	Strategis (Tinggi)	Keterlambatan maksimal untuk proyek investasi strategis perusahaan yang akan mendatangkan pendapatan baru (Cirarua dan Pasar Baru) adalah tiga (3) bulan
Operasional	Strategis (Tinggi)	Deviasi maksimal dari target tingkat keterbacaan antaranews.com – sebesar 80 juta setahun pada 2024 – adalah 10 juta
Keuangan	Moderat	Jumlah minimal kas setara kas sepanjang tahun adalah Rp 45 miliar
Keselamatan Kerja	Tidak Toleran	Jumlah kecelakaan kerja yang berakibat kehilangan nyawa bagi pegawai Antara adalah nol (0)
Hukum dan Kepatuhan	Tidak Toleran	Jumlah maksimal tuntutan hukum yang sampai di meja persidangan oleh pihak eksternal maupun internal adalah tiga (3)
Reputasi	Strategis (Tinggi)	Jumlah maksimal publikasi negatif di media nasional adalah tiga (dari peristiwa yang berbeda)
Teknologi Informasi	Tidak Toleran	Jumlah maksimal gangguan atau serangan siber yang membuat infrastruktur vital (SP2MT dan AIS 2.0) tidak berfungsi total selama lebih dari enam jam adalah 0 (nol)

Jakarta, Januari 2024



Kemal Gani
Ketua Dewan Pengawas



Widiarsi Agustina
Anggota



Mayong Suryo Laksono
Anggota



Monang Sinaga
Anggota



Akhmad Munir
Direktur Utama



Irfan Junaidi
Direktur Pemberitaan



Jaka Sugiyanta
Direktur Komersil,
Pengembangan Bisnis,
dan IT



Nina Kurnia Dewi
Direktur Keuangan
dan MR